

TESIS

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MENURUT KAJIAN
HUKUM LINGKUNGAN

(Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang)



O
L
E
H

Hartono, S.H
NIM B4A.005019

Pembimbing

Dr. Arief Hidayat, S.H. M.S

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNDIP
SEMARANG 2007

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MENURUT KAJIAN
HUKUM LINGKUNGAN

(Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang)

disusun oleh

HARTONO
NIM :B4A.005019

Dipersembahkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 28 Mei 2007

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
PembimbingKetua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Dr.Arief Hidayat, SH,MS

Prof. Dr.Barda Nawawi Arief, S.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Harga diri tidak ditentukan oleh materialistic, tetapi harga diri akan ditentukan oleh ucapan dan perbuatan yang terpuji.

Hanya Allah Swt tempat aku mempercayakan diri, dan hanya karena Allah Swt lah aku harus berprestasi

Kupersembahkan untuk :

Istriku tercinta SRI IRIANTI, dan anak-anakku :
Kusuma Akhmad Hariyanto, Rakhma Dewi
Hariyantika, Hari laksono.

ABSTARKSI.

Pembangunan Kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dimulai pada tahun 1995/1996 setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah, dalam perjalanannya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan perijinannya, penyimpangan *Site Plan*, penyimpangan penguasaan lahan, penyimpangan golongan galian C, penyimpangan tataguna lahan. Penyimpangan itu diketahui sejak tahun 2003, kemudian Pemerintah melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Semarang, memberitahukan kepada Pemrakarsa, bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, mewajibkan kepada PT IPU selaku pemrakarsa Kawasan ini, untuk membuat kajian ulang sebelum melakukan pembangunan kawasan selanjutnya.

Penulisan Tesis dengan judul PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MENURUT KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN (Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang) ini, didasari kepada pelaksanaan pembangunan kawasan industri yang diprakarsai oleh PT IPU, telah menimbulkan dampak luas bukan hanya kepada masyarakat sekitar kawasan saja, melainkan juga kepada masyarakat umum kota Semarang, antara lain Masyarakat petani tambak di kawasan pantai utara kota Semarang, masyarakat perumahan yang berdekatan dengan aliran sungai silandak, masyarakat umum pengguna jasa transportasi udara dan transportasi darat (kereta Api, Bus) khususnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau dampak yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan adalah adanya penurunan Debit air bawah tanah yang terus merosot akibat pembangunan / pembuatan Sumur Air Bawah Tanah di Kawasan Industri yang tidak terkendali, debu yang mengguyur sekitar kawasan Industri Candi ini, merosotnya kuwalitas kesehatan masyarakat sekitar, merosotnya kesuburan tanah yang menyebabkan menurunnya kemampuan resapan air atau kemampuan konservasi kawasan sekitar.

Pembangunan kawasan Industri candi di kawasan Jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang dari sisi perijinannya telah terjadi pelanggaran, karena pembangunan yang sampai sekarang masih berjalan, tidak mempunyai dasar perijinan yang resmi, dari institusi tehnis Pemerintah kota Semarang, maka perlu dilakukan langkah-langkah hokum yang jelas yang beupa peninjauan kembali perijinannya, pemberian sanksi secara hokum yang jelas, dan transparan kepada publik.

ABSTRACT

Candi Industrial Estate had been develop in Gatot Subroto Street, included in Ngaliyan, west of Semarang Central Java, by IPU Company. The developing have been started in 1995 / 1996, because of recommended to stop operating by BAPEDALDA Semarang, because of trouble of implementations of Site Plant.

The title of Developing Industrial Estate according from Environmental Law, (research of casus in Semarang City) is a writing of title of Tesis. The concentrations of Tesis is developing Industrial Estate had been hold by IPU company, the way in developing had been polluted, and broken Environmental, the IPU company in developing Industrial Estate, never take care of people who have live a long behind this industrial estate. In the way of developing had been complaint by peoples about pollutions, never take care of ecosystem.

Eventhought Industrial Estate had been complaint by peoples, who get more negative effect of developing Industrial Estate, and the Government had known about it, but no more actions from our Government, no more actions of enforcement of law any more. IPU had known that he was crime in Environmental Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Swt, Alkhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, Allah Swt telah berkenan melimpahkan Taufiq dan HidayahNya. Sehingga karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, sebagai syarat untuk menyelesaikan studinya dalam menempuh akhir studi pada Magister Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universita Diponegoro Semarang ini.

Dengan penuh kesadaran bahwa penulisan Tesis dengan judul PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI CANDI MENURUT KAJIAN HUUM LINGKUNGAN ini tidak mungkin akan selesai, tanpa petunjuk, hidayah dan pertolongan dari Allah Swt, yang berupa karunia sehat, karunia kesempatan ditengah-tengah penulis harus juga menunaikan tugas ritin sebagai Abdi Negara, serta bantuan dan dorongan dari semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, semoga budi baik dari bapak, ibu dan saudara sekalian senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Swt, Amien.

Pada penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan disana-sisni, mengingat sangat tertutupnya objek penelitian, dan data yang diperoleh, khususnya dari PT.IPU yang sama sekali menolak untuk dilakukan penelitian, namun demikian penulis berusaha secara maksimal untuk mendapatkan keterangan-keterangan seperlunya melalui kajian dokumenter, namun hasilnya juga sangat terbatas, kemudian dari pemerintah kota Semarang juga kurang terbuka dalam memeberikan data

yang diperlukan dalam penelitian ini, kecuali dari Bapedalda Kota Semarang yang telah memberikan dukungan yang sangat besar dalam penulisan ini.

Pada kesempatan yang amat membahagiakan kami ini, perkenankan kami mengucapkan banyak terimakasih kami haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H, Ketua Program Strata Dua (S2) Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus selaku Ketua Tim Review Proposal, yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam rangka perbaikan Proposal penelitian, dan memberikan semangat dan dorongan yang sangat berharga sehingga mampu memberikan gambaran arah penulisan Tesis ini.
2. Dr.Arief Hidayat, S.H, M.S, dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis haturkan banyak terima kasih, berkat kesabaran beliau selaku pembimbng yang selalu memberikan arahan dan petunjuknya ditengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, dalam penulisan Tesis ini, semoga budi baik beliau yang patut diteladani hanya Allah Swt yang akan memberikan balasan yang setimpal.
3. Prof Dr.Hj.Esmi Warasih Puji Rahayu, S.H, M.S. selaku Anggota Tim Review Proposal Tesis ini, yang telah berkenan memberikan petunjuk, arahan dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan penulisan tesis ini, sehingga penulisan lebih terarah.
4. Bp.Eko Sabar Prihatin, S.H, M.S, selaku Anggota Tim Review Proposal Tesis ini, yang telah berkenan memberikan masukan yang sangat berharga demi kelancaran dalam penulisan Tesis ini.
5. Ibu Ani Purwani, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang

banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan lancar.

6. Seluruh Dosen Program S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah sangat berjasa menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studinya.
7. Kepala Badan Informasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk memberikan fasilitas kepustakaan untuk melakukan penelitian, dalam rangka penyelesaian penulisan tesis.
8. Walikota Semarang, Kepala Kesbang Linmas, Kepala Dinas Tata Kota Semarang, yang telah memberikan fasilitas, dan penjelasan-penjelasan dalam rangka memperlancar penulisan Tesis ini.
9. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang, beserta Staf, yang telah memberikan bantuan dan fasilitas, sehingga penulisan tesis ini bisa berjalan lancar.
10. Kepala Kecamatan Ngaliyan Semarang beserta Staf, yang telah memberikan bantuan dan fasilitas, sehingga penulisan tesis ini berjalan lancar.
11. Kepada segenap karyawan dan karyawan Program S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah berjasa besar membantu proses studi, hingga selesainya penulisan tesis ini.
12. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan seprofesi Bidkum Polda Jateng, yang telah memberi spirit untuk menyelesaikan studi ini.

Secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada istri tercinta Sri Irianti, anak-anakku Kusuma Akhmad Harianto, Rakhma Dewi Hariyantika, Hari Laksono, ayahhanda yang kami hormati H.Irsyam

Afwandi, Ibunda Hj. Marfu'ah, ibu mertua Ibu Rasmi yang telah memberikan dorongan dan pengertiannya hingga selesainya penulisan tesis ini, dan tidak lupa pula kepada kakanda Prof Dr.KH. Ali Mansyur, S.H, C.N. M.H., dan Mbak Hj.Azizah, S.H. M.H, yang secara khusus memebrikan perhatian dan dorongan yang sangat besar, sehingga selesainya studi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penulisan Tesis ini, penulis dengan keikhlasan hati memohon kritik atas penulisan ini, demi sempurnanya penulisan Tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, yang disebabkan oleh tertutupnya objek penelitian yaitu managemen PT.IPU, yang sama sekali tidak mau menerima penulis untuk melakukan penelitian ini, namun demikian berkat bantuan dari rekan Bp. Ir Sapto Cahyono, pada Bapedalda Kota Semarang yang telah berkenan memberikan bantuan materi penelitian ini, hingga selesainya penul;isan ini, semoga budi baik bapak / ibu sekalian mendapat balasan dari Allah Swt, semoga tulisan yang sangat sederhana ini mampu memberikan sumbang saran kepada pemerhati masalah ini.

Sekian terima kasih.

Wassalamu alai'kum Wr Wb.

Semarang, April 2007

Penulis;

HARTONO

Daftar isi

Halaman judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
Halaman motto persembahan.....	iii.
Abstrak.....	iv.
Abstract.....	vii
Kata pengantar.....	viii
Daftar isi.....	ii.
Daftar tabel.....	xviii
Bab. I. Pendahuluan.....	1.
A. Latar belakang penelitian.....	1
1. Alasan pemilihan judul.....	1
2. Deskripsi lokasi penelitian.....	10
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Kontribusi hasil penelitian.....	13
1. Manfaat praktis.....	13
2. Manfaat teoritis.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	14
1. Pengertian pembangunan.....	14.
2. Pengertian Kawasan Industri.....	17
3. Pengertian hukum lingkungan.....	19.
4. Hukum sebagai alat kontrol sosial.....	22
5. Hukum lingkungan sebagai sarana kebijakan penataan lingkungan.....	28

F.	Manfaat hasil penelitian.....	30
1.	Manfaat praktis.....	30
2.	Manfaat teoritis.....	30
G.	Metoda Penelitian.....	32
1.	Lokasi penelitian.....	33.
2.	Penentuan sumber informasi.....	34
3.	Penentuan Sumber data.....	34
4.	Teknik pengumpulan data....	34.
5.	Teknik analisa data dan validitas data.....	35
Bab. II.	Tinjauan Pustaka.....	36
A.	Pengelolaan lingkungan Hidup.....	36
1.	Pengertian pengelolaan lingkungan hidup	36
2.	Tata Lingkungan Hidup.....	44.
a.	Pengertian penataan lingkungan hidup.....	44
b.	Pengertian penataan menurut hukum lingkungan	47
c.	Dasar hukum penataan lingkungan.....	48
3.	Manfaat penataan menurut hukum lingkungan hidup.....	58
4.	Kesadaran masyarakat terhadap penataan menurut hukum lingkungan hidup.....	58

B.	Manfaat Hukum lingkungan hidup.....	60
1.	Hukum lingkungan menurut aspek perlindungan ekosistem.....	61
2.	Hukum lingkungan dan aspek pelestarian ekosistem.....	65
3.	Hukum lingkungan menurut aspek sejahteraan manusia.....	68

Bab. III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A.	Hasil Penelitian.....	70
1.	Gambaran umum kota Semarang.....	70
2.	Gambaran umum wilayah kecamatan Ngaliyan	72.
a.	Keadaan geografis wilayah kecamatan Ngaliyan.....	72.
b.	Keadaan geologis kecamatan Ngaliyan...	73
c.	Keadaan geologis kecamatan Ngaliyan.....	73.
d.	Keadaan geologis kelurahan Ngaliyan....	73
e.	Keadaan geologis kelurahan Babanerep...	74
f.	Keadaan geologis kelurahan Purwoyoso..	75
3.	Rencana Pembangunan Kawasan Industri.....	75
a.	Jangkauan sosialisasi kepada masyarakat	76
b.	Isi sosialisasi	77
1.	sosialisasi tahun 1995-1996.....	77
2.	sosialisasi tahun 2001.....	77

3.	sosialisasi tahun 2005.....	78
c.	Respon masyarakat terhadap materi sosialisasi.....	79
	1) kelompok masyarakat tidak berdaya.....	79
	2) kelompok masyarakat berdaya.....	80
d.	Jenis usaha di kawasan Industri Candi	80
	1) Usaha yang sudah berjalan.....	82
	2) Jenis usaha.....	84
	a. jenis limbah.....	85
	b. manajemen limbah.....	87
4.	Aspek penghijauan.....	87
5.	perijinan kawasan industri.....	90
a.	Latar belakang.....	90
b.	Alasan penentuan lokasi.....	91
c.	penelitian lokasi.....	93
	1. Lokasi kawasan industri	93
	a) kelurahan Ngaliyan.....	93
	b) Kelurahan Babankerep.....	94
	c) Kelurahan Purwoyoso.....	94
	2. kondisi geografis.....	95
	a) kondisi sebelum dibangun kawasan Industri.....	95
	b) kondisi setelah keluarnya ijin pembangunan kawasan.....	95

6.	Tujuan pembangunan kawasan industri dari aspek hukum lingkungan.....	96.
a.	Luas wilayah kawasan industri candi....	96
1)	luas wilayah yang diijinkan.....	96
2)	luas wilayah yang telah dipakai....	96
3)	luas wilayah yang direncanakan secara sepihak.....	97
b.	Jenis – jenis usaha dikawasan Industri Candi.....	100.
1.	jenis-jenis usaha yang sudah berjalan.....	101
2.	lokasi yangt ditetapkan.....	103
3.	jenis limbah yang diperkirakan....	105
4.	managemen pengolahan limbah.	106
c.	Aspek Penghijauan.....	106
1.	Luas wilayah penghijauan.....	107
2.	Area penghijauan.....	107
3.	Manfaat yang dikehendaki.....	107.
B.	Pembahasan hasil penelitian.....	108
1.	Perijinan pembangunan kawasan industri candi.....	108.
a.	Dasar hukum perijinan.....	108
1)	luas wilayah yang diijinkan.....	108
2)	luas wilayah yang telah dipakai.....	110
b.	Implementasi perijinan.....	111
1)	implementasi ijin lokasi.....	118
2)	pelaksanaan perijinan.....	

c.	Pengawasan perijinan.....	122
d..	Peran serta masyarakat.....	127.
2.	aspek hukum pmbangunan kawasan industri menurut hukum lingkungan.....	132
a.	Aspek legalitas perijinan.....	132
b.	Tujuan pembangunan kawasan industri candi....	133
c.	Aspek perlindungan sumber daya alam.....	134
d.	Aspek perusakan struktur tanah.....	136
e.	Aspek kerusakan ekosistem.....	137
f.	Aspek penghijauan dikawasan industri candi.....	142
3.	Aspek penegakaan hukum dalam pembangunan kawasan industri cand.....	142
a.	Penegakaan terhadap hukum agraria / terhadap hukum agraria / pertanahan.....	142
b.	Penegakaan terhadap hukum lingkungan hidup...	144
c.	Penegakkan hukum peraturan daerah.....	150

Bab. IV. PENUTUP.

A.	Kesimpulan.....
B.	Saran.....

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel Demografi.....	74
Tabel 2.	tabel jenis perusahaan.....	102.

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian.

1. Alasan Pemilihan Judul.

Kawasan Industri Candi, adalah kawasan yang terletak di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, daerah yang dulunya merupakan Kawasan perbukitan, sungai-sungai alamiah dan kawasan pertanian tradisional yang digarap oleh masyarakat sekitar, di kawasan perbukitan ini terdapat dua desa yaitu desa Pucung dan desa Desel, kedua warga desa ini adalah warga petani yang mampu mengolah tanah dan lahan menjadi lahan yang produktif, yaitu tanaman penghasil sayur mayur untuk kepentingan masyarakat sekitar. Di kawasan ini ada dua sungai alamiah yang melintas, melalui daerah kelurahan Babankerep dan bermuara di sungai Silandak. Di samping itu, daerah yang dilalui status tanahnya adalah tanah negara, yang dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai lahan pertanian tradisional. Aliran air sungai ini dimanfaatkan oleh sebagian warga perkampungan untuk kepentingan pertanian dan sebagian warga perumahan Sulanji memanfaatkannya sumber air sebagai pengganti air bersih ketika sumur Air Bawah Tanah (sumur artesis) yang dimiliki oleh warga mengalami gangguan. Di dua perumahan yang berdekatan dengan Kawasan Industri Candi ini, hanya bisa mengandalkan sumber air bersih dari pembuatan sumur artesis, disebabkan secara geografis karena ketinggian daerah, tidak memungkinkan untuk mendapatkan pasokan dari air PDAM.

Di kawasan Kecamatan Ngaliyan, utamanya di Kelurahan Ngaliyan mulai dibangun kawasan perumahan pada tahun 1985, Kawasan perumahan ini adalah kawasan perumahan Sulanji yang terdiri dari perumahan Sulanji atas dan Sulanji bawah yang kemudian diberi nama Perumahan Karonsih Timur, Karonsih Utara, dan Karonsih Selatan , Perumahan Wismasari, serta perumahan Pokok Pondasi, kesemuanya berada diwilayah Hukum Kelurahan Ngaliyan. Pada tahun 1989 Kawasan perumahan sulanji dibangun oleh PT. Sulanji, dan mulai ditempati oleh warga pada tahun 1990.

Daerah sekitar perumahan ini, pada saat itu adalah perkebunan jambu, sayur mayur , tanaman keras yang terdiri dari sebagian tanaman jati , pohon buah, pohon bambu dan tanaman lainnya yang dapat difungsikan sebagai penyeimbang terhadap suhu udara sekitar.

Tanaman itu disamping sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang sangat dibutuhkan, juga sebagai bagian dari sumber pendapatan masyarakat sekitar.

Manfaat dari areal perkebunan pada saat itu adalah, disamping sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olah raga alam yang bebas dari polusi, alamnya masih asli, masih banyak satwa-satwa yang hidup di daerah ini, tanpa terusik akibat adanya gangguan dari kepentingan-kepentingan lainnya.

Suhu udara rata-rata kota Semarang pada saat itu, apabila dibandingkan dengan suhu udara rata-rata di kota Semarang pada umumnya, ada perbedaan. Selisih / perbedaan itu berkisar antara 3-4 derajat celcius lebih rendah dari keadaan cuaca rata-rata kota Semarang, sehingga pada saat itu ada batas-batas yang bisa dirasakan

oleh warga sekitar, ketika kita berada pada perpindahan ketinggian tertentu di Kawasan menuju kompleks perumahan ini, sehingga pada saat itu warga yang bermukim di daerah ini, merasa mendapatkan dukungan alam yang sangat seimbang, yang menjadikan kehidupan pada saat itu, tidak banyak menghadapi permasalahan terutama masalah polusi dan gangguan alam, karena alam sekitar pada saat itu sangat padu dengan standar kebutuhan hidup manusia.

Dengan demikian manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan, makhluk hidup yang lain, dan jasad perombak. Sebaliknya alam dengan tumbuhan makhluk hidup lainnya, dan jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin lebih kekal, karena manusialah yang melakukan kerusakan lingkungan ¹.

Bahwa keseimbangan ekosistem sangatlah diperlukan oleh kelangsungan kehidupan umat manusia . Tumbuh-tumbuhan dan zat perombak sangat diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan. Tumbuhan berfungsi sebagai pengasimilasi kadar Co₂ sedangkan jasad perombak diperlukan untuk terjadinya proses daur ulang materi-materi. Diperlukan banyak tumbuh-tumbuhan untuk menseimbangkan kehidupan manusia dan mendukung proses fotosintesis yang sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia.

Semakin berkembang proses fotosintesis, semakin berkembang pula proses pembentukan lapisan ozon diatas atmosfer, sehingga bumi terbungkus dari sinar ultra violet matahari yang dapat mematikan

¹ Jur Andi Hamzah, *Penegakan hukum lingkungan*, sinar grafika, cetakan pertama, 2005:2

makhluk hidup. Semakin tebal lapisan ozon, semakin berkembang pula kehidupan yang semakin kompleks ².

Untuk menjaga ekosistem di wilayah Ngaliyan, khususnya di kawasan Industri Candi Gatot Subroto pada saat sekarang ini, adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin yang disebabkan sejak tahun 1996, kawasan yang berada di tiga kelurahan ini, meliputi kawasan kelurahan Purwoyoso, kawasan kelurahan Babankerep, kawasan kelurahan Ngaliyan telah dilakukan perombakan oleh PT IPU atas nama sebuah kepentingan peningkatan ekonomi, dengan cara merusak atau setidaknya merubah lingkungan yang ijinnya “belum ada”. Ancaman yang sangat mungkin terjadi untuk kawasan ini dan sekitarnya adalah :

- * Risiko keseimbangan ekosistem terancam
- * Kemungkinan hilangnya cadangan sumber air bawah tanah
- * Rusaknya lingkungan alam sekitar akibat tidak adanya Zat Pengurai yang sangat dibutuhkan.
- * Terjadinya ancaman banjir akibat resapan daerah ini sudah rusak atau tidak berfungsi.

Dampak terjadinya gangguan lingkungan bisa lebih luas mampu menjangkau sebagian wilayah Kecamatan Ngaliyan dan kecamatan-kecamatan lain di kota Semarang, perubahan itu antara lain struktur alamiah dulu masih ada, dan bisa dinikmati publik, tetapi semenjak tahun 1995, tepatnya dengan ijin Walikota Semarang pada saat itu dengan nomor : 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995, Pemerintah Kota Semarang telah secara resmi memberikan ijin kepada PT. IPU untuk membuka lahan pembangunan kawasan

² Ibid.

Industri candi yang meliputi : Tiga wilayah Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan yaitu Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Ngaliyan, dan Kelurahan Babankerep luas wilayah yang diijinkan adalah sekitar 300 ha³.

Sejak tahun 1995, berdasar keputusan Walikota Semarang Nomor ; 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995, yang berarti bahwa persoalan otonomi daerah pada saat itu belum ada, karena undang-undang no.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah baru lahir, maka dapat dipastikan bahwa pada saat Keputusan Walikota Semarang Nomor ; 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995, adalah masa sebelum terjadinya reformasi atau suatu masa rezim orde baru masih berkuasa.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota sebagaimana tersebut diatas, mulailah PT. IPU dengan ijin atas nama pembukaan Kawasan Industri Candi mulai melakukan kegiatan antara lain, dengan melakukan penataan, pemotongan bukit, penebangan pohon perubahan struktur Geografis alamiah yang dimulai dari kelurahan Purwoyoso, berkembang ke Kelurahan Babankerep, dan Kelurahan Ngaliyan hingga tulisan ini dibuat perijinan proyek kawasan industri candi belum juga selesai.

Pembukaan Kawasan Industri Candi yang diikuti dengan pemotongan bukit, penebangan pohon, pembangunan pergudangan, yang dilengkapi dengan pemasangan atap-atap yang terbuat dari stainless, pemasangan instalasi, hingga berproduksinya industri tertentu yang tentu saja diikuti pula pembuatan sumur air bawah tanah atau sumur artesis bagi kepentingannya.

³ *Daftar dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) PT.IPU 2006:I:1.*

Pembangunan dan pembukaan Kawasan Industri yang saat ini telah sebagian beroperasi yang berupa pengubahan barang jasa yang dimanfaatkan oleh umat manusia, tentu saja dapat menimbulkan persoalan tersendiri yaitu persoalan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Hal demikian perlu ada pengaturan tersendiri yang kemudian disebut sebagai Hukum Tata Lingkungan ⁴.

Hukum tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat HTL., mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pasal 2;

Sumber daya air dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan, pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Penataan lingkungan adalah untuk mengatur penggunaan tanah dan ruang bagi penyelamatan ekosistem dan menghindarkan risiko lebih

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum tata lingkungan*, edisi kedelapan, cetakan ke delapan belas, Gajah Mada University Press, 2005:45

besar. Instruksi Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1998 tentang pemberian izin lokasi dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar pertama. Dalam memberikan izin lokasi untuk satu badan hukum atau kelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu luasnya tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan ⁵.

Berdasarkan Instruksi Menteri Agraria tersebut, apabila dihadapkan kepada persoalan Kawasan Industri Candi di Kecamatan Ngaliyan yang berkaitan dengan penguasaan saham mayoritas, ada persoalan yang harus dikaji lagi. Persoalan setelah perusahaan secara totalitas beroperasi, yang berarti pula bahwa perusahaan secara fisik berdiri lengkap dengan instalasinya, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekitar, perlindungan terhadap ekosistem di kawasan ini, pelestarian dan membangun kembali kebutuhan lingkungan hidup dan daya dukungnya, yang harus berhadapan dengan dampak-dampak kimiawi seperti terjadinya hujan asam, dan akibat-akibat lainnya seperti yang disampaikan oleh **Prof. Sukandarrumidi**, pakar tehnik lingkungan UGM. Yang berpendapat sebagai berikut :

Belum lagi adanya ancaman gangguan kesehatan masyarakat sekitar yang terkena dampak, berupa resiko ancaman hujan zat asam yang jelas-jelas membahayakan kesehatan masyarakat sekitar penyakit gatal-gatal, kiska, kandungan CO₂, H₂O SO₄, belum dilibatkannya pakar kesehatan, bagaimana dengan persoalan debu, akan berubah hal-hal yang menyangkut sampah harus ditangani oleh badan otorita

⁵ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Jambatan, cetakan keenam belas, 2004:224-225

limbah B 3 pestisida akan masuk dalam tanah Rkl/kpl agar dipedomani.⁶

Berdasarkan pendapat pakar tersebut diatas, ada ancaman yang serius bagi masyarakat sekitar Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Ngaliyan kota Semarang, yang berujud hujan zat asam, pemadatan tanah akibat zat asam, gangguan kesehatan lainnya yang perlu mendapat penjelasan dari pemrakasa Kawasan Industri Candi di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Dari risiko sebagaimana disampaikan oleh Sukandarumidi diatas, misalnya terjadinya ancaman hujan zat asam, yang menyebabkan terjadinya pemadatan tanah akibat polusi, tidak akan terjadi apabila kesadaran yang datang dari hatinurani para pihak yang terkait, untuk mentaati ketentuan yang ada, utamanya setiap orang yang oleh ketentuan hukum diberi kewenangan sebagai pengambil keputusan di bidang Administrasi Negara. Peran dari pengambil keputusan, dan dukungan masyarakat sekitar yang kuat, terhadap ketaatan terhadap norma-norma hukum yang ada di masyarakat sangat diperlukan, hal demikian sejalan dengan Gagasan Pusat Hukum Internasional (*International Law Centre*) fi New York sebagai berikut:

....Law and society are, therefore intimately interelated not only becouse the law is a society promote developed and just society, this concept of law emphazies not only knowledge of the law as aset of normative rules and the capasity to interpret it, but the acquisition of ather skills and consight, e.g ability to analyze and evaluate the polecy assumptions behind the law ; awarness that there are problem

⁶ disampaikan dalam forum Rapat Komisi Amdal Rkl/Rpl kota Semarang di ruang rapat pada tanggal 15 maret 2006, penulis menjadi peserta atas nama ketua tim lingkungan RW.VI kelurahan Ngaliyan Semarang, dalam acara tersebut.

of social development which may be effected by the law; appreciations of relationship between the legal system and of the social science as tools to enable informed development of law as an instrument of social change, concern justice, and thus since of justice.⁷

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial sudah tidak dapat lagi mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan-peraturan hukum formal. Bertolak dari persoalan ini, Satjipto Rahadjo pernah mengajukan sebuah pertanyaan menggelitik bahwa “apakah nilai-nilai hukum yang kita miliki cukup mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sedia kala.”⁸

2. Deskripsi lokasi penelitian.

Kawasan industri Candi Gatot Suroto, berada di wilayah hukum Kecamatan Ngaliyan kota Semarang, meliputi tiga wilayah kelurahan, yaitu kelurahan Babankerep, kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Ngaliyan Deskripsi lokasi penelitian Kawasan Industri candi Gatot Subroto berada di wilayah hukum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, meliputi 3 (tiga) wilayah Kelurahan Ngaliyan, Wilayah Kelurahan Baban Kerep, wilayah Kelurahan Purwoyoso.

Karakteristik ketiga wilayah kelurahan ini mempunyai kesamaan, kesamaannya adalah sama-sama bagian dari dataran tinggi, yang dulunya merupakan perkebunan jambu Batu, lahan pertanian dan peternakan sapi atau kandang sapi perah.

⁷ Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaahan sociologis, PT.Suryandaru Utama, 2005:7-8.

⁸ Ibid:8.

Suhu udara ketika itu, rata-rata berkisar dibawah 3 C (tiga derajat celcius) udara kota Semarang, tanaman yang berkembang pada saat itu adalah tanaman keras, tanaman sayur mayur dan buah-buahan lainnya, disamping semak-semak. Ekosistem pada saat itu relatif aman dan tidak terganggu oleh pola penguasaan manusia dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Di Kelurahan terdapat akses jalan kota Semarang yang menghubungkan jalur ke SMA 7 Semarang namun semenjak pelaksanaan proyek Kawasan ini, akses jalan kota sudah hilang, Sehingga secara hukum bahwa di Wilayah ini telah terjadi penghilangan akses Negara oleh kepentingan “Korporasi”

Disisi lain di wilayah Kelurahan Baban Kerep, Desa Pucung, dan beberapa wilayah yang terkena dampak proyek ini telah terjadi Disfungsi bangunan dan fasilitas fasilitas lain, termasuk disfungsi Ekosistem yang harus mendapat kajian secara seksama kajian perlu dilakukan antar dan inter Departemen yang terkait dengan proyek ini antara lain Lembaga Lingkungan Hidup, Lembaga Perijinan, lembaga Pengawasan pembangunan.

B. permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan pembangunan Kawasan Industri Candi, di jalan Gatot Subroto Semarang, oleh PT. IPU Semarang, sesuai Surat

Keputusan Walikota Semarang nomor : 593.8/1285, tanggal 31 Maret 1995 yang telah mengizinkan Kepada PT. IPU sebagai pemrakasa pembangunan Kawasan Industri Candi di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang, maka penelitian dalam kajian ini akan difokuskan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perijinannya sebelum dilakukan pembangunan kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Semarang, menurut hukum lingkungan.
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam proses pembangunan Kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Ngaliyan, Semarang .
3. Bagaimana dampak pembangunan kawasan Industri Candi Gatot Subroto terhadap usaha-usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan.
4. Bagaimana pembangunan kawasan Industri dari aspek hukum lingkungan.

C. Tujuan penelitian.

Penelitian Tesis dengan judul “Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian HukumLingkungan” ini adalah untuk mendapatkan masukan yang sebenarnya tentang pembangunan kawasan industri, ditinjau dari aspek hukum lingkungan, apakah aspek-aspek ketentuan hukum lingkungan, termasuk persoalan pelestarian lingkungan hidup, aspek perijinan, aspek menejemen

pengolahan limbah, aspek penguasaan tanah, sudah dilaksanakan menurut kaidah hukum lingkungan.

Aspek kesejahteraan manusia yang berada di sekitar kawasan Industri, serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup apakah sudah mendapatkan perhatian, sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan, termasuk hak-hak manusia dan ekosistem yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung, akibat dari pembangunan kawasan Industri Candi ini. Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan Kawasan Industri Candi, yang mulai dibangun sejak tahun 1995 atau terhitung sejak mulai berlakunya surat keputusan Walikota Semarang nomor :593.8/1285, tanggal 31 Maret 1995, adalah dalam rangka mendapatkan masukan tentang:

1. Bagaimana proses perizinannya sebelum dilakukan pembangunan kawasan Industri Candi Gatot Subroto menurut hukum lingkungan.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses
3. pembangunan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto.
4. Dampak pembangunan kawasan Industri Candi Gatot Subroto terhadap usaha-usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan .

D. Kontribusi hasil penelitian.

1. Manfaat praktis.

Penelitian Tesis dengan judul “Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan” (Studi kasus kawasan Industri Candi di Kota Semarang) ini diharapkan mampu memberikan masukan tentang pengelolaan, perlindungan dan usaha-usaha pelestarian ekosistem yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemberdayaan dan pemanfaatan alam sekitar kawasan industri, pencegahan terhadap kerusakan alam yang lebih serius yang dapat menyebabkan disfunksinya kawasan industri ini secara meluas menurut hukum lingkungan.

2. Manfaat Teoritik.

Penelitian tesis dengan judul “Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan” (studi kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang) ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang benar terhadap pemahaman hukum lingkungan berdasarkan dinamika dan persoalan-persoalan yang selalu berkembang di masyarakat. Apabila dihadapkan kepada persoalan perlindungan terhadap kawasan pemukiman, manajemen pengolahan limbah dan

pelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan yang diutamakan bagi ekosistem, dan pola penambangan yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup.

E. Kerangka Teori.

1. Pengertian pembangunan.

Kata pembangunan apabila diadopsi dari bahasa Inggris berasal dari kata Develop yang berarti grow larger ⁹.terjemahan bebasnya adalah membangun dengan skala besar-besaran, perluasan, ekspansi, sedangkan menurut kamus ekonomi pembangunan apabila diadopsi dari kata Building cycle atau siklus bangunan yang diartikan siklus mengenai aktifitas maksimum dan minimum telah ditetapkan untuk macam-macam industri, terpisah dari siklus konjungtur umum, salah satu siklus yang diverifikasi dengan tegas adalah siklus industri bangunan yang berjangka waktu 19 sampai dengan 20 tahun pekerjaan konstruksi ¹⁰. Sedangkan dalam bahasa Indonesia membangun berarti mendirikan bangunan ¹¹.

Dari beberapa rumusan tentang pembangunan menurut kamus tersebut diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan sederhana yaitu merubah dari satu bentuk

⁹ As Hornby, *Oxford advance dictionary of current english* ,, Twenty-fifth impressions 1989 :238

¹⁰ Winardi, *kamus ekonomi*, CV, Mandar maju cetakan XVI:1998:53.

¹¹ Amran YS Chaniago, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, pustaka setia Bandung, cetakan V, Mei 2002:54.

ke bentuk yang lain dengan alasan perekonomian. Namun demikian pembangunan dalam kajian ini adalah, pembangunan yang berawal dari adanya proses perijinan, perencanaan, tahap persiapan, tahap pembangunan fisik sampai dengan tahap produksi dan kemungkinan masa berakhirnya rangkaian kegiatan tersebut.

Pembangunan erat sekali dengan kesiapan setiap manusia untuk mampu memikul tanggung jawab secara benar, **Satjipto Rahardjo** berpendapat : agar kita perlu waspada hal-hal negatif yang dapat muncul dari hukum, salah satu kemungkinannya adalah bergesernya hukum menjadi “permainan” dan “Bisnis” yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan (dispensing Justice) ¹².

Rangkaian berakhirnya proses produksi menurut kajian ilmu ekonomi hanya efektif untuk jangka waktu 19 (sembilan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, yang berarti bahwa untuk kawasan Industri Candi Gatot Subroto akan berakhir pada tahun 2034, maka pada tahun itu, kawasan tersebut sudah akan berakhir, dengan berakhirnya masa waktu tersebut, tahun itu nilai bangunan sudah kembali ke titik zero. Dengan titik zero bangunan tersebut berarti

¹² Satjipto Rahardjo „*Sisi – sisi lain dari hukum di Indonesia*, Penerbit buku Kompas, cetakan kedua, Januari 2006:51.

akan ada dua kemungkinan permasalahan, yaitu diperbaiki dan atau diperbaharui, atau ditinggal sama sekali yang berarti kawasan akan kembali ke tanah yang dikuasai oleh negara dengan konsekwensi akan menimbulkan dampak lingkungan yang serius.

Pembangunan yang dimaksud disini, adalah pembangunan dalam arti menurut kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan”

penjelasan pasal 1 cukup jelas.

Substansi penting yang terkandung pada pasal 1 antara lain adanya perpaduan lingkungan hidup, arti padu disini adalah setidaknya-tidaknya adanya nilai perbedaan atau kesenjangan antara kegiatan yang berorientasi ekonomi dengan kegiatan yang berorientasi ekosistem pada daerah tertentu adalah zero, atau nilai seimbang. Disatu sisi ekonomi juga menjadi target dapat tercapai, sedangkan disisi lain penyelamatan lingkungan juga

harus dilakukan demi penyelamatan lingkungan dan generasi yang akan datang.

Penyelamatan lingkungan menurut undang-undang lingkungan hidup antara lain “ lingkungan hidup adalah kesatuan dengan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ¹³.

Penyelamatan lingkungan menurut ide dari undang-undang ini antara lain, adanya usaha memelihara, mempertahankan kondisi kehidupan manusia dari sisi kebutuhan jasmani yang berupa ketersediaan dan dijaganya sumber-sumber alam yang ada, termasuk juga menjaga mempertahankan dan bahkan bila perlu harus ada upaya mengembalikan dalam pengertian memperbaiki sumber alam yang berupa keserasian, keseimbangan akan kebutuhan jasmani dan rokhani yang sebelumnya telah ada dan dinikmati, sedangkan kebutuhan makhluk-makhluk hidup lainnya juga harus dijaga dan dipelihara agar keseimbangan ekosistem dapat terwujud sesuai harapan.

2. Pengertian kawasan Industri.

¹³ Jur Andi Hamzah, *Penegakkan hukum lingkungan*, sinar grafika, cetakan pertama September 2005:1

Kata kawasan adalah kata yang diadopsi dari bahasa lain, menurut bahasa Inggris kata kawasan lebih tepat dipinjam dari kata “Area” yang berarti “Scope or range of activity” yang terjemahan bebasnya adalah “daerah yang dipakai untuk suatu kegiatan”¹⁴. Sedangkan kawasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “Daerah” sedangkan daerah berarti wilayah¹⁵. Dengan demikian kawasan menurut pemahaman umum adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi suatu kepentingan tertentu.

Kawasan industri adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi kemanfaatan manusia, tetapi di sisi lain, adalah adanya persoalan mulai adanya kegiatan yang telah membuat keseimbangan ekosistemnya menjadi terganggu yang disebabkan oleh penebangan pohon, dan pemotongan-pemotongan wilayah dataran tinggi.

Kawasan industri dalam kajian permasalahan ini adalah Kawasan Industri Candi di wilayah hukum kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Kawasan ini sebagai pemrakarsa adalah PT.IPU Semarang. Kawasan ini berdekatan dengan kawasan pemukiman yang lebih dahulu ada, yaitu Kawasan perumahan Wismasari, kawasan perumahan Pokok Pondasi, kawasan perumahan Karonsih Selatan,

¹⁴ AS Hornby, *oxford advance dictionary of current english*, Twenty-fifth Impression 1989:40

¹⁵ Amran YS Chaniago, *kamus bahasa Indonesia*, Pustaka setia, cetakan ke V, Mei 2002:135

kawasan perumahan Karonsih Timur, kawasan perumahan Panembahan Senopati, kawasan perumahan Karonsih Utara, kawasan perkampungan Babankerep, kawasan perkampungan Pucung, dan kawasan perkampungan Desel, semuanya berada di wilayah hukum kecamatan Ngaliyan kota Semarang.

Masing-masing perusahaan antara perusahaan satu dengan yang lainnya di kawasan ini hanya dibatasi tembok pembatas dan jalan sebagai sarana transportasi yang tidak lagi disertai dengan space bagi ekologi lainnya.

Dari uraian tersebut, penulis mengharapkan adanya **:Pertama:** Menciptakan pemahaman yang benar tentang pengertian kawasan, yaitu kawasan industri sebagaimana menjadi fokus kajian ini, yang ada kaitannya dengan persoalan yang diatur oleh undang-undang penataan lingkungan hidup, sehingga akibat negatif terhadap ekosistem yang seharusnya ada dikawasan ini dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Kedua; Adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemrakarsa dalam hal ini PT.IPU Semarang, sebagai pemilik ijin kawasan untuk tetap mempertahankan, memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, utamanya menjaga

lingkungan agar resiko terhadap masyarakat terkena dampak dapat diminimalisir.

Ketiga: Dengan telah beroprasinya sebagian lokasi perindustrian / pergudangan yang menggunakan bahan-bahan atau material-material yang menyebabkan meningkatnya pemanasan di daerah ini, dan daerah-daerah disekitar kawasan ini, dapat diupayakan penanggulangannya dan / atau upaya memperbaiki (reservasi) kembali, sehingga resiko-resiko negatif dapat diantisipasi sebaik-baiknya.

Keempat: Diharapkan ada upaya-upaya penataan kawasan yang telah dibangun, maupun yang akan dibangun, dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan kawasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tata lingkungan yang sehat, penciptaan embung-embung air, embung-embung penampung limbah resapan secara terpusat, dengan tujuan untuk mengolah limbah B3 agar dapat dinetralisir dan aman bagi lingkungan sekitar.

3. Pengertian hukum lingkungan.

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Enviromental law*, di Belanda disebut dengan *Millieu recht*, di Perancis disebut dengan *droit*

de environment, malaysia dengan bahasa melayu memberi nama *Hukum alam sekitar*¹⁶.

Menurut **Jur Andi Hamzah** hukum lingkungan adalah, masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti pertambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial¹⁷.

Hukum lingkungan erat sekali hubungannya dengan persoalan antara hak dan kewajiban, hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah, dan hak-hak masyarakat sekitar pemegang hak atas tanah. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, yang berbunyi sebagai berikut:

“hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman”

Hukum lingkungan, menurut **Moenadjad** dibedakan antara hukum modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum

¹⁶ Jur Andi Hamzah, *penegakan hukum lingkungan*, sinar grafika, cetakan pertama, September 2005:7

¹⁷ Ibid: 2

lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan atau use oriented law.

Hukum lingkungan modern menetapkan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestarian agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang¹⁸.

Kajian / penelitian tentang hukum lingkungan ini dimaksudkan untuk :

Pertama: untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum lingkungan, khususnya norma-norma yang mengatur kepada lingkungan yang secara khusus mempersoalkan pengaturan yang idial antara perlindungan kepada penghuni pemukiman yang berupa perkampungan dan perumahan terhadap pengaturan jarak dan posisi yang idial agar partisipasi, peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga atau badan-badan yang berwenang menjadi optimal, utamanya masyarakat sekitar kawasan, kepentingan-kepentingannya wilayah pemukiman yang sehat dapat terpenuhi.

Kedua: untuk mendapatkan pemahaman terhadap penggunaan material-material bahan bangunan yang

¹⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *hukum tata lingkungan*, cetakan kedelapan belas, Gajahmada University Press 2005:41

dipergunakan oleh pelaku usaha atau badan-badan lain yang berada dikawasan ini, utamanya kawasan atau setiap bangunan perusahaan yang menggunakan material-material atau bahan-bahan yang tidak tepat atau tidak ramah lingkungan yang dapat memicu terjadinya peningkatan suhu udara sekitar yang dapat merugikan daerah terkena dampak, misalnya penggunaan material stainless yang difungsikan sebagai atap penutup bangunan perusahaan sebagai pengganti asbes yang pada umumnya dipergunakan sebagai pengganti genteng yang ada dikawasan ini.

Ketiga: untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap aturan dan pelaksanaan aturan penggunaan / pembuatan sumur artesis yang ada dikawasan ini terhadap adanya jumlah bangunan dikawasan ini, yang memanfaatkan air bawah tanah / membuat sumur artesis untuk kepentingan oprasionalnya perusahaan, yang kedalamannya mencapai rata-rata 80 meter, dengan jarak antara sumur artesis satu dengan sumur artesis yang lainnya hanya sebatas tembok bangunan yang ada dikawasan ini, mengakibatkan terancamnya sumur bawah tanah (sumur artesis) milik warga yang rata-rata satu RW dihuni antara 300 KK sampai dengan 450 KK hanya memiliki 3 sumur artesis yang dimanfaatkan secara reguler untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari bagi kepentingan warga.

Keempat: untuk mendapatkan pemahaman tentang kajian-kajian penyelamatan lingkungan akibat adanya limbah industri, polusi debu, adanya resiko hujan zat asam, yang dapat mengancam terjadinya efek pengerasan terhadap tanah, yang berarti bahwa tanah disekitar kawasan akan tidak berfungsi dengan baik, pengelolaan limbah industri secara terpusat yang dikelola oleh badan otorita tersendiri yang juga berfungsi sekaligus sebagai badan pengendali pencemaran lingkungan bagi kepentingan penyelamatan lingkungan hidup untuk kepentingan keseimbangan ekosistem alam sekitarnya.

4. Hukum sebagai alat kontrol sosial.

Kata hukum adalah kata adopsi yang dalam bahasa Belandanya berasal dari kata *Recht* dalam bahasa Indonesiannya secara objektif berarti undang-undang atau hukum, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya diadopsi dari kata *Law* secara obyektif berarti undang-undang atau hukum¹⁹, hukum yang berisi norma-norma yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mengendalikan masyarakat. Dalam mencapai tujuannya, hukum dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan pengusaha, hak-hak masyarakat dan

¹⁹ Yan Pramadya Puspa, *kamus hukum*, aneka ilmu Semarang, edisi lengkap 1977:707.

kewajiban-kewajiban pengusaha yang harus ditunaikan dalam menjalankan usahanya.

Hak-hak dan kepentingan masyarakat yang terkait dengan penelitian Tesis ini adalah, masalah yang ada kaitannya dengan dampak pembangunan kawasan industri candi menurut kajian hukum Lingkungan, tentang ada atau tidaknya pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pengusaha, tentu ada perbedaan masing-masing, kepentingan masyarakat adalah untuk terlindungi hak-haknya, sedangkan kepentingan pengusaha adalah tercapainya tujuan untuk mendapatkan keuntungan material yang semaksimal mungkin, dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya , namun demikian kedua kepentingan yang saling berbeda tersebut tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada aturan hukum yang jelas dan mengikat terhadap kedua subjek hukum tersebut, yaitu antara kepentingan masyarakat terkena dampak pembangunan, dengan pengusaha (PT,IPU) harus dicarikan titik temu secara seimbang, dan harus efektif. **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya ilmu hukum berpendapat sebagai berikut :

“selanjutnya, bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur

masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metoda sosiologis, berbeda dari kedua penglihatan tersebut dimuka, maka paham yang ketiga ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metoda ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum²⁰,

Dari pendapat **Satjipto Rahardjo** tersebut, apabila dihadapkan pada persoalan dampak pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Penelitian Tesis ini, adalah dikehendakinya keseimbangan antara kepentingan masyarakat terkena dampak disatu pihak, dan kepentingan pengusaha yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan kewenangan pemerintah dipihak lain. Namun untuk mencapai tatanan keseimbangan antara kepentingan masyarakat terkena dampak, dan kepentingan pengusaha, serta peran pemerintah untuk mengontrol keseimbangan, dan tidak saling merugikan dalam pengertian yang seharusnya, menjadi prasarat penting dalam kajian ini, pengawasan yang ketat dan transparan harus dilakukan agar tidak terjadi Kriminalisasi dalam pembangunan kawasan ini.

Keterbukaan harus dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang langsung terkena dampak, dan harus dipertimangkan adanya legalisasi penggunaan media sebagai sarana sosialisasi ini.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, cetakan ke V, 2000:6

sosialisasi langsung menjadi lebih efektif apabila dibandingkan dengan sosialisasi melalui media, karena komunikasi timbal balik akan lebih mudah dilakukan.

Konggres PBB ke VIII tahun 1990 menyatakan: *“the trial proces should be consonant with the cultural realities and social values of society in order to make it understood and to permit it to operate effectively within the community serve, observerance of human right, equality, fearness, and consintency should be ensured at all stages of the procees”* (hal 5). Berbagai *“statetmen”* konggres PBB diatas, pada intinya menyatakan:

- * Perlu adanya harmonisasi / sinkronisasi / konsistensi antara pembangunan / pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio filosofic dan sosiokultural.
- * Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “descrepancy” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (a Contributing factor to the increase of crime).
- * Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
- * Ketiadaan konsistensy antara Undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen.

- * Semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat semakin besar ketidak percayaan akan keefektifan sistem hukum.²¹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** tersebut, apabila dikaitkan dengan kegiatan pembangunan Kawasan Industri Candi di Kecamatan Ngaliyan, yang berbatasan langsung dengan Komplek perumahan Karonsih Selatan, dan perumahan Pokok Pondasi, kawasan desa Desel dan kawasan pemukiman desa Pucung. Tidak adanya nilai-nilai kesimbangan disatu sisi, sebagai pengusaha hanya mengejar target tujuan yang hendak dicapai, yaitu nilai financial dan keuntungan kelompok pengusaha semata, sedangkan pemukiman yang berbatasan dengan kawasan ini, selalu berada pada pihak yang dirugikan, maka persoalan ketaatan terhadap hukum tidak akan terjadi. Disamping itu belum adanya aturan yang jelas terhadap kawasan industri, yang berdekatan dengan kawasan pemukiman yang rentan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih kompleks terhadap fungsi perumahan itu sendiri, antara lain :

- * Pencemaran udara
- * Pencemaran air
- * Rusaknya ekosistem yang sangat dibutuhkan

²¹ Barda Nawawi Arief, *kapita selekta hukum pidana*, makalah seminar “KRIMINALISASI ATAS KEBEBASAN PRIBADI DAN PORNOGRAFI/PORNOAKSI, diselenggarakan atas kerja sama FH Undip dengan Komnas HAM di hotel Graha Santika Semarang pada tanggal 20 Desember 2005.

- * Terjadinya kerusakan terhadap kesuburan tanah sekitar.
- * Adanya ancaman hujan zat asam akibat akumulasi polusi udara.

Pasal 4 huruf (b) Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang Pemukiman “ penataan perumahan dan pemukiman bertujuan untuk :

Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1992:

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur²².

Bahwa pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang tentang perumahan dan pemukiman telah mensyaratkan tentang kelayakan kawasan perumahan dan pemukiman, yaitu adanya prasarat lingkungan yang sehat, serasi, dan teratur. Lingkungan yang sehat berarti minimnya gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat antara lain adanya:

- * Suhu udara yang cukup baik dikarenakan adanya struktur penataan lingkungan yang baik dan terjaga.

²² Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang Undang-undang perumahan dan pemukiman.

- * Adanya keseimbangan standarisasi kebutuhan kehidupan yang meliputi tersedianya sumber alam yang cukup bagi standar kebutuhan kehidupan ekosistem yang baik dan sehat. Keadaan itu tidak akan dapat terpenuhi apabila tidak adanya komponen pendukung peraturan yang memadai.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dalam masyarakat secara lebih seksama. Hukum tidak hanya mengurus manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, melainkan juga menjangkau bayi yang masih dalam kandungan ibunya, sesuai dengan maksim nasciturus pro jamnato habitur. Perhatian dan perlindungan terhadap bayi yang masih dalam kandungan itu, terletak dalam fiksi dibidang hukum tentang harta kekayaan yang memikirkan tentang kemungkinan bayi tersebut nantinya untuk mendapatkan kekayaan atau untuk diperhitungkan sebagai kehidupan yang ingin dilindungi oleh hukum. Persyaratan yang diajukan oleh hukum adalah bahwa bayi tersebut hidup pada waktu dilahirkan dari kandungan ibunya²³.

Bahwa perlindungan terhadap keseimbangan lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo diatas, mengisyaratkan bahwa perlindungan melalui penjagaan keseimbangan lingkungan bagi kehidupan manusia dan ekosistemnya betapa harus dilakukan sepanjang kehidupan manusia itu ada, melalui ketersediaan

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* PT.Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan ke V, 2000:69.

sumber daya alam yang memadai. Selanjutnya penjagaan keseimbangan ekosistem dalam ranah lingkungan hidup perlu adanya kebijakan tentang bagaimana bentuk-bentuk pelestarian lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya antara lain :

“sebagaimana kelanjutan dari perkembangan yang demikian itu setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui bentuk perundang-undangan, tanpa prosedur yang demikian itu kesahaan dari tindakan pemerintah dan

negarapun dipertanyakan pertimbangan yang demikian menyuburkan pembicaraan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi apabila perundang-undangan dipakai sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Dibicarakan kemampuan hukum untuk dipakai alat melakukan social engineering, batas-batas kemampuan hukum, dan yang sebangsanya. Pada bagian lain dari kitab ini masalah tersebut akan dibicarakan lebih lanjut²⁴.

Bahwa menurut **Satjipto Rahardjo** yang menekankan setiap tindakan yang legal, adalah setiap tindakan yang mendasari pada adanya aturan-aturan hukum yang jelas, sebagaimana dikemukakannya bahwa tindakan yang tidak berdasar kepada ketentuan hukum, maka tindakan itu adalah tindakan yang tidak sah.

²⁴ Ibid:91.

Dalam pembangunan Kawasan Industri Candi sebagaimana dalam Kajian Penelitian Tesis ini, adalah adanya ketertiban ketentuan administratif terhadap proses berdirinya kawasan industri ini. ketertiban itu antara lain termasuk proses perijinan yang menjadi syarat berdirinya kawasan ini.

5. Hukum lingkungan sebagai sarana kebijakan penataan lingkungan.

Hukum lingkungan atau juga dengan hukum tata lingkungan, adalah hukum yang mengatur tentang tata ruang dan peruntukan ruang bagi ekosistem yang diharapkan mampu mendukung berkesinambungnya ekosistem yang saling membutuhkan dalam rangka menjaga keajegan keseimbangan antar ekosistem, menjaga keserasian kehidupan, tata lingkungan didalamnya juga mengatur tentang tata guna ruang yang bertujuan untuk tetap mengendalikan kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

Tata ruang yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan pertama kali mulai dibahas melalui badan ekonomi dan badan sosial Perserikatan Bangsa-bangsa ketika diadakan peninjauan terhadap hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia ke I negara-negara yang pertama kali sebagai pengusung ide berasal dari wakil Swedia pembicaraan masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajagi

kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi Internasional mengenai lingkungan hidup manusia ²⁵.

Dari Resolusi PBB Nomor: 2581, tanggal 15 Desember 1969 atas usul Swedia tersebut, yang menjadi perhatian besar adalah menyelamatkan ekosistem termasuk Umat Manusia, agar masalah pemukiman manusia mendapat perhatian tersendiri. Pemukiman juga didalamnya termasuk pengaturan tentang jarak idial antara kawasan pemukiman dan perumahan terhadap kawasan Industrialisasi, apakah juga sudah menjadi perhatian dalam permasalahan ini.

Pemanfaatan kawasan Industri Candi ini tidak akan terlepas dari penataan pemanfaatan ruang, yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan kehidupan umat manusia juga akan tidal terlepas dari baik buruknya kuwalitas ruang yang dimanfaatkan. Wujud pola pemanfaatan diantaranya meliputi pola lokasi. Sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.²⁶

Menurut **Koesnadi Hardjosoemantri**, pemanfaatan ruang setidak-tidaknya harus diatur secara jelas, dan terperinci dengan memperhitungkan faktor-faktor penyelamatan ruang itu sendiri.

F. Manfaat hasil penelitian

1. Manfaat Praktis.

²⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum tata lingkungan*, Gajah Mada University, edisi kedelapan, cetakan kedelapan belas, 2005:6

²⁶ Ibid:43.

Hasil penelitian penulisan Tesis dengan judul “Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan” (studi kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang) ini, diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung tentang arti pentingnya peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup, melalui upaya penegakan hukum lingkungan, serta perlunya masyarakat terkena dampak langsung maupun tidak langsung memahami ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal ihwal pembangunan kawasan terutama yang berkaitan dengan penguasaan tanah yang diberikan kepada setiap pemrakarsa, serta batas-batas ketentuan hukumnya. masyarakat terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung, itu diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan ini dengan cara memberikan kewenangan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan ketentuan hukum yang berlaku, agar pelaksanaan pembangunan kawasan ini masyarakat tidak selalu dalam posisi yang harus dirugikan oleh kepentingan korporasi yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini oleh institusi yang terlibat langsung, maupun oleh pemrakarsa itu sendiri (PT IPU). Di samping itu dengan penulisan Tesis ini

diharapkan mampu menjadi pedoman praktis bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan kawasan ini agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis.

Pembangunan Kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT.IPU, telah dimulai sejak tahun 1996, sampai dengan saat selesainya penulisan Tesis ini masih berlangsung, pembangunan pada kurun waktu dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003, setidaknya-tidaknya baru diketahui oleh Pemerintah Kota Semarang, bahwa Pembangunan itu telah menyalahi Site Plan yang telah dibuat, serta telah menyimpang dari Kajian Analisis Dampak Lingkungan yang dibuat dan disepakati oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pembangunan kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU, berdasarkan Leftlet yang dibuat oleh Pemrakarsayang diberi judul “Candi Industrial Estate” secara jelas mencantumkan, bahwa PT IPU akan melakukan ekspansi kawasan ini sampai mencapai angka 600 ha dari 300 ha yang diijinkan oleh Pemerintah, berdasarkan ketentuan dari Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 18 tahun 1989, dijelaskan bahwa satu badan hukum hanya diijinkan untuk menguasai tanah untuk kawasan Industri

seluas 400 ha. Dengan arogansi yang demikian menjadikan masalah tersendiri ketika ketentuan hukum itu tidak lagi mampu diaplikasikan dilapangan oleh aparat yang memberi ijin (Pemerintah Kota Semarang), hal demikian perlu dicarikan solusinya.

Pada tahun 2004, ketika PT IPU melakukan Ekspansi kawasan warga RW VI, RW VII, dan beberapa warga kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kawasan ini merasakan akibat negatif yang berupa Debu, suhu udara meningkat drastis, tanah longsor dan retak- sarana sosial rusak, kebisingan meningkat, debit Air Bawah Tanah terus mengalami penurunan, banjir melanda kawasan bawah antara lain di kawasan Bandara Akhmad Yani Semarang, tambak mengalami kerugian sangat besar akibat banjir yang melanda kawasan petambakan.

Pembangunan yang telah berlangsung lama di atas tanah negara yang luas wilayahnya “tidak terkontrol” oleh pemerintah, serta dampak-dampak lain, dengan dilakukan penelitian dan penulisan Tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada publik, terutama kepada Pemerhati masalah lingkungan ini serta masyarakat terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dalam bidang :

1. Bagaimana seharusnya melakukan pengawasan terhadap Kawasan ini, agar pemrakarsa tidak bebas melakukan ekspansi tanpa kendali.

2. Bagaimana keterlibatan masyarakat umum berusaha tetap menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup yang sehat itu tetap terjaga.
3. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika pelanggaran yang dilakukan oleh “kelompok orang yang mempunyai kapital kuat” tidak taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

G. Metoda penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metoda pendekatan yuridis sosiologis, karena hukum utamanya hukum lingkungan bukan saja sebagai seperangkat kaidah norma yang bersifat normatif belaka, tetapi hukum, dalam hal ini hukum lingkungan hidup menitik beratkan pada pendekatan-pendekatan kepentingan secara berimbang.

Metoda pendekatan sosiologis ini, dilakukan melalui upaya-upaya pengumpulan informasi yang riil, memposisikan hukum sebagai kaidah-kaidah yang senyatanya, utamanya yang berkaitan dengan pola perilaku sosial yang dinamis yang dapat memberikan kontribusi yang berkeadilan dengan sifat-sifat sosial kemasyarakatan.

Masyarakat setempat utamanya yang terkena dampak dari pembangunan kawasan industri candi ini, yang pada akhirnya diharapkan dapat ditemukan rumusan-rumusan norma hukum yang idial (*Ius constituentum*) bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak.

Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda penelitian kualitatif, dengan harapan akan didapatkan makna, pemahaman, dan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi upaya-upaya penyelamatan ekosistem sesaat dan pada saatnya yang akan datang, sehingga didapati kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, khususnya di wilayah-wilayah pemukiman yang langsung maupun tidak langsung terkena dampak akibat pembangunan kawasan ini, atau umumnya di wilayah kota Semarang.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mendasari pendapat **Von Savigny** yang, hukum itu berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah-kaedah yang cocok (*begriftsjuris prudenz*)²⁷.

Disamping itu metoda penelitian juga menggunakan metoda *Argumenta contrario*, yang artinya ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang.

Bagaimanakah menemukan hukumnya bagi peristiwa yang tidak diatur secara khusus itu? cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, peristiwa diluarnya berlaku

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang penemuan hukum* PT.Citra Aditya Bakti, cetakan ke I, 1993:11

kebalikannya, ini merupakan metoda **argumentum a contrario**²⁸.

1. Lokasi penelitian :

- a. Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Ngaliyan, dan di wilayah pemukiman masyarakat sekitar yang terkena dampak.
- b. Di kantor Bapedalda Tk I Jawa Tengah, Kantor Bapedalda Kota Semarang, Dinas perijinan kota Semarang, Dinas Pertambangan Tk.I Jawa Tengah, Dinas Pertambangan Kota Semarang, Dinas Kehutanan TK I Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Tk I Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Badan Meteorologi dan Geofisika Ahmad Yani Semarang, Kantor Konsultan C.V Wida Semarang,

2. Penentuan Sumber Informasi.

- a. Sumber informasi dari masyarakat terkena dampak langsung maupun tidak langsung dengan kawasan industri ini.
- b. Dari para pekerja dikawasan ini yang dianggap menguasai persoalan ini.

²⁸ Ibid : 27

- c. Tokoh masyarakat yang lokasinya terkena dampak.
- d. Aparatur pemerintah dari tingkat RT sampai dengan tingkat Propinsi Jawa Tengah, serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan persoalan ini.

3. Penentuan sumber data..

Sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yang diharapkan dari masyarakat dan aparatur Pemerintah terkena dampak langsung maupun tidak langsung dengan persoalan ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Tehnik pengumpulan data.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a.. Pengamatan atau observasi langsung.
- b. Wawancara (interview)

- c. Penyebaran angket ke sasaran.
- d. Study dokumentasi.

5. Teknik analisa data dan validitas data.

- a. Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian dianalisa berdasarkan analisa kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui keakuratan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Teknik perbandingan data untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat tentang data yang diteliti.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah suatu kajian yang berusaha mempelajari secara mendalam tentang hubungan antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya, hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk atau zat / benda-benda mati serta pemberlakuannya. Masalah lingkungan semakin populer ketika alam sudah mengalami pergeseran nilai dan fungsi serta akibatnya, misalnya terjadinya peningkatan suhu udara (heating) akibat pembangunan rumah kaca, terjadinya polusi udara akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, terjadinya penurunan kandungan oksigen akibat penebangan hutan, dan pembangunan fisik yang tidak terkendali, serta menurunnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik, terutama di daerah negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia.

Berdasarkan keadaan itu, kemudian permasalahan lingkungan hidup mengalami perkembangan. Di Indonesia masalah lingkungan hidup mulai berkembang pada tahun 1976, melalui inventarisasi hukum lingkungan klasik Indonesia yang menghasilkan :

- a. 22 UU dan Ordonansi
- b. 38 PP dan Verordening
- c. 5 Keppres (keputusan Presiden)
- d. 2 Inpres (instruksi Presiden)
- e. 45 Keputusan / peraturan menteri)
- f. 4 Keputusan Dirjen dan
- g. Sejumlah peraturan daerah (tingkat I dan II)²⁹.

lingkungan hidup itu merupakan “harta pusaka” bagi seluruh dan segenap insani sepanjang zaman, yang harus senantiasa dijaga kelestariaanya secara turun temurun, memang tiap insani boleh dan dapat memanfaatkannya, tetapi siapapun tidak diwenangkan untuk merusak atau menanggung akibatnya, sebaliknya setiap pihak justru memikul kewajiban untuk selalu memeliharanya dengan baik dan menjaganya secara tertib dengan menghindarkan segala ancaman atau gangguan, yang mungkin dapat menyimpannya.³⁰

Mengelola lingkungan hidup, berarti mengelola lingkungan alam, yang berarti mengelola lingkungan alam sekitar, agar mampu menunjang kehidupan dan kesejahteraan ekologi. Perlindungan terhadap Ekologi, menjadi bagian

²⁹ Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan buku II Nasional*, Bina Cipta cetakan ke II, 1985:37.

³⁰ Ibid : 226.

penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, saling menunjang, saling membutuhkan, dan saling menjaga ekologi dengan caranya masing-masing.

A.A Nafis, mengemukakan, dalam hal ini alam bagi masyarakatnya adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir, tempat mati, tempat hidup dan tempat berkembang, akan tetapi juga mempunyai makna filosofis.³¹ Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting bagi ekologi untuk melangsungkan kehidupannya, karena lingkungan hidup secara langsung telah menyediakan segala kebutuhan bagi ekologi. Pengelolaan lingkungan hidup yang juga berarti menjaga dari kerusakan seharusnya menjadi tanggung jawab umat manusia secara sungguh-sungguh, termasuk di Indonesia.

Tahun 1972 berdasarkan konferensi Stockholm, pemerintah Indonesia telah membentuk Panitia Interdepartemental yang disebut Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Presiden Nomor 16/1972, dengan tujuan untuk menentukan kebijakan pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan Nasional atas implikasi sosial, ekonomis, ekologis dan politis.³²

Menurut **Moenadjat Danusaputro**, menyatakan bahwa setiap insan mempunyai hak yang sama terhadap manfaat lingkungan hidup yang sehat, bagi kelangsungannya, dan

³¹ Zar'aini Djamal Irawan, *prinsip-prinsip ekologi dan organisasi ekosistem*, bumi aksara cetakan pertama 2003 : 4

³² Kosnadi Hardjo Sumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, edisi ke delapan, cetakan ke delapan belas 2005:50.

kesejahteraan yang diperoleh dari sumber daya alam sekitarnya. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan dari kerusakan yang dilakukan oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar, dan mengorbankan biaya yang sedikit mungkin yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

Masih menurut **Moenadjat Danusapoetro**, dalam kesimpulannya dinyatakan sebagai berikut:

- a. lingkungan (hidup) adalah semua benda, daya (kehidupan dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang dimana manusia berada, dan yang mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan manusia serta jazad-jazad hidup lainnya.
- b. Dalam pengertian yang demikian itu, maka lingkungan (hidup) dalam arti yang luas dan sewajarnya meliputi seluruh alam semesta dalam pengertiannya secara sempit (dapat diartikan dunia (planet Bumi)).
- c. Sebagai unsur kelengkapan fisik (jasmani) lingkungan (hidup) dapat dibedakan :
 - (i) unsur kelengkapan fisik (jasmani) yang mewujudkan lingkungan fisik (jasmani) dan
 - (ii) unsur kelengkapan buatan (manusia) yang mewujudkan lingkungan (manusia) yang mewujudkan :lingkungan buatan (:sosial budaya)
- d. lingkungan (hidup) berisi : sumber-sumber daya lingkungan (hidup) yang terdiri atas:

- (i) Sumber daya insani (manusia)
- (ii) Sumber daya hewani (fauna)
- (iii) Sumber daya nabati (flora)
- (iv) Sumber daya bendawi
- (v) sumber daya energi
- (vi) sumber daya ruang
- (vii) sumber daya waktu, dan
- (viii) sumber daya sifat kemencaragaman ³³.

Lingkungan hidup menurut Moenadjat Danoesaputro, terdiri dari daya dukung yang dibutuhkan oleh umat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, sangat tergantung pula kepada keadaan alam sekitar baik makhluk yang hidup maupun makhluk yang mati, serta ruang yang mampu memberi daya dukung kepada kehidupan ekosistem yang baik.

Daya dukung lingkungan hidup yang baik yang saling menunjang dan saling ketergantungan perlu ada juga campur tangan manusia yang mampu menjaga, dan melestarikan alam sekitar. Terpelihara dengan baik yang bersifat timbal balik, penataan ruang juga harus bertujuan mendapatkan manfaat ekologi yang benar yang mampu memberikan daya dukung bagi kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya manusia harus mampu juga memberi perlindungan terhadap ekosistem lainnya. Kesejahteraan juga harus diartikan

³³ Ibid :29-30

sebagai keadaan alam lingkungan yang saling mendukung dan saling melindungi kepentingan-kepentingan masing-masing antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya termasuk perlindungan terhadap zat-zat mati sekalipun dengan cara memberikan ruang yang cukup bagi perkembangannya.

Perlindungan yang dilakukan oleh umat manusia terhadap ekosistem lainnya antara lain :

- Meminimalkan pengubahan dan / atau perusakan susunan geologis yang ada.
- memaksimalkan fungsi penghijauan yang mampu memberikan daya dukun terhadap efek peningkatan suhu udara (heating).
- memperankan tata ruang yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan financial jangka pendek semata, yang kemudian membawa efek kerusakan dan / atau kerugian yang tidak dapat diperbaharuai lagi.

Pengubahan dan / atau perusakan lingkungan yang di dalamnya termasuk perusakan Geologi, dapat menimbulkan dampak tidak seimbangnya ekosistem.

Menurut **Otto Sumarwoto**, daya dukung terlanjutkan ditentukan oleh dua faktor, baik faktor Geofisik maupun sosial budaya-ekonomi. Kedua faktor ini saling mempengaruhi, faktor geofisik penting untuk menentukan daya dukung yang terlanjutkan yaitu, yaitu proses ekologi yang merupakan sumber daya gen,

misalnya hutan adalah salah satu faktor ekologi dalam sistem pendukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk pernafasan kita. Faktor sosial budaya juga mempunyai peran yang sangat penting, bahkan menentukan dalam daya dukung terlanjutkan. Sebab akhirnya manusialah yang menentukan apakah pembangunan akan berjalan terus atau terhenti³⁴.

Berdasarkan Fatform for actions on the road to Johansburg 2002” yang telah disepakati pada bulan Oktober 2001, mengakui pentingnya tindakan regional menuju pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan kekhususan kawasan, visi bersama, dan keragaman budaya, prakarsa ini ditujukan bagi pengambilan langkah-langkah nyata di berbagai bidang pembangunan berkelanjutan seperti keanekaragaman hayati, sumber daya air, kerentanan dan keberlanjutan perkotaan, aspek-aspek sosial (termasuk kesehatan dan kemiskinan), aspek-aspek ekonomi (termasuk energi) pengantar-pengantar kelembagaan (termasuk pembangunan kemampuan, indikator, dan partisipasi masyarakat madani) dengan memperhatikan etika dalam pembangunan berkelanjutan.³⁵

Pembangunan berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Millinium,

³⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika cetakan pertama 2006:3.

³⁵ Ibid, 132-133.

bertujuan untuk mengatur arti pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, adanya pertimbangan gerakan dan semangat untuk menjaga ekologi, atau menyeimbangkan manfaat maksimal biosfer, pembangunan berwawasan lingkungan, juga telah diagendakan oleh negara Indonesia dalam bab III butir 10 GBHN 1973, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus dipergunakan secara rasional, penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup Indonesia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.³⁶

Pembangunan berkelanjutan memerlukan kesinergian antara kepentingan negara sebagai pemegang otoritas perijinan, pelaku usaha dalam hal ini PT.IPU, sebagai pemrakarsa pembangunan kawasan Industri Candi dengan kepentingan keseimbangan ekosistem yang harus dilakukan dengan prinsip keselamatan lingkungan. Kepentingan sosial yang menyentuh langsung kepada keseimbangan ekosistem harus diutamakan, apabila terjadi kerusakan akan berakibat konservasi akan sulit dilakukan.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh World Commisisions on Enviromenat and development di definisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi

³⁶ Sudarto P Hadi. *Dimensi Hukum pembangunan berkelanjutan*, BP Undip cetakan ke I, 2002:1

kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Menurut Yacobus (1986) diperlukan empat syarat yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (the fulfilment of human needs), pemeliharaan lingkungan (maintenance of eccological integrity) keadilan sosial (social equity) dan kesempatan menentukan nasib sendiri (self determinisions) dengan kata lain pembangunan berkelanjutan mengehendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi penduduk miskin termasuk di dalamnya masyarakat lokal, demokratisasi tranparansi serta perlindungan fungsi lingkungan.pengertian ini sejalan dengan makna pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam agenda 21 yang mencakup tiga aspek : lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, pertanyaan sekarang apakah peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan memiliki ciri-ciri yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.³⁷

Dari pandangan tersebut diatas, menekankan kepada pemeliharaan dan mempertahankan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan di kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Ngaliyan, Semarang apabila dihadapkan kepada konsep tersebut diatas, masih ada permasalahan. Masalah itu antara lain tidak adanya transparansi dari pemrakarsa (PT IPU) dalam pengelolaan kawasan, pemanfaatan kawasan, penguasaan

³⁷.Ibid:2

tanah, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang harus dilakukan.

Manusia sebagai satu bagian dari alam merupakan bagian utama lingkungan yang kompleks. Kegiatan-kegiatan seperti perkembangan penduduk, industri pembangunan jalan dan pembangunan hutan, pemakaian insektisida, penggunaan unsur radioaktif, pembuatan pelabuhan udara, pembangunan pemukiman, pembangunan gedung-gedung lainnya atau pembangunan terminal bus merupakan beberapa contoh yang dapat mempercepat proses perubahan lingkungan dari bumi ini. Manusia dengan kelebihanannya yang mempunyai akal dan pikiran dalam kemajuan teknologi ini merasa makhluk yang paling berkuasa di alam ini. penemuan-penemuan yang pada mulanya bertujuan untuk kesejahteraan manusia dapat menjadi bumerang terhadap hidupnya, bila prinsip ekologi diabaikan.³⁸

2. Tata Lingkungan Hidup.

a. Pengertian Penataan Lingkungan Hidup.

Penataan lingkungan atau penataan lingkungan hidup, bertujuan untuk memaksimalkan fungsi lingkungan hidup bagi kelangsungan ekosistem atau biosfernya. Penataan lingkungan hidup setelah adanya modernisasi kehidupan, yang berupa penerapan teknologi maju, keinginan manusia pada peradaban yang serba modern dan

³⁸ Zoerani Jalal Irwan, *ekologi dan organisasi komunitas lingkungan*, Bumi Aksara cetakan ke III, 2001:11-12.

serba cepat menimbulkan masalah tersendiri, utamanya adalah dampak negatif kemajuan, antara lain kemajuan di bidang teknologi. Kemajuan teknologi itu telah menjadi simbol peradaban, khususnya kemajuan teknologi di bidang pembangunan dan industrialisasi yang membawa konsekuensi tersendiri, misalnya adanya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, peningkatan suhu udara akibat efek rumah kaca, meningkatnya carbon dioksida akibat menurunnya kemampuan produksi oksigen alam sekitar, akibat penggundulan hutan dan area penghijauan.

Di Negara-negara maju, modernisasi berarti penyempurnaan dan perbaikan kualitas teknologi yang lebih sempurna, yang mampu mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat pencemaran, modernisasi juga berarti meminimalisir dampak negatif dari kemajuan itu sendiri. Berbeda dengan negara-negara berkembang khususnya di Indonesia keseimbangan demikian ini belum diperhitungkan, karena masih mengejar kuantitas sesaat, yang berorientasi pada keuntungan financial jangka pendek, yang berarti kurang memperhitungkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi dan

kemajuan pembangunan dibidang-bidang tertentu di luar persoalan lingkungan hidup.

Beberapa konsepsi kemajuan negara-negara maju dengan negara berkembang menurut **Moenadjad Danusapoetro**, adalah sebagai berikut:

Melihat kenyataan hidup umat manusia dan keadaan dunia dewasa ini, maka tampak secara jelas sekali bahwa bangsa-bangsa dan negara-negara yang disebut bangsa dan negara maju adalah sesungguhnya karena mereka telah maju dalam ilmu dan teknologi, yang menjadi sarana dalam ilmu dan teknologi, yang menjadi sarana dan wahana mereka untuk mencapai kemajuan-kemajuan materiil (kebendaan) dan spiritual (kerohanian) sebaliknya, bangsa dan negara sedang berkembang itu dewasa ini memang sedang berada pada perkembangan ilmu dan teknologinya, hingga belum dapat mewujudkan hasil buahnya seperti yang telah dicapai oleh bangsa dan negara maju.³⁹

Menurut **Moenadjat Danoesapoetro**, negara-negara maju dalam hal modernisasi lebih menekankan responsibilitas terhadap lingkungan hidup, melalui penggunaan teknologi moderen

³⁹ Moenadjad Danusaoetro, *hukum lingkungan*, buku III penerbit Bina Cipta cetakan pertama nopember 1982:31.

yang ramah lingkungan, sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia responsibilitas masih merupakan wacana yang baru berkembang, responsibilitas untuk mencapai keseimbangan terhadap kelestarian lingkungan hidup setiap kegiatan lebih menonjol pada usaha mencapai keuntungan materiil, keadaan demikian disebabkan oleh *Human resources* (sumber daya manusia) yang terbatas, masalah nilai spiritual yang rendah, utamanya pada kelompok pengambil kebijakan maupun keputusan, serta lemahnya lembaga kontrol yang cenderung dilakukan oleh kelompok internal saja.

Penataan lingkungan tidak dengan serta merta dapat dilakukan, selain melalui perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang melalui kajian-kajian pemanfaatan, pemanfaatan lingkungan, pemanfaatan ekosistem, serta perlindungannya. Keserasian dengan lingkungan sekitar, pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang sebagai berikut:

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang dilakukan melalui perencanaan tata ruang, penggunaan tata ruang, dan pengendaliannya. Robinson Tarigan

mengatakan, perencanaan juga berarti mengetahui, dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrolable yang relevan, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan.⁴⁰

Dari apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan tersebut untuk dapat melakukan kajian pembangunan dan perencanaan wilayah, setidaknya harus dilengkapi dengan perangkat perencanaan, perangkat peraturan perundang-undangan atau payung hukum, perangkat kajian dan analisa, perangkat audit lingkungan, dan perangkat pengontrol.

b. Pengertian Penataan Menurut Hukum Lingkungan.

Lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya biosfer yang saling memberi manfaat bagi lingkungannya, sebelum ada campur tangan manusia yang mendominasi lingkungan hidup, pada saat itu ekosistem berjalan sesuai peran dan fungsi masing-masing secara alamiah, namun semenjak ada campur tangan manusia yang dominan, maka permasalahan baru yang berupa perluasan sarana kehidupan manusia juga semakin mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan, perluasan pemukiman, bangunan gedung-gedung, perluasan sarana transportasi yang

⁴⁰ Robinson Tarigan, *Perencanaan pembangunan wilayah*, bumi aksara, 2005:3.

menyebabkan meningkatnya polusi udara, berakibat pada meningkatnya sinar ultraviolet yang dapat merugikan perkembangan ekosistem.

Pasal 28 H ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemen yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jelaslah bahwa masalah lingkungan hidup berdasarkan pasal 28 H Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen, memposisikan persoalan lingkungan hidup menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari negara, yaitu mengedepankan arti pentingnya masalah lingkungan hidup yang sehat.

c. Dasar hukum penataan lingkungan.

Penataan lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal bagi keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan lingkungan hidup itu antara lain terjaganya sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem demi menjaga kelangsungannya.

Masalah lingkungan sebenarnya sudah dikenal semenjak manusia dan ekosistemnya itu lahir, antara lain adanya penguasaan daerah-daerah kekuasaannya, adanya kehidupan manusia yang nomaden (selalu berpindah) karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya dari lingkungan alam sekitar. Ketika alam sekitar sudah bermasalah dengan tidak tersediannya bahan kebutuhan pokoknya, maka biosfer akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pada daerah lain atau dikenal dengan sebutan masyarakat Nomaden.

Di Indonesia, masalah lingkungan mulai menjadi perhatian negara semenjak Indonesia merdeka, dengan diundangkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat ditemukan pada alinea ke IV (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....dst.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 huruf a,b dan c yang berbunyi sebagai berikut: hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kemudian dipertegas lagi dengan adanya keputusan presiden RI nomor 60 tahun 1972 tentang pembentukan panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup yang diketuai oleh Menteri Negara Urusan Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara Bapenas bidang perencanaan material dan prasarana **Dr.J.B Sumarlin**, tugas panitia antar Departemen ini adalah menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.⁴¹

Kemudian melalui Garis besar haluan negara 1973-1978 dicantumkan secara jelas, dalam butir ke 10 (sepuluh) yang berbunyi sebagai berikut: “dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional, penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan generasi yang akan datang.

Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 1997 undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi sebagai berikut:

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas tanggung jawab negara, azas berkelanjutan dan azas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

⁴¹ Supriadi, *hukum lingkungan Indonesia*, sinar grafika cetakan pertama, 2006:172.

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Penataan ruang yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang yang berimbang, dengan memperhatikan keselamatan ekosistem perlu mendapat pengaturan dan pengawasan dari institusi negara. Penataan ruang juga dibuat sedemikian rupa agar perlindungan keselamatan lingkungan benar-benar terjaga. Pasal 2 undang-undang nomor 13 tahun 1992 tentang Tata Ruang yang berbunyi sebagai berikut:

Penataan ruang berazaskan :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah, susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara herarkhis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Wujud struktural pemanfaatan ruang di antaranya meliputi herarchi pusat pelayanan seperti kata, pusat

lingkungan, pusat pemerintahan, prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, rancang bangun kota seperti ketinggian bangunan, jarak antara bangunan, garis langit dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggunakan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam.

Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.

Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang ini, adalah tata ruang yang direncanakan. Tata ruang yang tidak direncanakan berupa tata ruang yang terbentuk secara alamiah, seperti wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gus, gunung dan sebagainya.

Bahwa dari beberapa dasar hukum yang terurai tersebut diatas, adalah bertujuan untuk mengatur ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan manusia, yang mampu secara maksimal memberikan daya manfaat kepada ekosistem baik yang berupa makhluk hidup, yang mampu berperan sebagai zat pengurai, yang sangat dibutuhkan dalam tata ekosistem, maupun terhadap zat-zat mati yang pada akhirnya kesejahteraan manusia sebagai makhluk ekosistem yang dominan dapat tercapai secara maksimal.

3. Manfaat penataan menurut hukum lingkungan hidup.

Manusia diciptakan oleh sang kholiq, untuk menjadi cholifah di dunia, manusia diciptakan dengan segala kesempurnaannya, apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, misalnya diberi kesempurnaan berupa daya akal dan budi, daya cipta dan daya karsa, tetapi sang kholiq juga memberi kebebasan kepada manusia selaku komponen ekosistem untuk berbuat atau tidak berbuat. Kebebasan itu juga terhadap lingkungan alam sekitar kehidupan manusia dan ekosistemnya. Sang Kholiq telah memberi kelengkapan kebutuhan hidupnya, antara lain, adanya lahan untuk memenuhi kehidupan yang terdiri dari lingkungan alam sekitar yang diperuntukkan bagi ciptaanNya.

Alam sekitar kita, pada mulanya merupakan planet yang tidak ada aktifitas kehidupan ekosistem, kemudian oksigen (O_2), dan kadar karbon dioksida sangat tinggi, yang menyebabkan kehidupan pada saat itu sulit. Pada mulanya atmosfer bumi tidak terdapat oksigen (O_2) sedangkan kadar karbon dioksida (CO_2) sangat tinggi, dengan kondisi lingkungan bumi pada saat itu tidak memungkinkan adanya zat-zat hidup, atau kehidupan. Dengan mulai terbentuknya kehidupan yang sederhana dalam bentuk molekul-molekul organik, antara lain yang mengandung zat hijau daun atau

clorofile, mulailah berlangsung proses fotosintesis di bumi. Dalam proses ini makhluk hidup yang berklorofile mulailah berlangsung proses foto sintesis di Bumi. Dalam proses ini, zat yang berklorofile mampu mengubah carbon dioksida (CO_2) dengan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi, menjadi karbohidrat dan terbentuk pula Oksigen (O_2). Dengan makin berkembangnya organisme yang berklorofile, proses fotosintesispun semakin berkembang. Dengan itu kadar CO_2 dalam atmosfer berkurang, sedangkan kadar O_2 bertambah.⁴²

Bahwa menurut penjelasan **Ninie Suparmi** tersebut di atas, adalah sebuah gambaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, utamanya material yang mampu menjaga keseimbangan kehidupan dari produk-produk zat hijau daun (Clorofile). Zat ini adalah zat yang mampu memproduksi oksigen (O_2) yang sangat penting bagi ekosistem itu sendiri. Zat hijau daun atau clorofile yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan, termasuk juga kehidupan manusia, mengharuskan manusia sebagai makhluk ciptaanya yang sempurna harus melindungi, menjaga dan mempertahankan jumlah zat hijau daun. Mempertahankan, melindungi dan menjaga tumbuh-tumbuhan yang mampu memproduksi zat hijau daun menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dihindari,

⁴² Ninek Suparmi, *Pelestarian pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan*, Sinar Grafika 1994:2.

dengan demikian lembaga penjaga dan pelindung terhadap zat-zat yang mampu memproduksi zat hijau daun mutlak diperlukan keberadaannya, dan mengharuskan diberikan kewenangan-kewenangan yang secukupnya.

Mengingat pentingnya zat hijau daun yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari ekosistem termasuk di dalamnya biosfer menjadikan persoalan lingkungan bagian terpenting yang harus dijaga, kemudian persoalan ini menjadi perhatian penting, ilmuwan yang menekuni bidang ini yang kemudian dikenal dengan istilah ekologi. Istilah ekologi pertama kali dipakai oleh seorang ahli ilmu hayat berkebangsaan German bernama **Ernst Haeckel** pada tahun 1869. mulai abad ke 20 ekologi diterima sebagai suatu disiplin ilmu, namun kira-kira baru pada tahun 1960 istilah lingkungan hidup masuk ke dalam perbendaharaan umum. Dewasa ini ekologi sebagai suatu sarana yang penting untuk menciptakan dan memelihara kualitas hidup manusia.

Ekosistem sangat penting, ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen kehidupan tidak bisa dipisahkan karena hal itu saling terkait antara biosfer dengan zat-zat mati lainnya, termasuk di dalamnya eksistensi penghijauan di daerah-daerah yang tergusur karena suatu alasan atau suatu kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya ekspansi industrialisasi yang mengglobal, yang menggeser peran penting penghijauan, manfaat

penghijauan saat ini sudah mendesak untuk di kedepankan.

Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya persoalan penghijauan lingkungan hidup sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh nusantara. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak jarang pembangunan itu dilaksanakan di lahan pertanian dan di kebun buah-buahan pada hal tumbuhan (yang hijau daun) dalam ekosistem, berperan sebagai produsen pertama yang mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk lainnya, dan mengubah CO₂ menjadi O₂ dalam fotosintesis, sehingga dengan meningkatnya penghijauan di perkotaan berarti dapat mengurangi CO₂ atau polutan lainnya yang berperan terjadinya efek rumah kaca, atau gangguan iklim, di samping vegetasi berperan dalam kehidupan dan kesehatan lingkungan secara fisik, juga berperan dalam estetika serta kesehatan jiwa. Mengingat pentingnya peranan vegetasi ini terutama di perkotaan untuk menangani krisis lingkungan maka diperlukan perencanaan dan penanaman vegetasi untuk penghijauan secara konseptual.⁴³

⁴³ Zoeraini Djamal Irwan, *Prinsip-prinsip Ekologi dan organisasi Ekosistem komunitas & lingkungan*, Bumi Aksara 2003: 165.

Penanaman vegetasi menjadi penting dalam kegiatan yang berkonsentrasi pada penggunaan lahan yang berskala kecil sampai dengan skala besar, wacana ini harus mendesak dilakukan, dengan pengaturan tersendiri secara jelas dan bersifat mengikat, penanaman vegetasi sangat penting dalam kehidupan manusia, seiring dengan persoalan populasi penduduk yang demikian pesat, serta gencarnya program pemerintah dalam sektor peningkatan ekonomi melalui pembangunan sarana prasarana penunjang harus diimbangi dengan demikian pembangunan sarana fisik dengan meletakkan tanaman dan luas wilayah yang diperuntukkan bagi kawasan industri.

4. Kesadaran Masyarakat Terhadap penataan lingkungan hidup.

Penataan lingkungan hidup, adalah upaya membangun dan mengembangkan, serta melindungi ekosistem vegetatif, yang berupa flora dan fauna yang sangat diperlukan oleh manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera, sehat berarti minimnya gangguan-gangguan kesehatan baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kesehatan jasmani tidak akan mungkin didapatkan ketika rohaninya juga tidak sehat. Penataan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi penting terhadap manusia, karena kehidupan manusia sangat tergantung kepada kesehatan

alam sekitar. Oksigen (O_2) sebagai zat yang mampu mendukung kesehatan manusia, karena tercukupinya kebutuhan manusia dan ekosistemnya. Hidrogen mampu menumbuhkan dan menseimbangkan alam sekitar, semakin banyaknya oksigen (O_2) maka akan semakin berkurang pula peluang karbon dioksida (CO_2), apabila karbon dioksida (CO_2) dibiarkan berkembang menguasai alam ini, maka akan semakin sulit kadar kesehatan manusia dan ekosistemnya.

Kadar oksigen (O_2) yang sangat diperlukan dalam kehidupan ekosistem termasuk di dalamnya manusia dan zat-zat mati, dalam rangka membantu terjadinya proses penguraian, proses penguraian sangat dibutuhkan oleh alam dalam rangka terjadinya proses penyeimbang terhadap ekosistem, proses ini tidak dapat dipungkiri, apabila tidak ada proses pengurai dalam lingkungan yang disebabkan oleh kemampuan alam semakin menurun, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu, termasuk usaha-usaha menjaga dan menstabilkan tingkat oksigen disekitar kita, pemantauan itu antara lain dilakukan dengan pemantauan melalui alat-alat pemantauan udara, termasuk pembuatan area merokok untuk publik.

Secara sadar bahwa oksigen di bumi ini, sudah mulai berkurang, banyak cara ditempuh, antara lain, adanya kajian terhadap efek penggunaan Air Conditions (AC), efek rumah kaca, efek penebangan dan

penggundulan zona-zona penghijauan, dan efek pembangunan kawasan Industri dengan penggunaan material yang berpengaruh terhadap peningkatan panas bumi, untuk meningkatkan kualitas udara yang bersih dan sehat. Keadaan ini semakin menguat, ditandai dengan diundangkannya Undang-undang nomor 4 tahun 1982, konsiderannya antara lain berbunyi sebagai berikut: “bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-undang dasar 1945, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, Perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan generasi sekarang dan mendatang”. Bahwa persoalan lingkungan hidup, dengan segala cita-citanya untuk meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup, telah berusaha secara etik moral. Meningkatkan dengan sungguh-sungguh kualitas dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan semangat yang berbunyi sebagaimana dimaksud dalam konsiderannya huruf :

- c. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, dan untuk mencapai

kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

- d. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan hidup.
- e. Bahwa penyelenggaraan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dari ketiga konsideran tersebut diatas, kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan regional dan permasalahan Internasional telah menunjukkan

semangat peningkatannya. Yang menjadi persoalan adalah, apakah semangat itu telah dapat dilaksanakan terutama di Indonesia sebagai negara penyumbang masalah polusi asap akibat pembakaran hutan, didasari pada etika moral dari masyarakat Indonesia untuk keluar dari protes akibat pembakaran hutan tersebut dan dari institusi negara, dengan mempertimbangkan target ekonomi atau pendapatan secara bertanggung jawab dan berimbang. Perlu dilakukan langkah-langkah kongrit untuk meningkatkan kemampuan lingkungan yang baik. Persoalan demikian yang harus dipacu untuk diwujudkan secara konsekuwen oleh bangsa secara keseluruhan.

B. Manfaat Hukum Lingkungan hidup

Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan yang mengatur permasalahan lingkungan hidup agar terjadi prinsip “Simbiosis Mutualis” diantara ekosistem yang saling berkesinambungan dan menguntungkan, manusia sebagai makhluk yang tergabung dalam ekosistem yang memiliki nilai dominan di antara makhluk-makhluk lain, perlu diatur secara tersendiri dengan sungguh-sungguh agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga sebaik-baiknya.

“peraturan hukum” untuk mengatur tata pelaksanaan pola pengelolaan lingkungan hidup secara mantap dan pasti, disebut hukum lingkungan ⁴⁴

Hukum lingkungan dalam aplikasinya masih berada pada sudut yang kurang mendapatkan perhatian yang sesungguhnya, apabila dibanding dengan hukum Publik dan hukum Privat (pidana dan perdata) hampir setiap orang akan bersinggungan tidak terbatas pada orang yang berstrata pendidikan yang cukup saja, melainkan hampir semua lapisan masyarakat sudah mengenalnya, sedangkan pada hukum lingkungan di Indonesia, yang terkena dampak langsung mayoritas adalah orang-orang atau kelompok orang yang apabila diukur dari strata pendidikan dasar dengan tingkat kemampuan ekonomi tergolong pada tingkat ekonomi lemah, sehingga permasalahan hukum lingkungan kurang mendapat perhatian, atau pada posisi yang lemah dimata masyarakat, dan perkembangan hukumnya menjadi lemah juga. Kondisi ini seharusnya memacum kita untuk segera mewujudkan lingkungan yang kuat.

1. Hukum lingkungan menurut aspek perlindungan ekosistem.

⁴⁴ .Moenadjat Danusaputro, *Hukum lingkungan buku III Regional*, Bina Cipta, 1982 :42.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian diatas, tentang posisi hukum lingkungan dalam kehidupan sosial, utamanya untuk masyarakat Indonesia yang telah terkondisi untuk berpikir sebatas pada kekinian saja tanpa berpikir untuk jangka panjang, antara lain, telah rusaknya kawasan hutan, hutan lindung, dan sangat lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup karena faktor perhatian politik yang sangat lemah dalam masalah ini, menjadikan posisi tawar hukum lingkungan juga sangat lemah. Karena kurangnya perhatian dari politisi terhadap masalah lingkungan, dampak kerusakan lebih serius telah melanda dunia, misalnya terjadinya kebocoran lapisan ozon yang berfungsi sebagai pencegah sinar ultra violet matahari langsung ke bumi.

Meddows memberikan laporan berbagai masalah yang menimpa banyak negara di dunia, dalam sebuah laporannya yang berjudul *the limits to growth* suatu laporan kepada *The club of Rome* (proyek on the predicament of mankind) publikasi tersebut yang merupakan laporan pertama kepada *The Club of Rome* (1972) mengemukakan tentang adanya 5 (lima) faktor pokok yang menentukan, dan pada akhirnya membatasi pertumbuhan di planet yaitu, *Pollution, agriculture productions, and pollutions*.⁴⁵

Kehidupan umat manusia sebagai bagian mayoritas dan dominasi dalam lingkaran tata ekosistem, tidak akan bisa

⁴⁵ Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia sebuah pengantar*, Sinar Grafika 2006:40.

berjalan dengan baik apabila tidak ada peran dari ekologi yang lain, justru masalah yang paling besar yang akan terjadi niscaya akan sulit dipecahkan oleh manusia yang cerdas sekalipun, peran dari ekologi yang lain sangat menentukan dinamika manusia, termasuk peran dari komponen zat pengurai yang terstruktur dalam kelompok ekosistem, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing peran dan fungsi itu menurut **Odum** (1971) lazimnya ekologi di definisikan sebagai “Ilmu tentang hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungan hidupnya” atau “ ilmu tentang hubungan organisme hidup dengan lingkungan hidupnya” dikemukakan pula oleh **Odum**, bahwa ekologi terutama berkaitan dengan sifat biologis kelompok organisme dan dengan proses fungsional tanah, laut dan air, sehingga pengertian ekologi yang lebih sesuai dengan pengertian modern dapat didefinisikan sebagai “Ilmu tentang struktur dan fungsi daripada alam, dengan pengertian bahwa alam meliputi pula manusia.”⁴⁶

Hubungan organisme dalam tata ekosistem ini sudah terstruktur secara dinamis, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yang saling menunjang, misalnya peran tumbuhan, sebagai zat yang mampu memproduksi zat O₂ (oksigen) yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem lainnya, termasuk peran zat pengurai, peran dan fungsi tanah, peran zat yang mampu memfilter sinar ultraviolet ke

⁴⁶ Niniek Suparni, *pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan*, Sinar Grafika 1994:3

Bumi. Apabila struktur ekosistem yang seimbang yaitu antara manusia disatu sisi dengan makhluk lain dibiarkan terjadi dominasi yang berlebihan terutama oleh umat manusia, maka kerusakan di bumi akan semakin nyata. Hal itu telah pula diperingatkan oleh Allah Swt, termasuk juga kepada bangsa Indonesia sebagaimana diperingatkan dalam kitab suci **Al-Qur'an surat Al'Ashr ayat 2 dan 3** yang artinya sebagai berikut:

2. **“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian”**
3. **Kecuali orang-orang yang beriman, dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.**

Mengerjakan amal sholeh, apabila dikontekskan terhadap alam sekitar adalah jangan berlaku sewenang-wenang terhadap alam. Alam harus dikelola dengan baik, jangan serakah. Di satu sisi mentaati kebenaran.

Kebenaran yang harus dilakukan oleh umat manusia adalah bersumber dari pengetahuan dan akal budi karena ada petunjuk yang diwahyukan melalui Nabi kepada umatnya.

Peran dan fungsi ekosistem telah diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan forsi masing-masing, misalnya udara memberi manfaat menyeluruh kepada makhluk yang lain. Tumbuh-tumbuhan memberi manfaat kepada manusia, hewan dan Zat-zat lain yang

membutuhkan, sehingga keteraturan ini yang semestinya harus dijaga oleh dominasi manusia..

Pelestarian dan perlindungan ekosistem yang terstruktur secara dinamis, harus tidak boleh terganggu sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, termasuk adanya perlindungan kawasan tertentu yang harus terjaga di setiap lokasi yang harus mendapatkan kajian yang mendalam dan komprehensif. Kalau pendekatan ekosistem diterapkan terhadap masalah kehidupan manusia, Ia merupakan suatu pola pikir dalam usaha memecahkan masalah kehidupan prinsip ekologi. Kalau pendekatan ekosistem diterapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup, maka Ia merupakan suatu pola bekerja yang terpadu dengan menggunakan prinsip ekologi. Sebagai contoh, misalnya banjir dengan membuat chekdam, melainkan perlu pula dilakukan upaya pemulihan dan perlindungan fungsi hidro-orologi hutan, dan ini berarti perlu dilakukan reboisasi dan penghijauan.⁴⁷

Dari apa yang dikemukakan oleh Niniek Suparni tersebut diatas, menjadi keharusan terhadap semangat arah kebijakan politik negara Republik Indonesia yang sedang dalam masalah lingkungan yang serius, yang ditandai dengan tidak diberikannya ruang yang cukup dan

⁴⁷ Ibid : 4-5.

berimbang bagi perlindungan ekosistem bagi setiap ruang tertentu, apakah ruang itu sebagai ruang ekonomi, maupun ruang yang lain, misalnya adanya suatu keharusan setiap ruang tertentu harus juga disiapkan ruang bagi perlindungan ekosistem secara khusus pula.

2. Hukum Lingkungan dan aspek pelestarian ekosistem.

Pasal 4 huruf a, dan b undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi, sebagai berikut :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara jelas bahwa telah ditekankan oleh Undang-undang tentang lingkungan hidup, yaitu masalah adanya keharusan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya, agar keselarasan dapat tercapai, yang juga dalam huruf b telah ditekankan adanya sikap yang mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap persoalan lingkungan hidup.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan harapan kultur masyarakat semakin peduli terhadap masalah ini. semakin menggejala dan dirasakan sudah seharusnya menjadi sikap politik setiap bangsa, karena diyakini apabila bangsa ini lalai terhadap upaya penyelamatan

lingkungan hidup, diyakini pula bencana yang lebih besar akan menjadi kenyataan.

Masalah lingkungan hidup sudah menjadi perhatian negara-negara maju, semenjak tahun 1960 dengan dicetuskannya **Deklarasi Stockholm**, kemudian sidang umum PBB tahun 1969 yang diikuti pula dengan pengesahan Resolusi nomor 2581 (XXIV) sidang umum PBB. Sidang umum PBB menerima baik tawaran pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972.⁴⁸

Negara berkembang, adalah negara yang sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara maju, ketertinggalan itu antara lain disektor ekonomi yang ditandai oleh pendapatan rata-rata penduduk yang masih rendah, populasi penduduk yang tidak berimbang dengan kemampuan pendapatan rata-rata atau tidak zero growth, tidak adanya kepastian hukum yang berarti pula ketaatan hukum masyarakat masih rendah.

Ketaatan hukum masyarakat yang masih rendah itu yang juga didukung oleh kepentingan politik kelompok yang sangat menonjol, yang hanya untuk kepentingan kelompoknya dalam jangka waktu yang sangat pendek, atau kepentingan sesaat. Secara umum akan merugikan kepentingan negara yang lebih besar.

⁴⁸ Koesnadi Hardjo Seomantri, Hukum tat lingkungan, Gajahmada University Press, edisi ke delapan cetakan ke delapan belas, 2005 :7.

Hubungan antara hukum sebagai suatu permainan dan hukum sebagai bisnis cukup dekat, menjalankan hukum sebagai bisnis itu memang tidak “sejahat” menjalankan sebagai suatu permainan, tetapi tetap saja tujuan hukum untuk mendatangkan keadilan menjadi melenceng. Hukum sebagai bisnis juga merupakan trend baru di dunia yang juga di motori oleh praktek Amerika Serikat. Di negeri ini muncul istilah mega lawyering dimana praktek hukum itu menjadi sedemikian rupa sehingga tidak murni menjalankan urusan hukum, melainkan “sebagai hukum dan sebagian lagi bisnis” (bacalah : Mare Galanter: mega law and mega-lawyering in the contemporary United States, 1983).⁴⁹

Kepentingan penyelamatan lingkungan hidup harus sama pentingnya dengan penyelamatan bangsa, dan penyelamatan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya, keadilan juga harus menjadi milik semua orang, termasuk penyelamatan lingkungan hidup.

3. Hukum Lingkungan menurut aspek kesejahteraan manusia.

Kesejahteraan hidup harus dinyatakan sebagai hak setiap ekosistem yang ada di muka bumi, kesejahteraan berarti memberikan hak kepada setiap ekosistem untuk berkembang sesuai sesuai dengan kodratnya masing-

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain hukum di Indonesia*, penerbit buku Kompas, Jakarta, Januari 2006:63.

masing, termasuk peran dan fungsi makhluk / zat mati sekalipun dengan memberikan ruang kepada setiap ekosistem akan mampu memberikan perlindungan kepada ekosistem lainnya yang berupa ketersediaan kebutuhan biologis yang sehat.

Pemanfaatan peluang secara tepat termasuk pemanfaatan ruang karena alasan nilai ekonomis juga harus ditata dengan sistematis dan bertanggung jawab oleh karena itu makhluk yang mempunyai dominasi tinggi (manusia) .

Indonesia adalah negara berkembang dengan berbagai kompleksitas permasalahan, antara lain :

- Tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah terhadap semua kalangan aspek kehidupan karena didominasi kepentingan politik semata..
- Tingkat pengetahuan yang rendah
- tingkat produktifitas atau hasil karya yang rendah.
- Tingkat kesadaran politik untuk kepentingan yang lebih besar juga sangat rendah.

Kondisi penataan lingkungan yang hanya berorientasi kepada nilai-nilai ekonomi yang dominan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan manusia. Orientasi ekonomis yang menjadi landasan yang sangat kuat, maka aspek lain akan kehilangan peluang untuk berkembang, maka kegagalan lainnya akan menjadi masalah yang serius yang semakin menghilangkan nilai-nilai perlindungan ekosistem.

Penataan ruang, dan masalah lingkungan masih menjadi dominasi urusan pemerintah semata, yang berakibat pada daya kontrol yang lemah, yang disebabkan oleh kurang ada transparansi dari penyelenggara pemerintahan terhadap pelibatan masyarakat umum secara terbuka dan tidak memihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu saja.

Bab. III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Hasil Penelitian.

1. Gambaran Umum Kota Semarang.

Semarang adalah kota di daerah pantai utara yang terletak di bentangan daerah pantai utara pulau jawa, atau termasuk dalam jajaran pantura, Semarang menurut sejarah, adalah berasal dari tumbuhan yang terkenal pada saat itu, nama pohon itu adalah

pohon Asam (bahasa jawa Asem) dan arang yang dalam bahasa Indonesianya adalah “jarang”. Pohon ini pada saat itu banyak tumbuh di daerah Semarang, sampailah orang menyebutnya dengan sebutan Semarang.

Kota Semarang menjadi pusat kegiatan Politik dalam pengertian bahwa pusat pemerintahan Jawa Tengah berada di Kota ini, yaitu adanya Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, DPRD TK I Jawa Tengah, dan beberapa kantor Pemerintahan lainnya. Kota Semarang, adalah kota pemerintahan tingkat II yang dipimpin oleh seorang Walikota, di daerah ini juga dikenal sebagai kota perdagangan, kota budaya, kota pendidikan, ketika menjelang datangnya bulan puasa (Romadhon) budaya atau kegiatan khas menjelang datangnya bulan puasa adalah adanya kegiatan”Dugderan” dan upacara penyambutan yang ditandai dengan adanya pawai “warak ngendok” kegiatan yang berjalan bertahun-tahun yang lampau sampai sekarang masih tetap lestari.

Kota Semarang semenjak tahun 1976 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1976, daerah ini diperluas dari beberapa kecamatan antara lain penambahan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal, kecamatan itu adalah Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, dan kecamatan Gunung Pati.

Kemudian pada tahun 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1992, kota Semarang ada penambahan kecamatan yang dulunya terdiri dari sembilan kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 16 (enam belas)

kecamatan. Semarang yang terletak di bentangan Pantai Utara pulau Jawa, secara Geografis terbagi dalam dua wilayah alamiah, yaitu wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi atau dikenal dengan sebutan sebagai kota “Atas” yang terdiri dari kawasan perbukitan dengan sebagian wilayahnya untuk kegiatan Industri dan perkebunan, posisi kota Semarang terletak di antara koordinat 07.00 lintang utara dan 11.21 bujur timur.

Semarang sebagai sentral kegiatan ekonomi, pendidikan dan sentral kegiatan politik karena di tempat ini terletak Ibukota Propinsi Jawa Tengah pendidikan di kota ini terdapat beberapa PTN dan PTS antara lain, Undip, UNES, IAIN, PTS antara lain UNTAG, STIKUBNK, UNISULLA.

Wilayah kota Semarang pemekarannya diarahkan ke wilayah bagian Timur, wilayah bagian selatan dan wilayah bagian barat, pengembangan wilayah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, wilayah selatan dan timur dikembangkan untuk pemukiman sedangkan wilayah barat dikembangkan untuk pemukiman dan perindustrian, wilayah barat khususnya wilayah kecamatan Ngaliyan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah kota Semarang nomor : 15 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTK) Semarang tahun 2000 – 2010 Bagian Wilayah kota (BWK) Kecamatan Ngaliyan Semarang dan wilayah kecamatan TUGU.

2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Wilayah hukum Kecamatan Ngaliyan, adalah wilayah hasil pemekaran kota Semarang, yang dulunya adalah bagian dari sebagian wilayah Kabupaten Kendal. Wilayah Kecamatan Ngaliyan di sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kendal, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tugu, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Semarang Barat, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Semarang Mijen.

a. Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Kecamatan Ngaliyan kota Semarang secara umum masih memiliki karakteristik alamiah, ketika sebelum keluarnya Keputusan Walikota Semarang Nomor : 593.8/1285, tanggal 31 Desember 1995 tentang Ijin pengelolaan Kawasan yang di prakasai oleh PT. IPU Semarang, yaitu Kawasan Industri Candi sehingga dapat dipastikan bahwa semenjak tahun 1995 sampaikan dengan dilaksanakannya penelitian ini telah mengalami perubahan yang tidak menguntungkan. Perubahan itu disebabkan oleh sebagian besar atas perubahan-perubahan oleh kepentingan manusia dengan alasan kepentingan ekonomi.

b). Keadaan geologi Kecamatan Ngaliyan.

Keadaan geologis Kecamatan Ngaliyan, di sebelah barat adalah daerah dataran rendah sebagian kecil,

4	15-19	1219	7,92	1012	8.86	526	1340	9163	9.48
5	20-24	1144	7.43	1144	10.02	265	6.75	8720	9.02
6	25-29	1268	8.24	1226	10.74	241	6.14	9458	9.78
7	30-34	1215	7.89	1075	9.41	328	8.35	8864	9.17
8	35-39	1069	6.94	826	7.23	341	8.69	7025	7.27
9	40-44	1158	7.52	771	6.75	305	7.77	5802	6.00
10	45-49	1081	7.02	577	5.05	255	6.52	4674	4.84
11	50-54	1083	7.03	470	4.12	219	5.58	3875	4.01
12	55-59	857	5.57	329	2.88	201	5.12	3122	3.23
13	60-64	618	4.01	206	1.80	109	2.78	2309	2.39
14	65 +	259	1.68	187	1.64	86	2.19	1573	1.63
	jumlah	15395	100.00	11420	100.00	3926	100.00	96666	100.00

Data kependudukan menurut kelompok jenjang pendidikan, berdasarkan data tahun 2004 di Kecamatan Ngaliyan, adalah sebagai berikut:

No	pendidikan	Purwoyoso		Ngaliyan		Babankerep	
		Jlh	%	jlh		jlh	%
1	Perguruan tinggi	381	2.47	675	6.75	16	0.58
2	Akademi	301	1.96	538	3.35	21	0.75
3	SLTA	5667	36.81	1967	19.68	205	7.39
4	SLTP	3677	23.81	1539	13.96	428	15.42
5	SD	2617	17.00	1395	13.96	928	33.44
6	Belum tamat SD	831	5.40	512	5.12	547	19.71
7	Tidak tamat SD	1461	9.49	1398	13.99	271	9.77
8	Tidak sekolah	460	2.99	1975	19.76	359	12.94
	jumlah	15395	100.00	9995	100.00	2775	100.00

c). Keadaan geologis Kelurahan Ngaliyan.

Keadaan geologis kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Semarang secara umum dapat digambarkan bahwa mayoritas terdiri dari dataran tinggi, dengan lahan pertanian tradisional yang bergantung pada musim. Namun keadaan itu praktis berubah, semenjak keluarnya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995, yang mengizinkan lahan di Kawasan Kecamatan Ngaliyan, kota Semarang digunakan sebagai areal industri, PT. IPU Semarang sebagai Pemrakarsa. Perubahan itu terjadi akibat berubahnya fungsi alamiah di Kawasan Jalan Gatot subroto yaitu adanya pemotongan bukit-bukit beralihnya fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), hilangnya fungsi penghijauan.

d). Keadaan geologis di Kelurahan Babankerep.

Kelurahan Babankerep adalah bagian dari wilayah Kecamatan Semarang Ngaliyan bagian selatan, termasuk juga bagian wilayah yang terkena proyek Kawasan Industri Candi, yang di Prakarsai oleh PT. IPU Semarang, secara geologis, wilayah ini termasuk daerah yang labil, dan perbukitan, tanaman keras antara lain Pohon Jati, Bambu, dan perkebunan Jambu, adalah tanaman mayoritas. Daerah Aliran Sungai (DAS)

alamiah yang melintasi Kawasan ini bertemu dengan daerah aliran sungai Silandak namun setelah adanya proyek Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang nomor : 593.8/1285, tanggal 31 Maret 1995, daerah ini telah berubah menjadi kawasan galian C, namun berdasarkan perda 15 tahun 2004, seharusnya kegiatan itu sudah harus dihentikan.

Daerah aliran sungai, perbukitan dan tanaman yang berfungsi sebagai pelindung terhadap alam sekitar telah hilang. Keadaan geologis daerah ini, sampai dengan dilakukan penelitian, dan observasi langsung, didapatkan daerah yang secara geologis akibat adanya pembukaan Kawasan ini menjadi daerah yang rawan longsor, retak-retak, fasilitas sosial telah tidak berfungsi dengan baik, misalnya jalan rusak, makam umum rusak, bangunan sekolahan dan pemukiman mengalami rusak berat.

e. Keadaan geologis Kelurahan Purwoyoso.

Secara umum di kelurahan Purwoyoso adalah daerah perbukitan, yang saat ini telah dilakukan perataan (Cut and Fill) oleh pemrakarsa Kawasan Industri Candi (PT.IPU) sejak tahun 1996, dan saat ini telah dipakai sebagai kawasan pergudangan, dan Industri. Keadaan geologid di kelurahan ini, tidak jauh berbeda dengan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, yang berbatasan langsung dengan Kawasn Indistri Candi,

yang membedakan adalah wilayah kelurahan ini mayoritas adalah perkampungan Asli warga setempat, dengan kepadatan penduduk merata.

3. Rencana Pembangunan Kawasan Industri

Rencana pembangunan kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang yang diprakarsai oleh PT.IPU, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Sosialisasi dilaksanakan pada saat awal pembangunan kawasan ini. pembangunan kawasan Industri dalam perkembangannya mengalami perubahan, semua pembangunan kawasan Industri di dasarkan atas ijin yang dimuat dalam gambar yang disahkan oleh atasnama Pemerintah Kota Semarang, Kepala Dinas Perencanaan dan perijinan Nomor : AGD 5911/1585/UPT/05,TGL 14 April 2005, luas kawasan yang diijinkan seluas 300 ha, namun dalam perkembangannya PT IPU secara sepihak telah mempromosikan dan merencanakan perluasan kawasan Industri ini dengan nama Candi Industrial Estate menjadi seluas 600 ha, perluasan ini telah dipromosikan kepada Publik, perencanaan yang tidak disertai dengan sosialisasi dan ijin kajian analisis dampak lingkungan ini, tentu telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dengan target sebagai berikut :

a. Jangkauan Sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi rencana pembangunan Kawasan Industri Candi ini, ditujukan kepada Masyarakat sekitar

kawasan, tentang rencana pembangunan kawasan industri, sosialisasi di masing-masing wilayah yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan kawasan industri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara acak, di wilayah RW VI, RW VII kelurahan Ngaliyan, di desa Desel kelurahan Ngaliyan, di Balai Kelurahan Ngaliyan, di Aula Kecamatan Ngaliyan kota Semarang, yang diikuti oleh Tokoh Masyarakat, Ketua RT, ketua RW sekecamatan Ngaliyan. Pelaksanaan sosialisasi terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2006, sosialisasi ini dilaksanakan atas desakan masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, penulis adalah sebagai Ketua Tim Lingkungan RW VI Ngaliyan, yang bertugas untuk menyelamatkan lingkungan dari upaya-upaya PT.IPU untuk terus menggeser wilayah pemukiman khususnya pemukiman di RW VI, ini agar terhindar dari keserakahan PT.IPU untuk menggusur dan mengabaikan keselamatan lingkungan pemukiman ini.

b. Isi Sosialisasi

sosialisasi rencana pembangunan kawasan Industri Candi ini, berdasarkan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat terkena dampak, sekitar kawasan Industri ini, adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi tahun 1995-1996

Sosialisasi di wilayah RW VI Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan Semarang

dilaksanakan di Masjid Al-Iman RW VI, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, yang menjelaskan isi sosialisasinya sebagai berikut:

Di sekitar kawasan perumahan ini akan dibangun Kawasan Industri dan pergudangan non polutan.

Di sekitar kawasan akan dibangun jalan Tol.

Di sekitar kawasan akan dibangun pasar dan puskesmas.

2) Sosialisasi tahun 2001.

Pelaksanaan sosialisasi tahun itu, dilaksanakan di balai kelurahan Ngaliyan, yang hadir pada saat itu adalah, dari Pemerintah kota Semarang, PT.IPU Semarang, Konsultan PT.IPU Semarang, Ketua dan Tim Lingkungan RW VI Ngaliyan, para Ketua RT dan RW sekelurahan Ngaliyan, tokoh masyarakat sekelurahan Ngaliyan. Pada saat sosialisasi ini, terjadi ketegangan antara warga masyarakat dengan pemerintah Kota Semarang, PT.IPU Semarang, inti ketegangan adalah adanya upaya PT IPU selaku pemrakarsa ini, tidak memperhatikan faktor keselamatan lingkungan bagi warga yang bermukim disekitar kawasan, serta dampak-dampak negatif lainnya yang telah terjadi, antara lain Banjir, tanah longsor, fasilitas sosial (pendidikan, tempat ibadah,makam) terjadi

kerusakan, penghilangan dan pengalihan aset jalan ke tempat lainnya.

3) Sosialisasi tahun 2005.

Sosialisasi tahun ini, dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, hadir dalam acara sosialisasi ini, Camat Ngaliyan, Lurah-Lurah se Kecamatan Ngaliyan, RW dan RT se Kecamatan Ngaliyan, Tokoh masyarakat, isi sosialisasi berkaitan dengan surat tim lingkungan RW. VI Ngaliyan, tentang revisi rencana teras iring terhadap rencana terasring PT. IPU di Kelurahan Ngaliyan Semarang , Wacana yang berkembang pada saat sosialisasi ini adalah :

- a). PT. IPU jangan lagi menggusur wilayah pemukiman yang telah ada terdahulu.
- b). Agar PT. IPU dalam mengelola limbah dikelola secara terpusat.
- c). agar kawasan Industri Candi yang diprakasai oleh PT. IPU tidak se enakny membikin sumur Artitis karena akan berdampak buruk terhadap sumur warga yang telah ada.
- d) .Agar pembuatan terasring sebagai upaya penyelamatan lingkungan direvisi sesuai keinginan/revisi warga.

C. Respon masyarakat terhadap materi sosialisasi.

Respon masyarakat terhadap materi sosialisasi rencana pembangunan Kawasan Industri Candi di Jl. Gatot Subroto Ngaliyan Semarang terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing adalah :

1. Kelompok masyarakat tidak berdaya

masyarakat yang tinggal di Kawasan Industri ini khususnya masyarakat yang tidak berdaya menurut istilah penulis, terdiri dari dua kelompok yaitu Komunitas masyarakat pedesaan, dan komunitas masyarakat perumahan, kedua komunitas masyarakat ini terdiri dari berbagai profesi, yaitu masyarakat dengan strata pendidikan rendah, menengah, dan tinggi, dari sisi profesi terdiri dari dua kelompok besar profesi, profesi swasta, dan profesi Pegawai Negeri, dari kelompok ini, keberanian masyarakat untuk menghadapi perilaku perusahaan raksasa oleh Etnis tertentu ini, menjadi faktor penghambat terhadap perlindungan warga tersebut, sehingga hak-hak warga, yang terkait dengan hak terhadap lingkungan hidup, hak kenyamanan terganggu.

2. Kelompok masyarakat yang berdaya.

Kelompok masyarakat yang berdaya adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keberanian untuk berhadapan dengan perusahaan raksasa ini,

kelompok masyarakat ini hanya terdiri dari masyarakat satu RW. Yang berlokasi berhadapan dengan Kawasan ini kelompok masyarakat ini berjumlah kurang lebih sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kepala keluarga, terdiri dari berbagai profesi yaitu, TNI, POLRI, PNS, Desena, dan profesi swasta. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat warga RW. VI, yaitu dimana penulis sebagai komunitas masyarakat ini, dan sekaligus berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Kelurahan Ngaliyan ditugasi untuk mewakili warga menyelesaikan berbagai kepentingan antara warga dengan PT. IPU Semarang. Hasil yang diperoleh oleh warga ini adalah di respon secara baik oleh PT. IPU termasuk juga oleh Pemerintah Kota Semarang.

d. Jenis usaha di kawasan Industri candi

Wilayah hukum kecamatan Ngaliyan, kota Semarang, berdasarkan peraturan Daerah Kota Semarang nomor 15 tahun 2004, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) kota Semarang yang dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 7 Juni 2004, dikelompokkan dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) X, peruntukkannya bagi kepentingan :

a. Industri

- b. Permukiman
- c. Perdagangan dan jasa
- d. Tambak
- e. Rekreasi
- f. Pergudangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang tersebut, wilayah kecamatan Ngaliyan dimasukan dalam blok 1-1. blok ini peruntukkanya antara lain : pasal 14 Penentuan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut:

a. Blok 1.1.

1.	permukiman	217.711 ha
2.	perdagangan dan jasa	0,211 ha
3.	campuran perdagangan dan jasa	
	permukiman	5,435 ha
4.	perkantoran	0,633 ha
5.	pendidikan	1,800 ha
6.	kesehatan	0,350 ha
7.	peribadatan	0,180 ha
8.	olah raga dan rekreasi	2,200 ha
9.	pelayanan umum	1,014 ha
10.	permukiman industri	8,485 ha
11.	Industri	84,845 ha
12.	terminal	2,010 ha

Sementara itu Peraturan Daerah Kota Semarang ini, juga telah ditetapkan penggunaan lahan di wilayah

hukum kecamatan Ngaliyan, penggunaan lahannya diatur dalam bagian ke empat, yaitu penentuan jaringan jalan dan Utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan. Hal ini diatur dalam pasal 15, yang berbunyi sebagai berikut :

a. blok 1.1

1. jaringan jalan dan utilitas 97.580 ha
2. konservasi dan ruang terbuka
hijau lainnya 105.191 ha

PT.IPU sebagai pemrakarsa pembangunan kawasan industri candi (KIC) yang berlokasi di wilayah hukum kecamatan Ngaliyan kota Semarang, adalah sebagai pemrakarsa pembangunan kawasan Industri Candi (KIC), pembangunan ini sampai dengan tahun 2004 telah mencapai angka 80 % dari seluruh wilayah yang diijinkan, yang berarti bahwa PT.IPU sebagai pemrakarsa berdasarkan surat Keputusan Walikota Semarang, bahwa PT IPU sebagai pemrakarsa pembangunan kawasan Industri Candi.

1. Usaha yang sudah berjalan.

Jenis usaha yang ada di kawasan Industri Candi yang sudah berjalan adalah usaha perdagangan,

industri, industri yang disertai dengan hunian (mess) khusus bagi karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan metoda observasi dan pengamatan, serta wawancara langsung, didapatkan penjelasan sebagai berikut :

a. PT. Mitra Sentra Plastik Industri.

Menurut salah seorang karyawan perusahaan ini, yang bernama **Nanang**, menjelaskan bahwa perusahaan ini mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 2006 yang lalu, bergerak di bidang pengolahan / produksi tutup botol yang terbuat dari bahan dasar plastik. Perusahaan ini mengolah biji plastik menjadi tutup botol untuk memenuhi kebutuhan mitra usahanya, tenaga penggerak mesinnya menggunakan tenaga listrik yang disuplai dari Perusahaan Listrik Negara, sedangkan kebutuhan air bersih sebagai pendukung oprasinya, perusahaan mengandalkan dari produksi sumur artesis yang dibuatnya sendiri di areal perusahaan ini, dengan kedalaman sekitar 130 meter, seangkan pembuangan limbah perusahaan dialirkan melalui saluran air yang mengalir ke saluran air (selokan) yang dibuatnya.

b. CV. Asri Griya Mandiri.

Menurut pengawas pelaksana pembangunan (kontraktor) gedung ini yang bernama **Tri Nur Setyarso**, menjelaskan bahwa, perusahaan ini akan beroperasi pada bulan April tahun 2007 bergerak di bidang perakitan elektronik, pembuatan dan pengecatan casing, bahan yang digunakan adalah berasal dari bahan kabel baja, dan bahan plastik sebagai bahan pembuatan casingnya. Tenaga penggerak yang digunakan adalah mengadakan pasokan tenaga Listrik, sedangkan pasokan air perusahaan ini mengandalkan dari kemampuan produksi air artetis yang ada di lokasi perusahaan ini.

2. Jenis Usaha.

Usaha yang sedang disiapkan di kawasan industri Candi ini, antara lain disiapkan di lokasi blok 20,21, 22, 23 yang terletak disisi bagian barat wilayah kawasan Industri ini. adapun usaha yang disiapkan terdiri dari, jenis usaha perakitan, dan produksi barang produksi barang jadi. Sumber air yang digunakan disetiap badan usaha yang ada dikawasan ini menggunakan dua sumber air, masing-masing dari PDAM dan sumber air Artetis lokasi perusahaan setempat yang dilakukan tidak melalui mekanisme yang ada. Kedalaman sumber air artetis di masing-masing lokasi perusahaan rata-rata dilakukan dengan cara pengeboran kedalaman 130 meter. Managemen

pengolahan limbah dikawasan Industri ini sampai dengan ditulisnya hasil penelitian belum dilakukan dengan baik sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yang berlaku, antara lain limbah cair dialirkan begitu saja ke selokan yang dibuat disekitar lokasi perusahaan.

a. Jenis limbah.

Kawasan industri ini, menurut ketentuan pemerintah tersebut dibawah ini :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah, nomor: 060.1/09293, tanggal 15 Maret 1991 luas lahan yang diijinkan untuk digunakan sebagai kawasan Industri Candi ini seluar 300 ha.
2. Menteri Perindustrian, nomor : 547/SJ/IX/1992, tanggal 2 September 1992, luas wilayah yang diijinkan untuk Kawasan Industri Candi seluas 300 ha.
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, nomor:2599/MPP/7/1996, tanggal 19 Juli 1996, luas lahan yang diijinkan untuk kawasan Industri seluas 300 ha, dengan lokasi terlampir.

4. Surat persetujuan Kantor BKPMN Nomor: 03/II/PMDN/1991, tanggal 02 Januari 1991, luas lahan yang diijinkan untuk Kawasan Industri Candi ini seluas 300 ha.

Bahwa dari beberapa dasar hukum tersebut, telah ditetapkan, diijinkan Kawasan Industri ini seluas 300 (tiga ratus) hektar, yang disertai beberapa syarat yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, nomor: 400.08/82/II/95, tanggal ...(tidak ditulis tanggalnya) Pebruari 1995, dalam keputusannya, pada ketetapan pertama angka delapan yang berbunyi sebagai berikut:

“di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dibuat unit-unit pengolahan limbah pada setiap blok. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengolahan limbah pada pusat pengolahan limbah pada pusat pengolahan limbah untuk kawasan (central unit)”

Angka 9 (sembilan)

“kegiatan industri yang boleh diusahakan adalah jenis industri yang non polutan sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah tingkat II Kota Madya Semarang

nomor : 2 tahun 1990 tentang Rencana Induk Kota”

usaha yang telah berjalan di kawasan ini, sampai dengan ditulisnya hasil penelitian ini, antara lain bergerak dibidang Perbengkelan, Industri kaca, Perakitan elektornika, pabrik / industri plastik, gudang produksi suplemen, pabrik / industri plastik, gudang produksi suplemen minuman. Limbah yang dihasilkan antara lain, sisa potongan kabel baja, sisa bahan plastik tidak bisa di daur ulang , bahan baku yang tidak bisa diproduksi karena adanya pembusukan misalnya bahan baku dari kedelai, sisa industri kaca, sisa bahan buangan pelumas.

b. Managemen limbah.

Kawasan Industri Candi ini, di ijinakan oleh pemerintah setelah ditentukan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemrakarsa, syarat itu antara lain adanya keharusan pengolahan limbah secara sistematis, antara lain, adanya ketentuan pengolahan limbah masing-masing blok yang ada di Kawasan ini, kemudian harus dilakukan

pengolahan pengolahan secara terpusat, sesuai dengan keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota madya Semarang Nomor : 400.08/82/II/95, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama angka 8 (delapan) “ didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dibuat unit-unit pengolahan Limbah pada setiap blok, hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengolahan limbah pada pusat pengolahan limbah untuk Kawasan (Central Unit)”.

Pengolahan dan pengelolaan limbah di Kawasan Industri ini, pengelolaan limbah sampai dengan ditulisnya hasil penelitian ini belum dilakukan sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

4. Aspek Penghijauan.

Pembangunan Kawasan Industri Candi di Jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di kota Semarang. Menurut KA-Kadal (kerangka Acuan Kajian Analisis Dampak Lingkungan) yang telah dibuat bertujuan sebagai berikut : “dengan beroprasinya Kawasan Industri Candi PT IPU yang berlokasi di Kecamatan Ngaliyan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kesejahteraan kerja dan peluang

berusaha disektor formal dan informal. Selain itu dengan adanya kawasan industri, diharapkan juga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Semarang dan peningkatan Devisa Negara melalui penerimaan Eksport.⁵⁰

Tujuan pembangunan kawasan ini menurut Ka-Kadal tersebut, adalah semata-mata dalam rangka mengejar target nilai-nilai ekonimis semata. Dampak negatif pembangunan kawasan ini antara lain:

- * tanah longsor akibat adanya tebing yang curam.
- * erosi yang tinggi sebagai akibat terbukanya lapisan tanah.
- * banjir, sebagai akibat terakumulasinya air hujan pada kawasan Industri karena menjadi daerah yang lebih rendah dari sekitarnya
- * timbulnya polusi udara, berupa debu pada saat kegiatan pemotongan tebing, pengangkutan material, dan penurunan material di daerah pengurukan. Disamping itu kegiatan tersebut menggunakan alat berat, sehingga juga menimbulkan kebisingan dan getaran.

⁵⁰ Ka-Kadal, Kawasan Industri Candi oleh PT.IPU Smg, 2006:1-2.

* penurunan muka air tanah setempat, sehingga air tanah dangkal tidak mungkin lagi diperoleh di daerah ini.

* hilangnya berbagai jenis flora dan fauna.⁵¹

kegiatan penghijauan di kawasan Industri Candi ini sesuai dengan draft Ka-Kadal dalam dokumennya, menjelaskan sebagai berikut :

“penghijauan kawasan adalah suatu usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman tanaman keras, rerumputan serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi lainnya pada area aktiitas berdasarkan rencana tataguna tanah yang ada area penghijauan / jalur hijau adalah setiap jalur / area tanah terbuka yang terbina dan pengawasannya ditetapkan sebagai daerah yang tidak terbangun.

Untuk kawasan industri candi, fungsi penghijauan disini adalah :

- menjaga kelestarian ekosistem yang ada
- meningkatkan gairah kerja karyawan
- melindungi pejalan kaki, mobil yang diparkir, serta jalan pada kawasan industri.
- untuk menyegarkan lingkungan
- meningkatkan estetika lingkungan
- sebagai paru-paru lingkungan kawasan industri.

⁵¹ Ibid : 11-15

Penghijauan dikawasan industri sudah cukup memadai, tetapi perlu penambahan pada lokasi-lokasi yang saat ini sedang dibangun untuk kapling. Kapling-kapling industri dan perumahan industri juga sepanjang jalur-jalur yang ada di dalam kawasan, sehingga untuk perancangan kawasan harus terdapat :

- penghijauan dan sabuk hijau pada daerah aliran sungai dan sepanjang jalan dalam kawasan industri.
- taman lingkungan : sculpture dan vocal point
- tanaman peneduh : sebagai peneduh sepanjang jalan
- tanaman pengarah : sebagai pengarah pada zona-zona tertentu. Untuk mencegah populasi dibuat daftar bangunan industri dengan lingkungan.⁵²

5. Perijinan lokasi kawasan industri.

a) Latar belakang

Kawasan Industri Candi yang terletak di jalan Gatot Subroto Kecamatan Ngaliyan, kota Semarang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan masing-masing adalah kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Babankerep, dan

⁵² Ibid : 11-18-19

kelurahan Purwoyoso, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang nomor : 593.8/1285, tanggal 31 Maret 1995, telah ditetapkan sebagai kawasan Industri dengan luas wilayah yang dipakai sebagai Kawasan industri adalah sekitar 300 (tiga ratus) hektar.

Bahwa Kawasan yang ditetapkan tersebut diatas telah dilengkapi dengan Aalisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi amdal Departemen Perindustrian nomor : 2599/MPP/7/ 1996, tanggal 19 Juli 1996, namun dalam perkembangannya kemudian, Kawasan tersebut ternyata dibangun tidak sesuai dengan Site plan yang tertera dalam dokumen Amdal, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Amdal khususnya pasal 26 ayat (1) maka dokumen Amdal tersebut dinyatakan batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah tersebut.⁵³

Pembangunan Kawasan Industri Candi di wilayah Hukum Kecamatan Ngaliyan bertujuan untuk lahan industri yang berintegrasi sekaligus antara perijinan pemanfaatan, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dapat menunjang semangat dan suasana, serta produktifitas kerja yang maksimal.

Kawasan Industri Candi ini dibangun dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan,

⁵³ Dokumen kerangka acuan kajian analisis dampak lingkungan (KA.KADAL) September 2005, bab I:1-1

peluang meningkatkan gairah berusaha yang mampu menunjang pendapatan asli daerah, serta peningkatan pajak penerimaan Export.

Perkembangan Kawasan Industri Candi pada bulan Desember 2004, kegiatan pembangunan telah mencapai angka 80 % dari total yang akan dibangun. Hal ini mengacu pada Desain terbaru.

b) Alasan Penentuan Lokasi.

Wilayah Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang adalah wilayah bagian barat belahan Kota Semarang, yang dianggap sebagai wilayah pintu gerbang masuk kota Semarang dari bagian Barat. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Semarang tahun 2000 – 2010, lokasi Kawasan Industri Candi termasuk dalam bagian Wilayah Kota (BWK) yang mempunyai potensi :

- sebagai gerbang kota Semarang dari arah Barat.
- Perkembangan kegiatan Industri yang sudah ada merupakan potensi yang dapat merangsang perkembangan wilayah.
- sebagai pengembangan kegiatan yang selama ini ada di pusat kota Semarang.⁵⁴

⁵⁴ Ibid II-3

Rencana detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang tahun 2000 – 2010, wilayah Ngaliyan yang meliputi 3 (tiga) kelurahan yaitu kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Babankerep, Kelurahan Purwoyoso, telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Candi (KIC) yang bertujuan untuk menggali potensi Kawasan tersebut, dan Kawasan pemukiman penduduk tetap berada diluar Kawasan Industri ini, adapun penggunaan lahan yang telah ditetapkan masing-masing adalah :

- . Kapling Industri : 32,9 ha
- . Kantor pengelolaan dan fasilitas : 1,2 ha
- . Ruang terbuka hijau : 60 ha
- . Ruang terbuka jaringan jalan, jembatan, ruang parkir, kapling industri yang tidak terokupasi (pakai) bangunan, sungai, drainase lingkungan dan lahan kosong : 120 ha

c) Penelitian lokasi.

1) Lokasi Kawasan Industri Candi.

Pembangunan kawasan industri candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang yang diprakarsai oleh PT.IPU Semarang, terletak pada

koordinat 07o.00',52 lintang selatan dan 110'21'32 bujur timur.⁵⁵

Lokasi kawasan industri candi di jalan Gatoto Subroto Ngaliyan Semarang meliputi 3 (tiga) wilayah kelurahan, masing-masing adalah Kelurahan Babankerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Purwoyoso. Dari masing-masing kelurahan itu secara langsung berbatasan dengan :

a) Kelurahan Ngaliyan :

- (1). Sebelah barat berbatasan dengan desa Desel.
- (2). Sebelah utara berhimpitan dengan perumahan Pokok Pondari, wilayah ini adalah wilayah Administratif RW VII, dan berbatasan langsung dengan perumahan Sulanji Atas (Karonsih Selatan) wilayah administratif RW VI, perumahan panembahan Senopati, berhimpitan dengan perumahan Karonsih Timur.
- (3). Sebelah barat laut berhimpitan dengan perumahan BPI.

b) Kelurahan Babankerep.

- 1) Sebelah selatan tenggara berhimpitan dengan kampung Pucung.

⁵⁵ Draf dokumen rencana pemantauan lingkungan (RPL) PT.IPU Januari 2006:L1.1

- (2) Sebelah timur berbatasan dengan perumahan Pasadena.

c) Kelurahan Purwoyoso.

- 1) sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Jl.Sri Wibowo, Krapyak.
- 2) Sebelah utara bagian timur berhimpitan dengan pemukiman penduduk Jl.Sri Wibowo, Krapyak.
- 3) Sebelah utara sisi barat berhimpitan dengan perumahan Jl.Honggowongso, Ngaliyan.

Sedangkan jalur jalan yang dilalui dari dan ke kawasan Industri adalah , sebelah barat melalui jalan raya Dr.Hamka (Boja – Ngaliyan) jalan Panembahan Senopati, jalur jalan Pasar Ngaliyan, sedangkan jalur selatan melalui jalur jalan SMA 7 Semarang, jalur timur melalui Jalan Siliwangi dan jalan Gatot Subroto. Jalur transportasi alat alat berat satu-satunya melalui jalur jalan Siliwangi dan jalur jalan Gatot Subroto, sedangkan jalur lainnya hanya dapat dilalui untuk transpostasi pegawai dan karyawan yang bekerja di kawasan Industri.

2). Kondisi Geografis.

Kawasan industri candi jalan Gatoto Subroto yang terletak dikelurahan Ngaliyan kota Semarang, secara geografis

menempati lokasi yang berbukit-bukit yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kondisi sebelum dibangun kawasan Industri.

Kondisi geografis sebelum dipakai sebagai kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT.IPU, secara geografis daerah ini berbukit-bukit, terdapat dua aliran sungai alamiah masing-masing berhulu dari daerah perkampungan Desel dan yang satunya berhulu di kawasan perumahan Sulanji atas, dan perumahan Pokok Pondasi, kedua aliran sungai ini bertemu di sungai Silandak

b. Kondisi setelah keluarnya ijin pembangunan kawasan.

Kondisi keluarga ijin pembangunan Kawasan ini, yang semula daerah berbukit, kemudian dilakukan **cut and fill** beberapa bukit, penghilangan dua aliran sungai, disfunksinya jalur jalan yang menghubungkan dua wilayah kelurahan Babankerep dan Kelurahan Ngaliyan.

Kawasan pemukiman di kampung Pucung, Kampung Desel, Perumahan Pokok Pondasi, Perumahan Karonsih timur berhimpitan dengan kawasan Industri, sedangkan di Perumahan Karonsih selatan khususnya Wilayah RW. VI Ngaliyan, jarak terdekat adalah 60 meter, sedangkan jarak terjauh adalah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara warga RW.VI dengan

Pemerakarsa PT. IPU, daerah ini dibatasi oleh batas terasering dan batas sabuk hijau.

6. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri dari aspek hukum lingkungan.

a. Luas Wilayah Kawasan Industri Candi.

1) Luas Wilayah Yang diijinkan.

Pembangunan kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan, yang diprakarsai oleh PT IPU Semarang, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kota Semarang, sampai saat ini adalah seluas 300 ha.

2) Luas wilayah yang telah dipakai.

Luas wilayah Kawasan Industri Candi di kawasan Kecamatan Ngaliyan, yang telah dipakai oleh pemrakarsa kawasan ini (PT.IPU) sampai dengan saat ini telah mencapai angka 500 ha, dari luas kawasan yang diijinkan sebanyak 300 ha, sehingga ada selisih lebih dari 200 ha tanah yang telah dibebaskan oleh PT IPU, namun pembebasan itu tidak berijin.

3) Luas wilayah yang direncanakan secara sepihak..

PT.IPU selaku pemegang ijin pemrakarsa Kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan Semarang, berdasarkan liftlet yang diberi judul Candi Industrial Estate yang telah membuat selebaran kepada publik tentang rencana perluasan kawasan ini, yang semula dibangun melalui tahapan dengan sebutan Fase, saat ini telah dibangun kawasan dari fase 1, fase 2, fase 3.dan yang baru direncanakan adalah fase 5, total kawasan yang akan dibangun seluas 600 ha, dengan konsekwensi, akan ada penghilangan Pedesaan, perkampungan yang terancam hilang adalah Desa Desel, dan Desa Pucung. Akan ada penghilangan kawasan perkampungan di dekat perumahan Pasadena, konsekwensi lain, Asrama Brimob Kompi Pasadena yang semula berada di Luar Kawasan, akan berada berhimpitan dengan kawasan, tanpa ada green belt, hal ini akan berdampak negatif terhadap kejiwaan aparaturnya yang bermukim di kawasan ini.

Pembangunan Kawasan Industri Candi di jalan Gatot subroto Ngaliyan Semarang, sesuai dengan tujuannya adalah bertujuan untuk menyediakan Kawasan Industri dalam rangka menunjang pembangunan Kota Semarang.

Sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang telah disusun berdasarkan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 15 tahun 2004.

Penyiapan lahan Kawasan industri Candi yang telah dilakukan adalah dengan cara merubah Struktur alamiah (Topografi), merubah peran dan fungsi ekosistem lokasi Kawasan Industri, termasuk juga merubah keadaan alamiah, yang berupa peran dan fungsi penghijauan, yang berdampak pada berubahnya tatanan hidrologi, geologi, dan udara di Kawasan tersebut yang berpengaruh terhadap lokasi disekitar Kawasan, wilayah Industri Candi, di wilayah Ngaliyan, dan wilayah-wilayah penting lainnya di Wilayah Semarang Barat pada umumnya.

Langkah-langkah Pemerintah Kota Semarang yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan Pembangunan

Industri candi di Jalan Gatot subroto Kecamatan Ngaliyan Semarang, berdasarkan Keputusan Kepala badan pengendalian Dampak lingkungan daerah Semarang, nomor : 660.1/13 tahun 2006, tanggal 05 juni 2006, tidak dibenarkan lagi melakukan penambahan dan pengurangan bangunan dan ruang terbuka, sampai dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan lingkungan hidup/luas wilayah.

PT. Indo Perkasa Usaha Tama, sebagai pemrakarsa pembangunan Kawasan Industri candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan semarang, diberi kesan patuh oleh Pemerintah Kota Semarang untuk membangun Kawasan Industri, yang menjadi persoalan adalah berapa luas wilayah yang diijinkan untuk dibangun.

Luas wilayah Kawasan Industri Candi di Kelurahan Ngaliyan menurut rencana luas 300 hektar akan digunakan untuk Kawasan Industri, berarti bahwa seluruh Kawasan yang digunakan seluas 300000 are.⁵⁶

⁵⁶ Robert J.Kondoatie, *saran masukan Ka Amdal Kic. Dokumen Kerangka acuan Kajian analisa Dampak lingkungan* September 2005 : i

Bahwa kawasan Industri candi yang dimiliki oleh PT. IPU Semarang sebagai pemegang saham tunggal.

Telah melakukan pembangunan kawasan diatas tanah negara seluas 300 hektar lebih.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasioanl nomor : 110 – 4156, tanggal 27 Oktober 1998, telah ditetapkan luas tanah dalam satu prafensi luasnya dua kali luas optimum, bahwa yang dimaksud dengan luas optimum untuk Kawasan industri adalah 200 hektar.⁵⁷

b. Jenis –jenis usaha di kawasan Indistri Candi

Usaha yang telah dilakukan oleh pengusaha di kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang, dapat digolongkan menjadi :

(1) Usaha Pergudangan.

Usaha yang dilakukan dalam kelompok pergudangan ini adalah usaha menampung sendiri barang-barang yang perlu digudangkan, usaha menyewakan kepada orang lain atau badan usaha lain untuk menyewa gudang yang dikelola oleh Badan Usaha khusus untuk menyewakan

⁵⁷ . Budi Harsono, hukum agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum tanah Jembatan 2004 : 222-223.

pergudangan, untuk menyimpan bahan dasar untuk Industri, bahan yang akan dipasarkan di wilayah Semarang.

(2) Usaha Industri.

Usaha industri ini antara lain, usaha membuat dari barang mentah menjadi bahan jadi, misalnya usaha produksi Matras oleh PT.Hilon, usaha industri kaca oleh PT Matahari, usaha Batubara yang baru pindahan dari Pelabuhan Tanjung Emas karena diusir oleh penduduk sekitar, termasuk juga di kawasan industri ini, juga dipermasalahkan oleh penduduk sekitar.

(3) Usaha dibidang jasa.

Usaha dibidang jasa ini antara lain, usaha perbankan, perbengkelan, transportasi, dan perdagangan (Suplier).

1. Jenis usaha yang sudah berjalan.

Usaha yang sudah berjalan, jenis usaha menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian dokumenter dan observasi langsung di kawasan Industri Candi Jalan Gatoto Subroto, Ngaliyan Semarang, berdasarkan penelitian literatur, dokumen Kerangka Acuan Kajian Analisis Dampak Lingkungan (Ka-Kadal) yang dikeluarkan oleh PT.IPU sebagai pemrakarsa

pembangunan kawasan Industri Candi adalah sebagai berikut:

Data kegiatan yang telah melakukan aktifitas berdasarkan data tahun 2005.

blok	nomor	Nama perusahaan	Jenis usaha / industri	Luas (m2)
A		PT.Makmur jaya utama	Pergudangan	17.390
B	1	PT.Berkat Manunggal Jaya	Belum beroperasi	19.565
C	2-3	PT.Mas Boxindo	Dtt	dt
	6	PT.Samudra Industri	Konveksi	2.100
	7,8,9	PT.Sampurna Bogta	Jelly	7.000
D	10	Makmur	Sparepart	2.763
	11,12,23,25	PT.Morodadi	Gudang kopi	2.600
	15	PT.Sumatra Tobacco	Kosmetik	1.300
	17-18	PT Vitalis Indonesia	Gudang besi	4.550
	21	PT.Inaiko Bane	Minuman	
		PT Ulam Tiba Halim	serbuk	1.450
	22		Gudang	
		PT.Sinar Niaga Sejahtera	kacang, jelly	1.950
E.	30,31,32		Garasi	5.399
	37	PT.Minyak gading gajah	Karpet	
		PT.Panca Tunggal	plastik	1.049
	37 B		-	2.000

F.	01-A	PT.Paphros	-	2.200
	01-C	PT.Serasi Auto Raya	-	1.224
	5	PT.Merapi Utama Farma	gudang besi	
		PT.Anugrah Perkasa	beton	2.239
	8		mebel	-
	11	PT.Subur Sejati	elektronik	2.756
		PT.Eastoll Elektronik		
	12	Indonesia	sda	2.124
	15	Sda	alat tehnik	2.153
	16	PD sumber tehnik	-	1.000
G	1	PT.Sumber Jaya Lemindo	mebel	1.020
	3,5	PT.Global Interior	poultry (i/g)	-
H	1	Winoto Saputro	distributor	
		PT.Surya Medika Perkasa	henson	2.800
	7		farma	-
	8	PT.Siba Surya	-	
		CV Sumber Rejo	gudang	2.000
	8A		keramik	
		Pt.Sejahtera Sentosa Abadi		888
	15	Plastik	plastik	
		PT.Semarang Sumber		3000
	16	Sejahtera	gudang	
I		PT Makita	kabel	3.000
	1		peralatan	-
	2	CV.Eno Pratama Sejati	Pompa	1.200
	6,7,8	PT Ulam Tiba Halim	meubel	4.062

J L M 1	11	PT.Matahari Kaca	Marimas	2.400
	15	PT.Duta yoyo dinamik	Gudang	-
		PT.Orien klasik	kaca	44.050
		PT Siba Surya	Panel listrik	100.086
		PT.Litle Giant Steel Corp	Meubel	82.662
	2a,2b	PT emperor steel corp	garasi	3.340
	5	PT.Alure Indonesia	Steel	1000
	6	PT.Cakrawala Ferindo	Steel	1.200
2.	7	PT Duta Alam Persada	Meubel	1200
		PT.Bintang Ancol Elektrik	-	
	5		meubel	2.555
	7, 7a	PT Graha Mulya Eko Jaya	Distributor	2.555
	10,11	PT.Andalas	elektrik	-
	16	CV.Tiga Bersaudara	Sda	1.200
	21	PT.Cakra Buana	-	1.200
	22	PT.Pinus Sakti	kayu olahan	
3.	9	PT.Cusson Distribusi Indonesia	gudang boxit	1.200
	19,20,21	PT.Elang Satria Jaya Abadi	kayu olahan	-
	23		distributor	1825
	10	PT.Sun Indonesia		1.500
	5	CV. Makmur sejahtera	bengkel	3.000
		PT.Mega Mulia Keramik	bubut	
	9b	PT.Tigaha Sono Timber	bengkel	3.000
	9c	Indonesia	-	6.640
5.	11	PT.Istana Mebelindo	-	3.640

6.	12	PT.Istana Candi Mesin		2.500
	1	PT.Uniwood	-	920
	18	Bengkel, permata baru	pabrik kayu	-
	19,20	CV.Engka Mas	-	500
7.	1	CV Mekar Jaya Abadi	Rental	-
		PT.Surya Gega	Mesin	
		PT.Ajinomoto Indonesia	Bengkel	4.500
8.	1		-	9.147-
	1A	PT.Jansen Indonesia	packging	38.365
	2	PT.Filma Surya Cemerlang	Percetakan	950
	2D	PT.Sumber Rejo	Distributor	900
	3	PT.Makro Abadi	Motto	1.000
		PT.Rialita	Meubel	
	12	PT.Tipindo Atlas Asia	-	1.000
	12.A		-	1.200
9.		PT.Sumber Aji	-	
	16	PT.Duta Abadi	-	1.000
	2		Distributor	1.200
		PT.Padma Indo Raya	oil	
	1	PT.Anugrah Parmindo	-	-
		Lestari	Distributor	
	2-3	PT.Indo Jakarta Motor	Springbad	9.765
	5	Cemerlang.	-	350
	9-10	PT.Bank Mandiri	distributor	175
		Paket Nusantara	obat-obatan	
	1	PT.Mitra Utama tehnik		350

12	12	1		-	20.000
15			PT.Matahari Silvirindo	Bank	
		5	Jaya	Paket	11.000
		7	PT.Uni Erlarge Industri Ind	Toko alat	1.355
				tehnik	
		10-11	PT.Suprafood	Kaca (G/I)	2.000
16.			PT.Mitraco	Export	
		1		garment	2.400
18			PT.Manunggal Sentosa	-	5.000
			Intrada	Export	
			PT.Gatsumas Wirasukses	Meubel	
				-	
				-	

2. lokasi yang ditetapkan.

Bahwa berdasarkan perijinan dari Pemerintah kota Semarang nomor izin lokasi 400.08/82/II/95, tanggal 23 Pebruari 1995, luas kawasan yang diijinkan adalah seluas 300 ha (3.000.000), Nomor : AGD.5911/1585/UPT/05/ tanggal 14 April 2005, sementara disisi lain dijelaskan bahwa luas planing keseluruhan seluas kurang lebih 343,5 ha, dan luas jalan di kawasan ini seluas 109.672 M2. perijinan ini diketahui Kepala dinas IR.Agung Oetomo, dan

Kasubdin Perencanaan dan perijinan IR Gunawan Wocaksono. Menjadi masalah ijin yang seharusnya dikelurakan bersamaan ijin terdahulu yaitu pada tahun 1995/1996, tetapi tanggal 14 April 2005 gambar baru dibuat, sehingga ada masalah apakah ada gambar terdahulu.

Kawasan Industri yang dipakai atau diijinkan berdasarkan gambar yang dibuat tersebut diatas masing-masing adalah:

1. Di kawasan wilayah hukum kelurahan Purwoyoso ditetapkan di blok A,B,C,D,E yang membujur dari batas yang berhimpitan dengan pemukiman penduduk di wilayah Krapyak kelurahan Purwoyoso tanpa ada sabuk hijau, kemudian blok F,G,H, membentang di sebelah selatan jalan masuk ke kawasan Industri melalui jalan Gatot Subroto.
2. Di kawasan kelurahan Babankerep terdiri dari blok 1,2,3,5,6,7,8,8A,8B,8C,10,11,11,11A,11B,11C,11D 12,15,17,25.
3. Di kawasan kelurahan Ngaliyan Semarang, meliputi batas wilayah perumahan Karonsih Timur, perumahan Karonsih Selatan, perumahan Pokok Pondasi, perkampungan desa Desal, masing-masing di blok: 9 dalam gambar tidak ada peta kapling, blok 10A,12A,16,18,19,20,20A,21,21A,22,22A,23A,2

3B,23C,27.diluar gambar yang telah ditetapkan tidak ada gambar lagi, sehingga gambar/lokasi yang dimasalahkan oleh warga RW VI adalah gambar blok 5A.

3. Jenis Limbah yang diperkirakan.

Perusahaan yang sudah beroperasi dikawasan Industri Candi yang terdiri dari pergudangan, Industri dan pengolahan Batubara, jarak terdekat antara kawasan pemukiman dengan kawasan Industri ini, paling dekat berjarak sebatas tembok rumah terakhir kawasan pemukiman penduduk berkisar 80 %, sedangkan yang berjarak antara 40 meter sampai dengan 100 meter dari pemukiman penduduk maksimal berkisar 20 % dari total area kawasan Industri ini.

Limbah yang diperkirakan muncul dari perusahaan-perusahaan di kawasan ini, antara lain limbah bekas pelumas dari perbengkelan, limbah plastik, limbah bahan yang tidak terproduksi berasal dari bahan yang mudah busuk, limbah pengolahan bahan makanan yang berupa limbah cair.

4. Manajemen Pengolahan limbah.

Kawasan Industri Candi di jalan Gatot subroto Ngaliyan Semarang, telah menetapkan bahwa

pengolahan limbah akan dibuat secara terpadu, melalui pembuatan penampungan-penampungan dan pengolahan secara terpusat yang sebelumnya diolah dulu pada bagian-bagian sesuai dengan blok masing-masing. namun sampai dengan berjalannya waktu tidak satupun rencana pengelolaan limbah dilaksanakan oleh pemrakarsa, dan saat ini masyarakat telah banyak terganggu oleh kebisingan, bau tidak sedap yang menyengat.

c. Aspek Penghijauan.

Bahwa Pembangunan Kawasan Industri Candi sesuai dengan draft rencana pengelolaan lingkungan menyebutkan bahwa daerah yang perlu dibuat Sabuk hijau (Green Belt) yang membatasi antara kawasan Pemukiman dengan kawasan Industri, kegiatan yang akan dilakukan antara lain dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak, penanaman tanaman keras, penanaman rerumputan.

Penghijauan ini dimaksudkan untuk keindahan, pencegah erosi, untuk daerah konservasi, untuk mencegah dan pengedali pencemaran udara, untuk menambah kesejukan udara.

Tentu menjadi masalah ketika program Rencana Pengelolaan Lingkungan dilakukan melalui sosialisasi, adalah hal yang sangat sulit dipertanggung jawabkan, kapan akan dilaksanakan, sementara dampak yang timbul sudah harus diterima terus oleh warga sekitar.

1. Luas wilayah penghijauan.

Penghijauan di kawasan Industri Candi ini, menurut Draft Dokumen Kajian Analisa Dampak Lingkungan PT IPU, hal IV-12, menggambarkan bahwa setiap batas wilayah antara PT IPU dengan Pemukiman disekitar kawasan harus di hijaukan, kemudian di setiap sisi kanan dan kiri jalan dengan luas masing-masing 8 (delapan) meter harus dihijaukan, sesuai dengan peta gambar yang telah diijinkan.

2. Area Penghijauan.

Area penghijauan di Kawasan Industri Candi, menurut Draft Kajian Analisis Dampak Lingkungan hal IV-18, menyatakan, bahwa area penghijauan harus dilakuakn di kawasan Jalur sungai, jalur sepanjang jalan yang ada di Kawasan ini, taman lingkungan, taman peneduh, taman pengarah.

3. Manfaat yang dikehendaki.

Manfaat yang dikehendaki dengan penghijauan adalah:

- untuk menjaga kelestarian ekosistem.
- meningkatkan gairah kerja
- melindungi pejalan kaki
- menyegarkan lingkungan
- meningkatkan estetika lingkungan

- sebagai paru-paru lingkungan kawasan industri.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.

1. Perijinan Pembangunan Kawasan industri Candi.

a. Luas Wilayah Kawasan Industri Candi

1) Luas wilayah yang diijinkan.

Pembangunan Kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto, kecamatan Ngaliyan Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 592.8/1285, tanggal 31 Maret 1995, adalah seluar kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.⁵⁸

Luas wilayah kurang lebih seluas 300 (tigarartus) hektar itu meliputi tiga wilayah kelurahan di kecamatan Ngaliyan, tiga kelurahan itu masing-masing adalah, kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Babankerep. setiap kelurahan tersebut, berada pada batas-batas wilayah yang berhubungan langsung, masing-masing kelurahan Purwoyoso mengambil sisi paling utara, kelurahan Ngaliyan mengambil sisi paling barat, kelurahan Babankerep mengambil sisi paling utara dan sisi wilayah paling selatan.

⁵⁸ Ka-Kadal, Bab I Pendahuluan 1-1, latar belakang, Ka Kadal Kawasan Industri Candi 2005:1-1.

Pembangunan kawasan Industri Candi ini, menurut pemrakarsa yaitu PT.IPU Semarang, telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Komisi Amdal Departemen Perindustrian Nomor: 2599/MPP/7/1996, tanggal 19 Juli 1996, tetapi dalam perkembangannya telah ditemukan data, bahwa pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan Site Plan yang tertera dalam Dokumen AMDAL, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1999 tentang Amdal khususnya pasal 26 ayat (1), maka Dokumen Amdal tersebut dinyatakan Batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah tersebut.⁵⁹

Kemudian dengan dinyatakannya Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun oleh PT.IPU dinyatakan batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan surat nomor: 660.1/572, tanggal 2 Oktober 2003, tentang Kewajiban PT.IPU untuk merevisi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dikeluarkan oleh Komisi Amdal Departemen Perindustrian nomor : 2599/MPP/7/1996, tanggal 19 Juli 1996 tersebut.

⁵⁹ Ibid : 1-1.

Pembangunan Kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang, pembangunannya pada tahun 2005 telah mencapai angka 80 % dari total pembangunan yang dijadwalkan, yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) hektar dari total wilayah yang ada berdasarkan ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

2) Luas Wilayah yang telah dipakai.

Luas wilayah pembangunan Kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang yang telah dilakukan semenjak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005, menurut data pemakaian oleh perusahaan-perusahaan atau badan usaha-badan usaha yang ada telah mencapai angka seluas 478.412 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus duabelas) meter persegi. yang meliputi tiga wilayah kelurahan Ngaliyan, kelurahan Banakerep, kelurahan Purwoyoso. Pembangunan kawasan ini pada bulan Desember 2004, telah mencapai angka 80 %, yang berarti bahwa pada tahun 2004 itu pembangunan kawasan ini telah mendekati selesai.

Pembangunan Kawasan Industri Candi yang berada di jalan Gatot Subroto Kecamatan Ngaliyan Semarang sampai dengan bulan Januari 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Luas wilayah keseluruhan adalah seluas 300 (tiga ratus hektar.
- b. Luas wilayah yang diperuntukkan sebagai daerah Kapling Industri adalah seluas 204.193 (dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar.

Luas wilayah yang dipakai yaitu seluas 209.193 hektar, peruntukannya dengan syarat, jarak antara bangunan juga harus tetap diperhatikan, sehingga kondisi eksisiting yang ada tidak terjadi penambahan bangunan pada area yang masih terbuka, agar fungsi ruang terbuka, ruang hijau masih dapat dipertahankan, parkir dan area hijau (green Space) masih diperhatikan.⁶⁰

b. Implementasi Perijinan.

Implementasi perijinan dalam pembangunan kawasan Industri Candi ini adalah identik dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah selaku pemegang regulasi perijinan, kemudian timbul pertanyaan, ketika pembangunan kawasan Industri Candi ini dinyatakan telah dicabut oleh pemegang regulasi dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, maupun Pemerintah otonomi setingkat lebih tinggi dari Pemerintah Kota Semarang, yang kemudian diketahui ternyata dalam

⁶⁰ *Deaf RKL Kawasn Industri Candi (KIT) PT.IPU, 2006:L1-9*

perjalanannya, kawasan ini bermasalah secara hukum, maka menurut Ridwan HR yang mengatakan

“bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua yang menjalankan kewenangan pemerintah itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum”⁶¹

Selanjutnya untuk mengukur, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap setiap kerugian akibat dari Keputusan badan eksekutif itu, maka untuk menjawab persoalan tersebut, dapat diukur dari teori-teori sebagai berikut:

1. Teori *Fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian.
2. Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.⁶²

Jadi dengan demikian bahwa proses pembangunan kawasan Industri Candi yang

⁶¹ Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, 2003 :254.

⁶² Ibid : 256.

sekarang menurut masyarakat sekitar, sedang bermasalah ini, perlu didalami apakah ada kesalahan dalam proses perijinannya, itu dapat diukur dari dokumen-dokumen perijinan yang telah dikeluarkan oleh Eksekutif.

Bahwa berbagai dokumen perijinan yang telah dikemukakan diatas, antara lain Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, nomor: 660.1/1989, tanggal 15 Juni 2005, yang menyatakan “pemrakarsa (PT IPU) wajib memperbaiki dokumen hasil Revisi Ka-Kadal Kawasan Industri Candi Semarang, telah dikoreksi kembali tim perumus Komisi AMDAL kota Semarang”. Dengan demikian, telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Candi di bidang Kajian-kajian Dampak penting yang dipersyaratkan bagi pembangunan ini.

Sehubungan dengan adanya permintaan koreksi kajian Analisis Dampak Lingkungan tersebut, PT IPU pada tanggal 14 Desember 2004, telah mengajukan ijin penelitian di kawasan Industri Candi, penelitian ini dilakukan dalam rangka membuat kajian-kajian analisis Dampak Lingkungan kawasan Industri Candi, di kecamatan Ngaliyan. Waktu penelitian

dilaksanakan dari tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 13 Maret 2005.⁶³

Pembangunan Kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU dimulai sejak tahun 1996 sampai dengan tulisan Tesis ini dibuat, masih dilakukan pengerjaan proyek secara marathon selama 1x24 jam, waktu istirahat hanya dilakukan ketika hari besar, misalnya hari Raya Idul Fitri, hari Natal saja, sedangkan hari-hari besar lainnya tetap melakukan aktifitasnya.

Pasal 16 Undang-undang Pengelolaan lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai Dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasannya adalah :

“Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan Analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.⁶⁴

⁶³ Dokumen Kreangka acuan Ka-Kadal PT.IPU, September 2005.

⁶⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, 2005:252

Pembangunan kawasan Industri Candi, apabila dihadapkan dengan ketentuan, harus terlebih dahulu dilakukan pencegahan atau penangkalan dampak negatif dari pembangunan ini, dapatlah dilihat dari fakta-fakta yang ada sebagai berikut:

- * pada saat musim kemarau, pengerukan bukit dan tebing masih berlanjut, dampak negatif yang timbul, selain tekanan udara yang semakin kuat menghembus, dapat mengganggu kenyamanan, akibat debu yang menyelimuti pemukiman warga.
- * penghijauan yang seharusnya wajib dilakukan terlebih dahulu, untuk mencegah dampak negatif tidak dilakukan.
- * Pembuatan sumur air bawah tanah (ABT) dilakukan oleh setiap pengusaha yang ada dikawasan ini tanpa terkendali walaupun sudah ada suplai Air PDAM, sebagaimana diperjanjikan oleh PT.IPU dengan Direktur PDAM Semarang.

Pasal 28 piagam Hak Asasi Manusia yang telah di Implementasikan di Indonesia sesuai dengan Tap MPR nomor: XVII/MPR/1998 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”⁶⁵

Menjadi persoalan kemudian adalah apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.?. untuk

⁶⁵ Koenadi Hardjo Soemantri, Hukum Tata Lingkungan, edisi kedelapan, cetakan kedelapan belas, Gajahmada University Press, Juni 2005:638.

menjawab permasalahan tersebut diatas, kiranya dapat diukur dari pendapat Moenadjad Danusaputro, yang dimaksud dengan lingkungan hidup sebagai berikut :

“adapun lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan daya serta kondisi-termasuk didalamnya manusia dengan segala perilakunya-dimana manusia berada, yang mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatannya serta jasad hidup lainnya”

Selanjutnya dikatakan pula, dalam pengertian tersebut, tampak jelas bahwa manusia itu dilihat dari paham lingkungan, nyatanya hanya merupakan salah satu unsur belaka dari lingkungan hidup. Pengertian dari kesadaran tersebut justru menunjukkan keblikan anggapan, bahwa manusia itu memiliki hak mutlak untuk mengusai lingkungan, seperti terdapat pada asumsi sementara orang sebagaimana digambarkan dimuka. Asumsi dimuka telah melandasi anggapan bahwasanya manusia dapat menggunakan sumber-sumber daya lingkungan itu seenaknya dan semaunya saja, sesuai dengan napsu keinginannya, hingga menumbuhkan orientasi pengguna (=Use Orientations) terhadap lingkungan dengan tujuan untuk “mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dari diri sendiri, yang ingin dicapainya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya” sebagaimana melandasi pola Exploitasi sumber-sumber daya lingkungan.⁶⁶

Perlu ada transparansi dan keterbukaan peran serta masyarakat mengenai tata ruang dan pemanfaatanya, batas-batas wilayah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tata ruang. Akses informasi tata ruang dan implementasinya silit dikontrol oleh masyarakat umum, apakah tata ruang dan pemanfaatanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶ Moenadjad Danusaputro, *Hukum lingkungan, buku III regional*, Bina Cipta 1982:157.

Masalah tata ruang kawasan Industri Candi sebagaimana diuraikan dalam draft RKL. Kawasan Industri Candi oleh PT IPU Semarang, antara lain,

“mengingat lahan yang ada merupakan daerah perbukitan, sedangkan kawasan Industri memerlukan daerah datar guna kelancaran mobilitas kendaraan besar, maka kawasan perbukitan tersebut perlu diratakan. Kegiatan perataan tersebut menimbulkan permasalahan baru sebagaimana disebutkan di atas, yaitu timbulnya lereng terjal pada pinggiran kawasan, sehingga rawan longsor serta menjadi daerah akumulasi air hujan. Penanganan masalah ini dilakukan melalui kegiatan b dan c yang akan diuraikan dibawah.

Disisi lain penyusunan kavling untuk berbagai jenis kegiatan industri memerlukan penataan ruang yang baik, sehingga terjadi keseimbangan komposisi pengguna lahan sesuai kriteria dengan tidak meninggalkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan estetika lingkungan.⁶⁷

Draft penataan ruang yang dibuat oleh PT IPU dalam rangka pembangunan kawasan Industri ini, tepatnya dilakukan setidaknya-tidaknya paling lambat pada bulan Januari 2006, penataan ruang ini dilakukan dengan cara Cut and Fill wilayah tertentu, yang berarti bahwa, pelaksanaanya dilakukan dengan penghilangan daerah-daerah kemiringan tertentu, untuk dibuat rata. Cut and fill yang dilakukan ini, apakah tidak menimbulkan permasalahan ?.

Untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan atau tidaknya, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- penelitian tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen draft RKL kawasan Industri Candi

⁶⁷ PT. Indo Perkasa Usaha Tama, draft dokumen pengelolaan lingkungan, Januari 2006:L1-5.

dibuat pada kurun waktu 2005 sampai dengan Januari 2006.

- pada tanggal 7 Juni 2004 perda No.15 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang kota X meliputi wilayah kecamatan Ngaliyan dan Wilayah Tugu Semarang, (lampiran II huruf d fungsi Konservasi yang menerangkan sebagai berikut :

“d.Fungsi Konservasi.

Fungsi konservasi ditetapkan pada kawasan pertanian beririgasi teknis (kelurahan Mangkang kulon, dan Mangunharjo) hutan (kelurahan Podorejo, Gondoriyo, Wonosari, dan wates) dan lahan dengan kemiringan diatas 40 % yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan.⁶⁸

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, dapat digunakan analogi sebagai berikut:

* kapan Analisis Dampak Lingkungan yang dinyatakan Batal oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup itu dibuat oleh PT IPU ?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, dapatlah dikaji Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁸ Lampiran II, Peraturan Daerah Kota Semarang, No.15 tahun 2004,: IV-3.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pembangunan atau suatu kegiatan, terlebih dahulu harus didahului dengan melakukan Kajian Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Pemerintah ini, yang berarti bahwa kegiatan Analisis Dampak Lingkungan terhadap rencana kegiatan harus mendahului, setelah Analisis Dampak Lingkungan selesai dilakukan, baru dilakukan tahapan pengerjaan proyek.

Menurut fakta dilapangan, dikawasan kelurahan Purwoyoso, kegiatan pembangunan phisik dimulai pada tahun 1996, sedangkan di wilayah kelurahan Ngaliyan Semarang, sampai dengan ditulisnya penelitian tesis ini, walaupun sampai dengan tanggal 7 Januari 2005, masih dilakukan revisi Kajian Analisis Dampak Lingkungan dan belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah kota semarang, kegiatan pembangunan masih tetap saja berlangsung, tanpa ada penegakanhukum dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin (Pemerintah Kota semarang).

1) Implementasi Ijin Lokasi

Ijin lokasi, adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan yang akan menanamkan modalnya di kawasan tertentu, ijin lokasi dalam peraturan Menteri

Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor: 2 tahun 1999, pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

1. ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Ijin lokasi termasuk menentukan lokasi yang boleh digunakan untuk usaha penanaman modal yang tidak boleh bertentangan dengan Tata Ruang yang ditentukan oleh pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Luas wilayah yang diijinkan untuk digunakan sebagai kawasan Industri menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) ijin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu, sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:

b. untuk usaha kawasan Industri : 1 Propinsi :400 ha, seluruh Indonesia : 4000 ha.

Kawasan industri Candi yang diprakarsai oleh PT.IPU di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang, berdasarkan:

- a. persetujuan Gubernur Jawa Tengah, melalui suratnya nomor: 060.1/09293, tanggal 15 Maret 1991, diijinkan seluas 300 ha.
- b. Persetujuan Departemen Perindustrian RI, melalui suratnya nomor: 547/SJ/IX/1992, tanggal 2 September 1992, telah diijinkan untuk menggunakan lahan seluas 300 ha.
- c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, melalui suratnya nomor: 2599/MPP/7/1996, tanggal 19 Juli 1996, telah menyetujui menggunakan lahan seluas 300 ha.
- d. Surat persetujuan Ketua BKPM nomor :03/11/PMDN/1991, tanggal 02 Januari 1991, nomor Proyek : 9490/8310-03-05513, telah disetujui penggunaan lahan seluas 300 ha.
- e. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, nomor: 400.08/82/11/1995, tanggalPebruari 1995, tentang perpanjangan ijin lokasi pembangunan Kawasan Industri Candi, telah diberikan ijin perpanjangan lokasi seluas 300 ha.
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang, nomor 15 tahun 2004 tentang Rencana detail Tata Kota Semarang, pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pasal 15, untuk setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut:

a. blok. 1.1

1. jaringan jalan dan utilitas 97.580 ha
2. konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya 105.191 ha.

Yang dimaksud dengan blok 1.1 adalah blok yang diperuntukkan pengaturan tata ruang di wilayah hukum kecamatan Ngaliyan.

g. Lampiran II, Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 15 tahun 2004 huruf D yang berbunyi sebagai berikut:

“D Penghijauan.

1. Meningkatkan penghijauan pada kawasan-kawasan khusus kelerengan 15-40% yang memerlukan jalur hijau untuk menjaga kestabilan lingkungan.
2. Tetap menjaga dan meningkatkan jalur dan kawasan hijau yang telah ada.

Bahwa dari beberapa dasar hukum tersebut diatas, telah ditetapkan:

1. Untuk Kawasan industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU Semarang menempati posisi di wilayah hukum Kecamatan Ngaliyan Semarang, meliputi 3 (tiga) wilayah kelurahan, masing-masing wilayah Purwoyoso, wilayah kelurahan Ngaliyan, Wilayah kelurahan Babankerep.

2. Kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU Semarang, telah ditetapkan pemanfaatan ruang seluas 300 ha.
5. Kawasan Industri Candi di jalan Gatot subroto Ngaliyan, yang diprakarsai oleh PT.IPU semarang menempati daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 15%-40%, kelerengan ini menurut Perda 15 tahun 2004, harus dijadikan lahan konservasi, dan harus dipertahankan.

Menjadi persoalan tersendiri adalah, pada tanggal 7 Juni 2004, perda yang mengatur tentang tentang bukit dengan kelerengan antara 15%-40% harus dipertahankan. Kemudian pada awal bulan Desember 2005,PT.IPU sebagai pemrakarsa kawasan ini telah membuat perjanjian dengan warga RW VI perumahan Sulanji Atas menangkau penghijauan, pencegahan Polusi Udara, memberikan kompensasi-kompensasi. Pada saat perjanjian ini dibuat bukit-bukit dengan kelerengan 15%-40% masih cukup aman, namun pada saat Tesis ini dibuat lereng-lereng itu sudah tidak ada lagi.

3. Pengawasan Perijinan.

Pembangunan Kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU, secara Administratif, telah dilakukan prosedur-prosedur formal dari tingkat pusat hingga tingkat Daerah, dalam hal mekanisme perijinannya, termasuk juga adanya persyaratan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Menjadi persoalan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pembangunan kawasan Industri Candi itu seperti apa ?. untuk menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu ada ukuran dan pemahaman yang jelas, apa dan bagaimana Amdal itu?.

Pengertian Amdal menurut **Munn** (1979) mendefinisikan sebagai definisi tentang Amdal secara jelas menyatakan bahwa,:

Amdal adalah suatu alat untuk memperkirakan, menilai dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek.⁶⁹

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 23 tahun 1997, tentang Undang-undang Pengelolaan Lingkungan hidup, yang berbunyi sebagai berikut:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu

⁶⁹ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, cetakan kedua Mei 2004:158.

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/atau kegiatan.

Selanjutnya pengertian amdal secara komprehensif dikemukakan sebagai berikut:

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah keseluruhan dokumen Studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL), dari pengertian tersebut, Analisis Dampak Lingkungan merupakan salah satu dokumen dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).⁷⁰

Masih dalam bukunya Gatot P Soemartono, dituliskan menurut Arman Hakim (1992)

Amdal adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan Amdal sangat tergantung pada institusi dan prosedur kerjanya. Untuk itu Undang-undang seharusnya tidak hanya mengatur tentang sistem Amdal, tetapi juga menyebutkan bidang-bidang dan jenis proyek serta kegiatan-kegiatannya. Tentang Effektivitasnya yang dikemukakan oleh Arman Hakim tersebut, pada dasarnya, telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor: 51 tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.⁷¹

Fungsi Amdal, adalah fungsi kontrol terhadap pengelolaan suatu kawasan yang dibangun dengan cara merubah kondisi-kondisi tertentu yang dapat berdampak pada pengaruh negatif lingkungan hidup sekitar. Amdal

⁷⁰ Ibid 158.

⁷¹ Ibid 159.

diperoleh melalui penelitian-penelitian yang mendalam yang dijadikan acuan yang transparan bagi masyarakat sekitar.

Kawasan Industri candi yang diprakarsai oleh PT IPU, dalam dokumen Kerangka acuan kajian analisis Mengenai Dampak lingkungan (Ka-Kadal) mencantumkan tujuan studi Kadalnya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi komponen-komponen kegiatan Industri candi PT IPU yang telah dan akan berjalan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup, terutama yang terkena dampak besar dan penting akibat kegiatan kawasan Industri Candi PT.IPU yang telah dan akan berjalan.
3. Mengevaluasi dampak besar dan penting Kawasan industri Candi PT IPU yang telah terjadi terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan yang telah berjalan.
4. Memperkirakan dan mengevaluasi dampak besar dan penting kawasan Industri Candi PT IPU yang akan terjadi akibat kegiatan yang akan berjalan.
5. Merekomendasikan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) Kawasan Industri candi.PT IPU.

6. Merekomendasikan rencana pemantauan lingkungan (RPL) kawasan Industri Candi PY.IPU.⁷²

Kemudian timbul persoalan, seberapa kuatkah Draft Ka-Kadal yang telah “disahkan” oleh pemerintah untuk mengikat kepada pemrakarsa untuk dilaksanakan secara konsekuen, dan seberapa kuat nilai-nilai peranserta masyarakat untuk mengontrol draft yang telah disusun (Kadal) tersebut, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dapat terkontrol dengan baik ?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami dengan benar apa sebenarnya Kadal itu. Kadal (kajian analisis Dampak Lingkungan) adalah dokumen yang mencakup seluruh studi dari suatu kawasan tertentu, atau hal-hal yang secara alamiah terkandung didalam kawasan itu, yang dapat dimanfaatkan untuk perlindungan ekosistem. Adapun tujuan dari Kadal adalah dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan lingkungan dan lingkungan hidup yang terkena dampak dari pembangunan suatu kawasan.

Kadal menurut **Ninie Suparni** dalam bukunya dikemukakan sebagai berikut:

⁷² Draft kajian analisis dampak lingkungan (Kadal) Kawasan industri Candi (KIC) PT.IPU, 2006:1-9

“Didalam undang-undang, baik dalam undang-undang tahun 1982 maupun dalam NEPA 1969, dampak diartikan sebagai pengaruh aktifitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dimengerti karena tujuan Undang-undang tersebut adalah untuk melindungi lingkungan terhadap pembangunan yang tidak bijaksana. Naun pada lain pihak harus dilihat bahwa di Indonesia sebagian besar kerusakan lingkungan Justru disebabkan oleh kurangnya bahkan tidak adanya pembangunan. Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor penyakit dan keadaan sanitasi lingkungan yang rendah adalah contoh diantara banyak contoh. Untuk itu mengatasinya harus dengan mengadakan pembangunan.”⁷³

Selanjutnya dalam bagian piagam Hak Asasi Manusia (bagian tak terpisahkan dari Tap MPR/XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia) pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”⁷⁴

Perlindungan masyarakat akibat dari pembangunan yang dilakukan dalam kawasan ini, dalam bentuk informasi, dan data yang jelas serta akurat harus ada peluang langsung kepada publik untuk mengontrol kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pembangunan kawasan Industri Candi di Jalan Gatot subroto Ngaliyan Semarang tidak termasuk ijin

⁷³ Niniek Suparni, Pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan, Sinar Grafika 1994:93.

⁷⁴ Koenadi HardjoSoemantri, Hukum Tata Lingkungan, edisi ke delapan, cetakan kedelapan belas, gajahmada University Press, 2005:638.

pemanfaatan / pembuatan Sumur Bawah Tanah dikawasan ini. namun kenyataannya sampai dengan saat ini (ditulisnya Tesis ini), sumur Air Bawah Tanah (Artetis) yang dibuat dikawasan ini telah mencapai angka 90an buah sumur artetis, masing-masing dengan kedalaman antara 80 meter hingga 133 meter, yang berarti bahwa pada beberapa wilayah pemukiman yaitu di perumahan Sulanji atas (RW VI) dan pokok Pondasi (RW VII) yang posisinya lebih tinggi dari wilayah kawasan ini dapat dipridiksi akan mengalami krisis air bersih, apabila pemanfaatan sumur Air Bawah Tanah ini tidak diatur dan dikendalikan oleh pihak yang berwenang bersama-sama dengan masyarakat terkena dampak di sekitar kawasan Industri ini.

4) Peran serta masyarakat

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

(2) setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberi informasi yang benar dan akurat mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian pengertian pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 2 undang-undang ini, yang berbunyi sebagai berikut:

2. pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Yang menjadi masalah dalam pembahasan ini adalah apa tolok ukur dan wewenang masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan kontrol kepada pengusaha, serta bagaimana nilai dari hasil kontrol masyarakat itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sebelum sampai kepada pembahasan tentang tolok ukurnya, perlu terlebih dahulu dipertanyakan seberapa transparannya pemrakarsa pembangunan kawasan industri candi yang diprakarsai oleh PT IPU, menyampaikan secara terbuka kepada publik, terutama kepada masyarakat terkena dampak dengan ukuran yang jelas yang harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar, bukan berarti informasi yang sampai kepada masyarakat asal sampai saja, tetapi kejelasan yang benar agar tidak timbul masalah dikemudian hari, sehingga daya kontrol masyarakat terkena dampak benar-benar tepat sasaran.

Menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pemrakarsa pembangunan suatu kawasan, ketika kepedulian masyarakat, kepedulian politik masyarakat masih sangat rendah terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup ini. menjadi kebiasaan yang sering

dijumpai oleh pemrakarsa dalam menyampaikan hasil studinya hanya sebatas hal-hal yang normatif saja, Setelah proyek berjalan penyimpangan demi penyimpangan juga leluasa dilakukan.

Pembangunan Kawasan Industri Candi oleh PT. IPU melakukan sosialisasi melalui ceramah - ceramah dan penyebaran angket kepada publik saja, sementara Kajian-kajian studi lingkungan hidup yang sebenarnya tidak mungkin disampaikan secara detail yang dapat dipelajari oleh masyarakat terkena dampak menjadi kebiasaan mahalnya sebuah Dokumentasi hasil studi kelayakan lingkungan dan rencana kelola lingkungan untuk sampai kepada masyarakat terkena dampak.

Masyarakat terkena dampak mengalami kesulitan untuk mengetahui tentang :

1. berapa jumlah perusahaan yang akan membuka perusahaannya;
2. Jenis usaha apa saja yang dibolehkan membuka usahanya di Kawasan ini;
3. Dimana saja penempatan usaha menurut jenisnya;
4. Bagaimana perusahaan beroperasi, dan bagaimana pemenuhan kebutuhan Air dan air bersih di Kawasan ini;
5. Bagaimana sistem pengelolaan lingkungan dimasing-masing perusahaan itu harus dilakukan.

Kejujuran dan keterbukaan informasi sulit dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang “berwenang”, karena alasan klasik mahalanya resiko dan biaya yang harus ditanggung oleh pemrakarsa, dan pihak-pihak lain.

Kekeliruan memahami transparansi tidak jarang harus dibayar mahal oleh pemrakarsa dan pihak-pihak lain yang terkait, kemahalan itu antara lain ketika pengerjaan proyek berjalan, timbul protes dan perlawanan dari masyarakat, karena kurang transparannya informasi yang harus diberikan kepada publik.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Industri candi ini, sangat terbatas untuk mendapatkan akses informasi, semestinya informasi itu dapat diperoleh secara terbuka sehingga masyarakat terkena dampak dapat memahami, serta kepastian informasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan dngan ukuran itikad baik dari pemrakarsa, keterbukaan itu dapat juga dilakukan melalui:

1. Membuka Web side fasilitas internal.
2. Menyebarkan hasil kajian analisis dampak lingkungan kepada masyarakat terkena dampak.
3. Membentuk wadah yang menampung masukan dan aspirasi masyarakat.

Akses informasi pembangunan Kawasan Industri Candi di jalan Gatot subroto ngaliyan semarang, yang seharusnya di akses secara terbuka kepada semua pihak,

ternyata menjadi bahan yang sengaja tidak boleh diketahui oleh masyarakat termasuk kepada Konsultan kawasan Industri candi ini. Keadaan ini terungkap melalui kegiatan musyawarah antara warga RW.VI ngaliyan dengan PT. IPU tanggal 03 april 2007 bertempat dibalai Kelurahan Ngaliyan semarang. Informasi disampaikan oleh Bp. Ir. Sapto cahyono Bapedalda Kota Semarang. Adapun informasi itu adalah sebagai berikut :

“ Kadal PT. IPU tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, informasi yang diperlukan oleh konsultannya, tidak diberikan oleh manageman PT. IPU, hingga saat ini, menyebabkan kajian Amdalnya tidak bisa dilakukan, luas tanah kawasan Industri Candi sampai dengan saat ini telah lebih dari 300 ha. Dari ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT. IPU.”

Aspek Hukum Pembngunan Kawasan Industri candi menurut Hukum lingkungan adalah sebagai berikut:.

Hukum lingkungan menurut Moenadjad Danu Saputro, adalah, Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan (hidup), disebut hukum lingkungan.⁷⁵

⁷⁵ Munadjad Danusaputro, Hukum Lingkungan buku II Nasioanl, Binacipta, cetakan kedua Pebruari 1985:31

Sedangkan menurut Koesnadi Harjo Soemantri, dalam bukunya mengatakan, “ dengan memperhatikan uraian-uraian diatas (para pakar) serta perkembangan akhir-akhir ini, maka menurut hemat saya, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Hukum Tata lingkungan
2. Hukum perlindungan lingkungan
3. Hukum kesehatan lingkungan
4. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya).
6. Hukum lingkungan transnational / Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara).
6. Hukum sengketa lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti rugi, dan sebagainya).

Aspek-aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dimasa-masa yang akan datang.⁷⁶

Sedangkan **Andi Hamzah**, dalam bukunya menjelaskan, “ Dalam literatur bahasa Inggris hukum lingkungan disebut *Enveronmental law*.

⁷⁶ Koesnadi Hardjo Soemantri, Hukum tata lingkungan, gajahmada University Press, edisi kedelapan, cetakan kedelapan belas, juni 2005:44-45

Orang Belanda menyebutnya dengan *Milliurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya dengan *Unwel treecht*, Prancis menurut *Droit deenvironment*. Malaysia dengan bahasa melayu memberi nama *Hukum alam sekitar*, suatu istilah berbau harafiah. Semua istilah perbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengrusakan, dan perusakan (Verontreiniging, uitputting en aan tasting) lingkungan.⁷⁷

a. Aspek perijinan pembangunan Kawasan Industri Candi.

Dari beberapa dokumen tersebut diatas, dapatlah dikaji tentang:

1) Aspek legalitas perijinan.

Aspek legalitas periiijinan pembangunan kawasan industri candi secara umum berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah, nomor: 547/SJ/IX/1992, tanggal 2 september 1992 adalah dasar hukum yang berupa perijinan pembangunan kawasan Industri candi sah beroperasi

Namun setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 2 Oktober 2003, berdasarkan surat Kepala Bapedalda nomor :660.1/512, tanggal 1 Oktober 2005, yang berisi tentang penundaan pengesahan dokumen Amdal, legalitas perijinan PT. IPU yang membuka lahan untuk

⁷⁷ Andi Hanzah, *Penegakan hukum lingkungan*, sinar grafika, 2005:7

Kawasan Industri telah bermasalah, selanjutnya berdasarkan Kajian analisis dampak lingkungan yang dibuat oleh PT. IPU sampai dengan bulan Januari 2006 lain :

1. Tujuan pembangunan Kawasan Industri,

Tujuan Pembangunan kawasan Industri Candi adalah menyediakan lahan industri yang terintergrasi dalam suatu Kawasan dengan pengelolaan Kawasan yang menyangkut perijinan, utilitas, pengelolaan dan pemantauan lingkungan walaupun ada pencabutan berdasarkan surat Kepala Bapedalda Kota Semarang dan telah dinyatakan untuk direvisi kadalnya sebelum melanjutkan pembangunannya, namun proyek masih berlangsung pembangunannya namun, berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian dampak lingkungan daerah Kota Semarang, nomor : 660.1/512, tanggal 02 Oktober 2003, PT. IPU selaku pemrakarsa Kawasan Industri Candi telah diwajibkan merevisi Amdal terdahulu, yang disebabkan oleh pembangunan Kawasan Industri ini telah melanggar site plan yang dibuat oleh pemrakarsa. Kemudian oleh Pemerintah Kota Semarang mendasari pada perubahan site plan Kawasan Industri candi, dinyatakan batal Kajian Analisis dampak lingkungannya. Namun dengan pembatalan tersebut kegiatan pembangunan Kawasan ini masih berlanjut, Amdal Kawasan Industri candi yang harus memuat hasil Kajian, Kemudian dengan kajian Amdal itu dijadikan

bahan pertimbangan apakah suatu kajian yang telah dilakukan oleh pemrakarsa itu memungkinkan untuk diijinkan atau tidak diijinkan untuk membuka suatu usaha. Namun dengan penetapan Pemerintah yang telah membatalkan kajian analisis dampak lingkungan yang telah dibuat oleh pemrakarsa (PT. IPU) ini yang kemudian diperintahkan atas nama undang-undang (PP 27/99) untuk merevisi kajian Analisis dampak lingkungannya, namun sampai saat ini kajian ini belum dibuat, tidak menimbulkan masalah proyek jalan terus.

b. Aspek perlindungan Sumber Daya alam

Pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ayat (!) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menangulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang ini adalah : Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengundang makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam mengembangkan budaya

bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan dibidang lingkungan hidup.

Bahwa dari ketentuan pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut diatas, diharuskan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Termasuk juga menjaga kelestarian ekosistem ini, fungsi lingkungan hidup yang didalamnya harus adanya upaya menjaga dan mempertahankan daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah konservasi. Perlindungan terhadap lingkungan hidup ini juga diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun didalam Kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup telah diwajibkan membuat analisis dampak lingkungan hidup lagi.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemanfaatan lingkungan hidup Kawasan.

Pengelolaan dampak lingkungan hidup, di Kawasan industri Candi yang harus dilakukan oleh pemrakarsa Kawasan ini yaitu PT. IPU Semarang,

antara lain harus mentaati ketentuan peraturan hukum yang berlaku, yaitu tentang larangan pengeprasan bukit, larangan memperluas daerah tambang galian C, pengaturan secara transparan kepada publik tentang pemanfaatan sumber daya air di Kawasan Industri candi, penyegeraan melakukan penghijauan Kawasan sesuai dengan fungsinya.

c. Aspek pengrusakan struktur tanah.

Kawasan industri candi, dulunya merupakan Kawasan perbukitan dengan kelerengan antara 15 % lebih, namun semenjak keluarnya ijin dari Pemerintah untuk mengeksploitasi Kawasan ini, sejak 1995 telah dilakukan Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, seolah tanpa daya kontrol dari penguasa setempat.

Penambangan galian c di kawasan ini dilakukan sampai dengan tulisan Tesis ini dibuat, bahan galian ini digunakan untuk mereklamasi pantai Marina.

Daerah Kawasan Industri candi yang dulunya bukit-bukit, telah berubah menjadi area yang sangat terbuka, tanah subur, daerah resapan atau konservasi telah hilang, kemudian berubah menjadi dataran rendah, dalam perda 15 tahun 2004 Wilayah Kawasan industri ini masuk dalam BWK X, pada daerah dengan kelerengan 15-40 %

dijadikan daerah konservasi atau daerah hijau (bab IV –1,2 lampiran perda 15/2004)

Bidang belincir telah menjadi ancaman bagi kesuburan tanah, yang menyebabkan hilangnya tingkat kesuburan tanah, dengan hilangnya tingkat kesuburan tanah, akan berakibat pada hilangnya fungsi penghijauan, disamping faktor-faktor lain, misalnya terjadinya resiko hujan zat asam.

d. Aspek kerusakan Ekosistem

Kawasan Industri candi yang dulunya adalah daerah pertanian tradisional, hutan tradisional, yang difungsikan oleh masyarakat sekitar untuk kepentingan wisata alam, kini tinggal kenangan belaka. Dulunya sebagai wilayah perlindungan ekosistem, saat ini telah tiada , fungsi telah berubah.

Di wilayah hukum Kecamatan Ngaliyan, melalui perda 15 tahun 2004, telah ditetapkan masuk dalam ketentuan bagian wilayah kota X (BWK X) yang difungsikan untuk Kawasan Industri dan pergudangan. “ sentra pengembangan kawasan industri di kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok industri yang ada dibagian barat (BWK X) dan kelompok yang ada dibagian timur (BWK III). Fungsi Industri di

BWK X mencakup industri berat, industri sedang maupun industri kecil.

Pengembangannya diarahkan pada kawasan sebelah utara wilayah perencanaan meliputi Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Tugurejo. Sedangkan pada Kecamatan Ngaliyan dipusatkan pada Kelurahan Tambakaji, dan Kelurahan Wonosari.

Dalam Kawasan industri tersebut terdapat kegiatan pergudangan yang berfungsi untuk menunjang aktifitas industri. “ (Bab III-37 lampiran II perda 15/2004)

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, secara jelas menunjuk bahwa di Kecamatan Ngaliyan khususnya di Kelurahan, Tambakaji, dan kelurahan Wonosari hanya dijadikan Kawasan penyangga Kawasan Industri saja, sehingga tidak dibenarkan bahwa selain Kawasan itu, tidak ada lagi penambangan galian c, karena kegiatan ini telah dilarang oleh Pemda Semarang berdasarkan lampiran II perda 15/2004, III/12. sektor pertambangan “ sektor pertambangan di BWK X terdapat di wilayah Kelurahan Tambakaji dan kelurahan-kelurahan lain disepanjang jalan Raya Semarang- Kendal yang berupa bahan tambang golongan c seperti batu padas. Namun sesuai dengan arahan dan rencana tata ruang, pertambangan bahan tambang golongan c yang

berada di BWK X sudah tidak akan dikembangkan lagi. “

Ketentuan itu mengatur tentang larangan dilakukan penambangan bahan galian golongan c berlaku sejak tanggal 7 Juni 2004, ketika perda No.15 tahun 2004 itu dinyatakan berlaku kepada setiap orang, khususnya yang melakukan kegiatan di Zona-zona yang telah diatur. Namun sampai dengan ditulisnya Tesis ini kegiatan penambangan galian golongan c masih saja dilakukan. Kemudian timbul pertanyaan , apakah perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum apa tidak, kalau perbuatan itu termasuk dalam klasifikasi melawan hukum , jenis deliknya apa, dan bagaimana seharusnya perbuatan melawan hukum itu dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu perlu dirumuskan pertanyaannya sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan menggali di daerah galian c yang sudahj dinyatakan dilarang itu termasuk perbuatan melawan hukum?

Maka rumusannya jawabannya adalah : pasal 1 angka 14 UU No.23 tahun 1997 tentang UULN yang berbunyi sebagai berikut.”

“14. perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau kegiatannya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang ini menyatakan perusakan lingkungan hidup itu adalah melakukan aktifitas yang merubah keadaan alam senyatanya, kemudian dengan perubahan itu berakibat desfunksinya lingkungan hidup. Kemudian pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, yang menyatakan “ (1) barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah).

Keadaan dilapangan perlu diteliti disfungsi dari keadaan alam senyatanya yang diharapkan itu yang bagaimana ? ukuran dan fungsi disetiap lokasi yang berbeda tentu fungsinya juga berbeda-beda :

- Bukit yang dipotong, dapat di fungsikan sebagai barrier terhadap tekanan angin dan pencegah bau tak sedap karena udara

pembawa bau samapah dari TPA Jati barang.

- apabila belum dilakukan pemotongan bukit dapat difungsikan sebagai kawasan konservasi.

Selanjutnya pasal 3 PP 27/1999 tentang analisis dampak lingkungan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - (a) pengubahan bentuk alam dan bentang alam.
 - (b) eksploitasi sumber daya alam baik yang ` terbaharui maupun yng tidak terbaharui.
 - (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemrosotan sumber daya alam dalam pemanfaatanya.
 - (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
 - (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelstarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atu perlindungan cagar budaya.

- (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik.
 - (g) penerapan teknologi yng diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
 - (h) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
 - (i) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
- (2) jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat menteri lain dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang terkait.

Kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU, oleh Pemerintah kota Semarang, berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, nomor: 660.1/512, tanggal 2 Oktober 2003, yang ditujukan kepada Pimpinan PT IPU, yang berbunyi:

“ berkenaan dengan kegiatan yang saudara lakukan di kawasan lingkungan Gatot subroto, bersama ini diberitahukan agar saudara segera merevisi/mereviu/Amdal, RKL,RPL yang sudah dimiliki”.

Bahwa berdasarkn surat Bapedalda tersebut diatas, dokumen Kajian analisis Dampak

Lingkungan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdampak pada pelaksanaan pengerjaan proyek kawasan Industri Candi. Selanjutnya satu tahun berikutnya yaitu berdasarkan Surat Ka Bapedalda nomor: 660.1/856, tanggal 8 Desember 2004, yang ditujukan kepada Direktur PT.IPU, perihal pemberitahuan keharusan membuat Studi Analisis Dampak Lingkungan dalam bentuk Kadal.

e. Aspek Penghijauan di Kawasan Industri Candi.

Masalah lingkungan hidup, yang kian merosot kualitasnya, mulai tahun 1950an, masalah ini telah mendapat perhatian serius, yang disebabkan oleh pencemaran akibat penggunaan pestisida yang tidak terkendali. Supriadi dalam bukunya, mengatakan :

“sejak tahun 1950an masalah lingkungan mendapatkan perhatian tidak saja dari para ilmuwan, melainkan juga masyarakat itu ialah terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan serta pestisida. Rentetan kejadian tersebut membuat para politisi dan masyarakat umum seakan tersentak melihat kerusakan lingkungan yang mulai parah. Adapun kejadian tersebut antara lain:

pada tahun 1940an dan tahun 1950an terjadi pencemaran oleh air raksa (HG) dari limbah industri dan oleh Cadmium (CD) dari limbah pertambangan Seng (Zn), pencemaran itu telah

menyebabkan penyakit keracunan yang berturut-turut disebut penyakit minamata, dan penyakit itai-itai.⁷⁸

2. Aspek Pengakkan Hukum

a. Penegakkan terhadap hukum Agraria / Pertanahan.

Pembangunan Kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang, oleh PT IPU dibagi dalam empat phase, masing-masing phase 1 telah beroperasi, phase 2 telah beroperasi, phase 3 telah beroperasi, phase 4 tidak ada dalam gambarnya PT IPU, phase 5 masih dalam rencana, tanpa diketahui oleh Pemerintah Kota Semarang, (illegal), yang berarti bahwa izin yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Semarang pada tahun 2005 tidak mencantumkan phase 5 tersebut, masalah rencana yang oleh PT IPU dibagi dalam Phase-phase tersebut, sangat erat sekali kaitannya dengan ketentuan hukum yang menyangkut masalah izin penguasaan pertanahan dan perlindungan hak-hak masyarakat sekitar kawasan ini. masalah itu menyangkut kepada masalah izin penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 7

⁷⁸ Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 2006:53.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut:

“untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”

Yang dimaksud dengan melampaui batas ukuran “melampaui batas” itu yang bagaimana, untuk menjawab masalah tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 5 tahun 1998, tentang Izin Lokasi dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar, yang berbunyi sebagai berikut :

“angka 1. batas luas maksimum penguasaan tanah untuk usaha skala besar bagi satu badan hukum atau kelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu dalam satu profesi adalah:

b. Kawasan Industri : 400 ha

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah, siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam penegakkan hukum di bidang izin penguasaan tanah ini. pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor :32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi :

j. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Sebagaimana peran dari pelaksana otonomi daerah, tentang kewenangannya untuk melakukan pengawasan, maka selama Peraturan belum menentukan siapa yang harus menegakkan hukum dalam hal penguasaan tanah. Dalam hal pelanggaran hukumnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran, maka pemerintah daerah yang harus menegakkan hukum ini.

b. Penegakan Terhadap Hukum Lingkungan

Pembangunan Kawasan Industri Candi ini, erat sekali dengan ketentuan hukum pertanahan, dan hukum lingkungan hidup, antara lain ada tidaknya pelanggaran hukum lingkungan, kemudian apa kriteria dari pelanggaran hukum lingkungan itu, terlebih dahulu perlu diperjelas, siapa saja yang dapat disebut sebagai aparat penegak hukum dalam hukum lingkungan ini.

Pasal 40 Undang-undang nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di

Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

Dapatlah dipastikan bahwa dalam perkara pelanggaran hukum ini, ada dua institusi negara sebagai penyidik, masing-masing adalah penyidik Polri, dan PPNS di Dinas / Instansi yang bersangkutan. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum Lingkungan itu. Pelanggaran hukum lingkungan setelah keluarnya Undang-undang nomor : 23 tahun 1997, ada 2 (dua) tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) dalam rumusan pasal 41 ayat (1) diatas, yaitu :

- 1) Pencemaran lingkungan hidup (Environmental Polutions) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.
- 2) Perusakan lingkungan hidup (Environmental damage) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.⁷⁹

Selanjutnya apabila pengertian / perumusan diatas dirinci, terlihat unsur-unsur yang sangat luas, yaitu :

- * Pencemaran lingkungan hidup (Environmental Polutions) menurut pasal 1 ke 12 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakkan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Citra Afitya Bakti, Bandung 2001:88.

(1) masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia.

(2) Sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

* Perusakan lingkungan hidup (Environmental Damage) menurut pasal 1 ke 14 mengandung unsur sebagai berikut :

(1) Tindakan

(2) Yang menimbulkan perubahan (langsung/tidak langsung) terhadap sifat fisik/atau hayatinya.

Catatan: istilah “sifat fisik dan/atau hayati” lebih tepat/tegas ditulis “fisik dan/atau hayati lingkungan” seperti rumusan lama dalam pasal 1 ke 7 Undang-undang nomor 4 tahun 1982.⁸⁰

Dalam ketentuan tentang pelanggaran hukum tindak pidana lingkungan hidup diperlukan syarat unsur pasal untuk dapat memenuhi syarat adanya pelanggaran ini, adalah :

- Adanya subjek hukum yang melanggar
- Adanya perbuatan melanggar hukum lingkungan
- Harus adanya bukti-bukti kongret adanya perubahan sifat fisik/hayati.

⁸⁰ Ibid : 89

Untuk pembangunan kawasan Industri ini, apabila telah ditemukan perubahan-perubahan yang bersifat fisik dan hayati.

Untuk menemukan unsur adanya perubahan sifat fisik dan hayati pada pembangunan kawasan ini antara lain:

- a. ada 3 bukit yang sudah “dihilangkan” dengan rencana/ disengaja oleh PT IPU.
- b. adanya penebangan pohon yang berfungsi sebagai sarana penghijauan.
- c. adanya daerah konservasi yang hilang
- d. adanya peningkatan suhu udara yang semakin panas.

Dari fakta tersebut diatas, masalah berikutnya adalah mekanisme penegakkan hukum dalam perkara ini.

Keith Hawkins, mengemukakan, bahwa penegakkan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan Penal Style sebagai karakteristik.

Block, sebagaimana dikutip oleh Hawkins, menyatakan, bahwa concilatory style itu Remedial, suatu metoda social *repair ang necessary to amelirate a bad situations*. Sifat fisik adalah accusatory, hasilnya binary, yaitu *All or nothing, punishment or nothing* (Hawkins, 1984:3-4) didalam *notice hand having milliurecht 1981 di negeri Belanda*, penegakkan hukum disertakan sebagai *het door controle en het toepasen (af dregen daarmee) van administratiefrechtilejke, sllaf inde warden negeleef*.

Dalam hukuman dengan kontrol ini termasuk pengawasan pemerintah atas peraturan. Maupun penyidikan dari tindakan yang melanggar hukum.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi Administratif atau sanksi pidana merupakan bagian Akhir (ssluit Stuuk) dari penegakan Hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan asaran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan (melliurecht 1990 : 389 –399). Dari uraian tersebut diatas, menjelaskan bahwa langkah-langkah awal yang harus dilakukan dengan cara preventif harus dinyatakan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dalam hal ini dalam hal pembangunan Kawasan Industri Candi ini Pemerintah tidak bertindak untuk menegakkan hukum. Yang menjadi masalah dalam penegakan hukum pada pembangunan Kawasan ini, dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan sangat beragam dapat digambarkan bahwa total masyarakat yang tidak paham terhadap masalah ini hampir dipastikan sebanyak 95 % warga tidak mengerti dan tidak ada keberanian untuk menegakkan hukum, sisanya kurang lebih 5 % yang peduli terhadap masalah ini. Namun demikian Pemerintah seharusnya dapat berperan sebagai kontrol atas nama undang-undang yang berperan untuk menegakkan hukum. Terlebih sudah sangat jelas bahwa pasal 48 undang-undang ini yang berbunyi :

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”

tanpa menyebut klasifikasi deliknya, yang berarti bahwa delik dalam perkara ini harus disamakan dengan delik biasa.

Penegakkan hukum dapat dilakukan secara efektif apabila perangkat hukum diberi kewenangan yang cukup, sarana dan prasarana yang memenuhi, serta dukungan politis yang kuat. Di Indonesia problem lingkungan sudah sangat kompleks dan serius, seharusnya dalam penegakkan hukumnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak lagi menggunakan pola-pola alternatif, tetapi dengan pola-pola penegakkan hukum yang hanya dilakukan oleh Negara sebagaimana perkara-perkara pidana lainnya, atau dengan cara mengkombinasikan ketentuan pasal 47 Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- perampasan keuntungan perusahaan atau operator penyebab rusaknya lingkungan hidup.
- penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dengan pelibatan masyarakat terkena dampak secara lebih luas dalam hal kontrol terhadap penegakkan hukum.
- mewajibkan kepada setiap badan usaha-badan usaha untuk transparan kepada publik tentang informasi-informasi usahanya terutama yang berpotensi merusak lingkungan.

c. Penegakkan hukum peraturan daerah.

Pembangunan kawasan industri candi yang diprakarsai oleh PT IPU Semarang pelaksanaan proyeknya didasari oleh selain undang-undang tentang lingkungan hidup, juga mendasari Peraturan daerah-peraturan Daerah. Peraturan daerah itu antara lain:

- Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Semarang tahun 2000-2010.
- Peraturan Daerah Kota Semarang nomor: 15 tahun 2004, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang tahun 2000-2010, bagian wilayah kota X kecamatan Tugu, dan Kecamatan Ngaliyan.
- Peraturan Daerah Kota Semarang nomor: 13 tahun 2006, tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dari perda-perda tersebut diatas, pemerintah kota Semarang melalui PPNS dilingkungan wajib menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran perda dimaksud. Kemudian permasalahan berikutnya adakah Perda yang dilanggar, dan apa bentuk pelanggarannya.

Pelanggaran Perda itu antara lain, diatur dalam pasal 44 Perda 15 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:

“semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan Tata Ruang harus mengacu perda RDTRK”.

Kemudian timbul masalah, apa saja yang diatur dalam perda-perda ini ?.

Yang diatur dalam perda-perda diatas, antara lain :

1. Penghentian penambangan bahan galian C yang terdapat di sepanjang jalan Dr.Hamka (Semarang – Boja) bab.III-2 huruf f, lampiran II perda nomor 15 tahun 2004.
2. Pengembangan kawasan industri ditetapkan di kelurahan Tambak Aji, dan kelurahan Wonosari, lampiran II Perda Kota Semarang nomor : 15 tahun 2004, halaman IV-2.
3. Lahan Konservasi dengan kemiringan 40 % ditetapkan yang ada di Kecamatan Ngaliyan.
4. Kawasan industri dan pergudangan, Kawasan ini ditetapkan di daerah datar hal.IV-6 lampiran II Perda 15/2004.
5. Penghijauan ditetapkan di daerah dengan keterangan 15-40 % untuk menjaga kestabilan lingkungan IV-10 lampiran II Perda 15/2004.

Dari ketetapan-ketetapan Perda tersebut diatas telah dilanggar oleh PT. IPU selaku pemegang ijin pemreksa Kawasan Industri Candi, selama 3-4 tahun dan di komplain oleh warga, tetapi Pemerintah Kota Semarang “ tidak ada keberanian “ atau setidak-tidaknya tidak ada tindakan hukum apapun kepada pelanggar ini.

Bab. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Bahwa pembangunan kawasan Industri Candi di jalan Gatot Subroto Ngaliyan Semarang yang diprakarsai oleh PT IPU pada mulanya pemrakarsa telah memiliki ijin untuk membuka lahan seluas 300 ha yang diperuntukkan bagi pergudangan dan industri non polutan, yang disertai dengan kajian Analisis Dampak Lingkungan, Rencana kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pembangunan kawasan industri ini dimulai pada tahun 1995/1996, site plan kawasan antara lain, untuk pergudangan, industri non polutan, penghijauan, dan ruang terbuka lainnya yang diperuntukkan bagi penampungan embung-embung air, daerah konservasi. Namun dalam perjalanannya, pembangunan kawasan industri ini, berdasarkan surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Semarang nomor: 660.1/512, tanggal 2 Oktober 2003, PT IPU selaku pemrakarsa kawasan ini, telah dinyatakan bahwa ijinnya telah dinyatakan dicabut atas kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan pasal 26 ayat (1) dan diperintahkan kepada PT IPU untuk merevisi dokumen Amdalnya, namun sampai dengan selesainya penulisan tesis ini, ijin kajian Amdalnya PT IPU belum selesai dibuat, yang disebabkan oleh adanya Eksklusivisme PT IPU sebagai pemrakarsa kawasan ini.

Walaupun pada tahun 2003, oleh Bapedalda Kota Semarang, telah dinyatakan secara terbuka bahwa ijin kawasan ini telah dinyatakan dibatalkan, karena site plan kawasan ini telah berubah atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, namun kenyataannya semenjak dicabutnya ijin itu, yang dinyatakan sejak tahun 2003 hingga saat ditulisnya Tesis ini, aktifitas di kawasan ini masih berjalan seperti biasa, seolah tidak ada pencabutan ijinnya dari Pemerintah Kota Semarang. Keadaan ini telah memaksa anggota Dewan Kota Semarang, telah melakukan peninjauan lapangan, namun eksekusi dari peninjauan tersebut, tidak ada respon apapun dari PT IPU selaku pemrakarsa kawasan ini. Reaksi masyarakat terkena dampak disekitar kawasan ini telah pula dilakukan, baik melalui media, langsung kepada birokrasi. Masyarakat yang telah melakukan keberatan atas kawasan ini, antara lain:

1. Masyarakat RW VI Ngaliyan Semarang.
2. Masyarakat RW VII Ngaliyan Semarang
3. Masyarakat RW X Ngaliyan Semarang
4. Masyarakat RW XI Ngaliyan Semarang
5. Masyarakat Perumahan Pasadena
6. Masyarakat desa Pucung, kelurahan Babankerep Semarang
7. Masyarakat Kelurahan Purwoyoso.

Kemudian pembangunan Kawasan Industri Candi oleh PT IPU Semarang dalam perjalanannya telah menyalahi Site Plan yang seharusnya diindahkan oleh PT IPU, kendala-kendala internal PT.IPU dalam pembangunan kawasan ini, adalah tidak ada transparansi, sehingga sangat menyulitkan bagi konsultannya Pt IPU yaitu CV Wida, kontrol masyarakat, apakah PT IPU itu telah menyimpang apa

tidak. Bahwa pembangunan Kawasan Industri Candi walaupun sudah ditegur oleh Pemerintah Kota Semarang, dan warga masyarakat terkena dampak, khususnya warga RW VI Ngaliyan atas penyimpangannya, teguran-teguran itu tidak lagi berarti apa-apa, bahkan tetap saja melakukan pengerjaan proyek walaupun telah diyakini bahwa Site Plannya telah dilanggar.

Pembangunan Kawasan Industri Candi oleh PT IPU yang melakukan dengan cara pemotongan bukit-bikit dengan kelerengan antara 15% sampai dengan 40%, walaupun dalam perda 15 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Bagian Wilayah Kota X (BWK X), bahwa daerah dngan kelerengan itu harus dipertahankan sebagai daerah sabuk hijau. Penghijauan untuk kepentingan konservasi dipertahankan, kemudian dalam BWK X ini juga menyatakan bahwa di wilayah BWK X tidak lagi diperpanjang areal galian C nya yang dinyatakan sejak tahun 2004, namun hal itu tidak diindahkan oleh PT IPU. Sanksi pun juga tidak ada, walaupun dalam perda ini, perbuatan itu adalah dikalsipikasikan sebagai pidana perda yang bersifat pelanggaran.

Usaha-usaha penyelamatan lingkungan di kawasan ini tidak dilaksanakan oleh pemrakarsa, antara lain:

1. Pembangunan kawasan ini sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sabuk hijaupun juga tidak dilaksanakan, walaupun dalam kajian analisis dampak lingkungannya Pt IPU telah pula ditetapkan adanya Green Beltnya.
2. Pengelolaan lingkungan utamanya pengelolaan limbah tidak dilakukan sesuai dengan ketentaun yang berlaku.
3. Kompensasi kepada warga terkena dampak tidak dilaksanakan.

Pembangunan Kawasan industri ini, berdasarkan keterangan yang diberikan kepada Warga RW VI Ngaliyan, Semarang menyatakan bahwa Daerah garapan PT IPU di Kawasn ini telah mencapai angka 400 ha, sedangkan ijin yang diberikan kepada PT IPU hanya boleh mengembangkan untuk kawsan seluas 300 ha, bahkan informasi yang berkembang di masyarakat Gedungpane Semarang, mengatakan bahwa wilayahnya telah dibeli oleh PT IPU, yang berarti bahwa luas wilayah kawasan Industri candi ini telah mencapai angka 600 ha lebih.

Bahwa sampai dengan tahun 2007, penelitian dalam rangka mendapatkan kajian Analisis dampak lingkungan yang menjadi prasyarat keluarnya ijin pembangunan kawasan ini belum juga turun atau di sahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang berarti kegiatan dikawasan ini, serta bangunan-bangunan perusahaan yang ada setelah tahun 2004, harus dinyatakan melanggar hukum. Dengan pelanggaran-pelanggaran ini pemerintah harus mencabut ijinnya dan harus menutup kawasan ini, selama kawasan ini telah dibangun dengan melanggar hukum.

Menutup kawasan Industri Candi yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketntuan yang telah diijinkan, namun kemudian telah dinyatakan batal berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tetang Analisi Mengenai Dampak lingkungan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapatlah diidentifikasi pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan hidup yang serius, antara lain :

1. Bahwa PT IPU yang menjadi pemrakarsa kawasan industri candi ini, telah membebaskan sebagian kawasan perumahan secara melanggar hukum yang telah dihuni oleh warga di wilayah RT 11, dan sebagian di wilayah RT 10 Rw VI Ngaliyan. Pembebasan ini bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1992, tentang Perumahan. Pelanggaran hukum ini, adalah delik pidana biasa, yang berarti bahwa tanpa adanya laporan/aduan, hukum harus bisa operasional, terlebih bahwa masalah ini sudah menjadi konsumsi publik melalui media.
2. Bahwa PT IPU telah melakukan penebangan pohon-pohon, pemotongan bukit-bukit tanpa ada ijinnya, pembuatan Air Sumur Bawah Tanah tanpa ijin, telah melanggar pasal 41 Undang-undang nomor 23 tahun 1997, tentang Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, serta melanggar Perda nomor 15 tahun 2004 pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : pelanggaran terhadap Perda ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000;00(lima juta rupiah).

Dari berbagai uraian tersebut diatas, secara khusus dan lebih sederhana, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kawasan industri candi ini telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Proses perijinan pembangunan kawasan Industri candi ini, yang seharusnya dilakukan setelah mendapatkan kepastian tentang

dijijinkan atau tidaknya pembangunannya oleh Pemerintah, baru kemudian dilakukan langkah berikutnya, namun ketentuan hukum ini tidak berlaku (dilanggar) hal ini terbukti dengan surat ijin dari penelitian nomor : 070/625/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004, pelaksanaan penelitian ternyata sudah dimulai sejak tanggal 13 Desember 2004 (mendahului satu hari dari rekomendasi ijin yang dikeluarkan)

2. Kendala-kendala pembangunan Kawasan Industri Candi dari sudut pandang kepentingan PT IPU selaku Pemrakarsa kawasan ini, tidak ada kendala, tetapi dari sudut pandang kepentingan masyarakat terkena dampak, justru kendalanya adalah ketiadaan transparansi pembangunan ini, sehingga masyarakat umum terkena dampak, tidak bisa berbuat banyak selain hanya menerima dampak negatifnya saja.
3. Pembangunan Kawasan Industri Candi ini telah menimbulkan dampak, antara lain :
 - a. kebisingan selama pelaksanaan proyek, dan selama proses produksinya perusahaan terutama yang berdekatan dengan kawasan pemukiman.
 - b. Peningkatan suhu udara yang semakin panas.
 - c. Pencemaran udara yang berpengaruh terhadap kadar kesehatan masyarakat sekitar (berproduksinya pabrik batubara yang tidak berijin), bau tidak sedap akibat sampah terutama pada musim penghujan, dan musim pancaroba, bau menyengat (aroma terbakar) yang terjadi hampir setiap jam 17.00 sampai dengan jam 21.00 wib.

- d. Kerusakan ekosistem yang serius, dan tidak ada pengendali dari pihak yang berwenang.
- e. Pemanfaatan sumber air bawah tanah (ABT) yang tidak terkendali (tidak berijin) oleh Kawasan Industri Candi, sehingga mengancam keberadaan Sumur Artetis penduduk sekitar yang dijadikan satu-satunya sumber air bersih bagi warga sekitar.
- f. Penambangan liar galian C, oleh Pemrakarsa (PT.IPU) yang tidak terkendali.

4. Pembangunan Kawasan Industri Candi ditinjau dari kajian hukum lingkungan sebagaimana tujuan dari hukum lingkungan, adalah untuk mengatur keseimbangan ekosistem, atau untuk mencapai keseimbangan ekosistem, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Candi ini, dengan cara melakukan kegiatan penggalian galian C secara illegal, mengeksploitasi Air Bawah Tanah secara berlebihan untuk memenuhi setiap perusahaan yang ada di kawasan ini, melakukan penebangan pohon-pohon, mendisfungsikan aliran sungai alamiah, menghilangkan fungsi konservasi, adalah bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap hukum lingkungan secara nyata, yang harus dituntut pertanggungjawabannya oleh subjek hukum ini.

B. SARAN.

Bahwa pembangunan kawasan Industri Candi yang diprakarsai oleh PT IPU telah banyak melakukan pelanggaran hukum yang berupa pelanggaran ijin lokasi pelanggaran tata ruang, pelanggaran Site Plan serta ketidak transparannya PT IPU dalam memberikan informasi tentang Rencana Pengelolaan, dan rencana pemantauan lingkungan.

Mengingat telah terjadinya akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT IPU sebagai Pemrakarsa kawasan ini, perlu disarankan kepada Pemerintah untuk :

1. Membekukan ijin yang diberikan kepada PT IPU selaku pemrakarsa kawasan Industri Candi ini, karena telah nyata-nyata melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan sengaja yang berkaitan dengan Pembangunan Kawasan ini. Alasannya adalah Pemerintah telah mengeluarkan ijin kepada PT IPU untuk menjadi Pemrakarsa di satu sisi, sedangkan disisi yang lain Pemerintah juga telah mengeluarkan ijin penguasaan lahan (tanah) yang saat ini telah dipakai sebagai Kawasan Industri Gatot Subroto, dengan pengeluaran ijin itu atau setidak-tidaknya dengan pembiaran atau tidak memeberikan keputusan yang jelas itu berarti menyetujui permohonan PT IPU, berart juga bahwa Pemerintah juga harus memikul tanggung jawab, atau harus memepertanggung jawabkan keputusannya sekalipun keputusan itu bersifat pasif.
2. Memaksa dengan menyita sebagian hasil keuntungan yang telah diperoleh oleh PT IPU, atau setidak-tidaknya menyita proyek-

proyek PT IPU yang terkait dengan pembangunan kawasan ini untuk dikuasai oleh Negara bagi kepentingan publik, terutama kepada masyarakat terkena dampak.

3. Perlu ada pembatasan waktu yang jelas tentang lamanya ijin yang diberikan kepada PT IPU, untuk mengantisipasi apabila PT IPU tidak mampu menyelesaikan ijin jangka waktu yang diberikan, agar kerusakan dan perlindungan terhadap ekosistem dapat dikendalikan dengan baik.
4. Perlu ada pembatasan secara jelas penggunaan lahan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis yang dikuasakan kepada setiap badan hukum-badan hukum dengan menggunakan pola prosentase wilayah secara pasti, dengan pertimbangan agar kawasan konservasi dan kawasan ekosistem yang sangat diperlukan masih dapat dijaga, dan dilestarikan demi kelangsungan ekosistem itu sendiri, agar kerusakan yang lebih serius dapat diantisipasi dan dikontrol oleh masyarakat luas, agar kesewenang-wenangan oleh para pemilik modal dapat dikontrol, sehingga keseimbangan lingkungan hidup masih dapat dipertahankan.

Daftar pustaka.

Achmad, Rukaesih, Kimia lingkungan, penerbit Andi Yogyakarta, 2004.

Arief Hidayat & Adji Samekto, Hukum lingkungan dalam perspektif Nasional dan Global, Undip Press, Semarang, 1990.

Arief Hodayat & Adji Samekto, Kajian Kritikal Penegakan hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Undip Press, Semarang, 2004.

Asikin, Muhammad, Penegakan Hukum Lingkungan pada era reformasi, Ujung Padang, 1999.

Steni, Bernadinus & Susilaningtyas, Tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam berbagai Undang-undang Setoral, dan upaya kodifikasinya ke dalam RKUHP, (Laporan Riset) Jakarta, 2007.

Fandeli, Chafid & Utami, Nur Retno, & Nurmansyah Safiudin, Audit Lingkungan, Gajah Mada University Press, Juni 2006.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, himpunan peraturan-peraturan hukum tanah, Djambatan, edisi 2004.

PT.Indo Perkasa Usahatama, Dokumen Kerangka acuan kajian analisis dampak lingkungan (Ka-Kadal), pembangunan Kawasan Industri Cand September, 2005.

PT.Indo Perkasa Usahatama, Draft dokumen kajian analisis dampak lingkungan (Ka-Kadal) pembangunan Kawasan Industri Candi, Januari 2006.

PT.Indo Perkasa Usahatama, Draft dokumen rencana Pemantauan lingkungan (RPL) pembangunan Kawasan Industri Candi, Januari 2006.

PT.Indo Perkasa Usahatama, Draft dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL), pembangunan Kawasan Industri Candi, Januari, 2006.

PT.Indo Perkasa Usahatama, gambar peta lokasi nomor: AGD 5911/1585/UPT/05, tanggal 14- 04-2005.

PT. Indo Perkasa Usahatama, Gambar Leftlet promosi dengan judul “Candi Industrial Estate”

Bruce, Mitchell, dkk, Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan Hidup, Gajahmada University Press, 2000.

Sudjana, Eggy & Riyanto, Penegakaan hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia, Gramedia, 1999.

Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan lingkungan, LP3ES, Cetakan Ke enam, Jakarta, 1993.

Warasih, Esmi, Pranata Hukum sebuah telaahan sosiologis, PT. Suryandaru Utama, 2005.

Hardjosoemantri, Koesnadi, 2005, Hukum tata lingkungan Gajah Mada University Press.

Hardjosoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, edisi ke lima, cetakan ke tujuh, Gajah Mada University Press, 1993.

Hamzah, jur Andi, 2005, penegakan hukum lingkungan, sinar grafika.

Harsono, Boedi, 2004, Hukum Agraria Indonesia himpunan peraturan-peraturan hukum tanah, jambatan

Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum, apakah hukum itu ?, PT.Remaja Rosdakarya Bandung, 1988.

Iqbal, Muhammad & Marzuki, Himpunan Peraturan perizinan lingkungan hidup di Indonesia, Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri Lembang, 1997.

Purba, Joni, Pengelolaan lingkungan sosial, Yayasan Obor Indonesia dan kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-bab tentang penemuan hukum, PT.Citra Aditya Bakti.

Santoso, Mas Ahmad, Good Governence hukum lingkungan, ICEL, Jakarta, 2001.

Santoso, Mas Ahmad, dkk, Hak gugat organisasi lingkungan (environmental legal standing), lembaga pengembangan hukum lingkungan Indonesia, ICEL, Jakarta, 1997.

Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Lampiran II, Peraturan Daerah Kota Semarang, nomor: 15 tahun 2004, tentang Rencana detail Tata Ruang Kota Semarang, Bagian Wilayah Kota X, 2004.

Harahap, M Yahya, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika, 2005.

Nawawi Arief, Barda, 2003, perbandingan hukum pidana,Rajawali Press.

Nawawi Arief, Barda, 2004, beberapa masalah perbandingan hukum pidana Rajawali Press.

Nawawi Arief, Barda, masalah Penegakkan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan

Nawawi Arief, Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

As Hornby, Oxford Advanced Dictionary of Current English.

Panduan penyusunan amdal dan budi daya kawasan lindung, BP Panca Usaha Jakarta 2004.

Pramadya Puspa, Yan, 1997, kamus hukum edisi Lengkap, Aneka Ilmu.

Rahardjo, Satjipto, 2000, PT.Citra Aditya Bakti Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2006, sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia, penerbitan kompas.

Soekanto, Suryono Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, 2003.

Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan dan pembangunan, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, 1994.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Wijoyo, Suparto, Penyelesaian sengketa lingkungan (settlement of environmental dispute), Airlangga University Press, Surabaya, 1999.

P.Hadi, Sudarto, Resolusi konflik lingkungan, Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2004.

P.Hadi, Sudharto, Dimensi hukum pembangunan berkelanjutan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002.

Winardi, kamus Ekonomi Inggris – Indonesia, Mandar Maju 1988.

Hadi Setya Tunggal, Pengelolaan lingkungan hidup, Harvarindo, 2006.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, sinar Grafika, cetakan pertama 1997

FX Adji Samekto, Kapitalisme pembangunan berkelanjutan dan hukum lingkungan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa, Rieneka Cipta 2005.

Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah, Audit Lingkungan,
Gajah Mada
University
Press, 2006.

Zoer, aini Djamal Irwan, Tantangan lingkungan & lamsekap hutan kota,
Bumi Aksara, 2005

Zoer,aini Djamal Irwan, Prinsip-prinsip ekologi dan organisasi ekosistem komunitas & lingkungan.Bumi Aksara2003.

Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia,Sinar Grafika, 2006.

Suparni, Niniek, pelestarian pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan, Sinar Grafika, 1994.

Suparni, Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakaan hukum lingkungan, Sinar Grafika, 1992.

Sundari, Siti Rangkuti, Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan dalam proses pembangunan hukum Nasional, (Disertasi) Surabaya, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, 1986.

R.M.Gatot P.Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,2004.

Rukesi, Ahmad, Kimia Lingkungan,penerbit Andi Yogyakarta,2004.

Dwi P.Sasongko, Agus Hadiyanto, Sudharto P Hadi, Nasio Asmorohadi, Agus Subagyo, kebisingan lingkungan. Badan penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000.

Robinson Tarigan, perencanaan pembangunan wilayah, edisi revisi, Bumi Aksara, 2005.

undang-undang sumber daya air, panas bumi, minyak dan gas bumi, penataan ruang CV Eka Jaya Jakarta, 2004.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004.